



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : 13
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juli 2020
Waktu : 10.20 WIB s.d. Selesai
Tempat : Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara : Membahas tentang:
1. *Progress Report* mengenai Pelaksanaan Program Strategis Terkait Dampak Pandemi COVID-19;
2. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Komisi IV DPR RI; dan
3. Isu-isu Aktual.
- Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
43 orang dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI, dengan rincian:
- 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)**
9 dari 12 orang Anggota
1. Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. H. Surnana, S.E., M.Hum.
 3. Drs. I Made Urip, M.Si.
 4. Ir. Effendi Sianipar
 5. Ir. Mindo Sianipar
 6. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 7. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
 8. Maria Lestari, S.Pd.

9. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

7 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H.
2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. Firman Soebagyo, S.E., M.M.
4. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
5. Ir. Ichsan Firdaus
6. Budhy Setiawan
7. Alien Mus, S.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

6 dari 8 orang Anggota

1. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
2. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
3. Renny Astuti, S.H., S.PN.
4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
5. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
6. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

3 dari 6 orang Anggota

1. H. Sulaeman L. Hamzah
2. H. Charles Meikyansyah
3. Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

4 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan, S.E. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
4. Drs. H. Ibnu Multazam

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

5 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'aeni, S.Sos, M.Si.
4. Muslim, S.HI., M.M.
5. Bambang Purwanto, S.ST, M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS)

5 dari 5 orang Anggota

1. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.H.
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
3. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syafrudin, S.T.,
2. M.M.Haerudin, S.Ag., M.H.
3. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, S.Sy.
2. Ema Umiyyatul Chusnah

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL));
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah,

Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
15. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
16. Ir. Hartono, M.Sc. (Sekretaris Badan Restorasi Gambut);
17. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
18. Ir. Agus Setya Prastawa, M.B.A. (Direktur Utama PT Inhutani I);
19. Ir. Sangudi Muhamad, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani II);
20. Ir. B. M. Setio Baskoro (Direktur Utama PT Inhutani III);
21. Ir. Andi Purwadi, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani IV); dan
22. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani V).

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Assalamu'alaikum warrahmatullahiwabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komis IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran,

Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut. Dalam hal ini para Anggota, Badan Restorasi Gambut tidak dapat hadir, namun mengirimkan surat yang bersangkutan sakit dan diwakili oleh Sekretaris Badan Restorasi Gambut,

Yang terhormat Direktur Utama Perum Perhutani,

Yang terhormat Direktur Utama PT Inhutani I-V, serta
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Sidang 2019-2020, dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 17 Juni 2020 pada hari ini, Rabu 28 Juli 2020 Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas target mengenai pelaksanaan program strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dampak pandemi Covid-19 dan tindak lanjut kesimpulan rapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan isu-isu lainnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Saya minta Anggota 1 orang dampingi saya dulu karena Pak Dedi sudah diatas namun lagi ada Rapat, tolong siapa 1 disini? Pak Ansi Lema, sini.

Pada hari ini pukul 10.20 menit Rapat Kerja kita mulai dan akan diakhiri pada pukul 15.00. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama.

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Menteri LHK,
3. Tanggapan Anggota Komisi IV,
4. Jawaban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
5. Kesimpulan Rapat,
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas realisasi anggaran Tahun 2020 adalah sebesar 31,55%, atau sebesar 2 Triliun 144 Miliar dari pagu anggaran sebesar 6 Triliun 795 Miliar. Capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini berada di urutan ke-63 (agak jauh nampaknya) dari 85 Kementerian/Lembaga. Untuk itu Komisi IV Dewan Perwakilan Rapat Republik Indonesia ingin mendapatkan penjelasan terkait penyebab rendahnya capaian kinerja yang dimaksud dan ingin mengetahui langkah dan upaya untuk mengejar ketinggalan tersebut. Dalam kesempatan ini Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ingin mengetahui secara detail *progress report* pelaksanaan program strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penanggulangan dampak pandemi Covid-19. selanjutnya sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga ingin mendapat penjelasan mengenai tindak lanjut atas beberapa kesimpulan terdahulu yang didalamnya juga terkait dengan beberapa laporan hasil Kunjungan Kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Komisi IV juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai isu-isu penting terkini, 1. Dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya, pencurian keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik, 2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta konflik tenorial dan hutan adat, serta pelestarian terhadap flora dan fauna. Atas penjelasan mengenai isu-isu penting yang dihadapi tersebut diharapkan dapat diketahui alternatif tindak lanjut pemecahan permasalahan serta dukungan yang diberikan oleh Komisi IV dalam rangka pencegahan serta pengendalian permasalahan yang terjadi.

Demikian pengantar yang kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan penjelasan hal-hal tersebut diatas.

Kami persilakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Selamat pagi,
Salam sejahtera.

Terima kasih.

Yang terhormat Ketua Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Ibu dan Bapak-Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,

Pertama kami menyampaikan syukur kepada Tuhan untuk Rapat Kerja hari ini dan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan DPR RI atas undangan Rapat Kerja hari ini dan kami juga tak henti-hentinya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas arahan dan catatan-catatan dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI bagi peningkatan kinerja Kementerian LHK.

Sesuai dengan surat undangan rapat, dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Ketua Komisi IV DPR RI bahwa ijin kami untuk melaporkan hal-hal yang terkait dengan progress pelaksanaan program strategis KLHK terkait dengan Covid, kemudian tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama KLHK yang dalam catatan kami terkait dengan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian Karhutlah terkait dengan *illegal logging*, penanganan satwa liar dan konflik satwa, penegakan hukum kerusakan hutan dan lingkungan, serta tadi juga disampaikan oleh yang terhormat Ketua pada pengantar berkaitan dengan persoalan keanekaragaman hayati, pencuriannya dan juga tentang masyarakat adat dan hutan adat.

Bapak Pimpinan, dan Bapak/Ibu Anggota yang terhormat.

Ijinkan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut yang akan kami sampaikan highlight. Dokumen secara tertulis telah kami serahkan. Dan kami ingin melaporkan, tadi disampaikan oleh Ketua yang terhormat juga sebagai catatan bahwa evaluasi atau progress keuangan untuk KLHK per tanggal 6 Juni adalah 31,5% dan hari ini tadi pagi kami cek di komputer Kementerian Keuangan yaitu 32,11 Pak Ketua. Jadi ada progress per hari, dan langkah-langkah percepatan sedang kita lakukan karena memang baru saja belum lama juga baru dilonggarkan di KPKN. Jadi sekarang proses administrasi sedang terus dilakukan. Procurement juga sedang berjalan dan diproyeksikan pada awal sampai pertengahan Agustus nanti bisa mencapai 49%, dan seterusnya kalau sudah beroperasi atau sudah terjadi proses pengadaan barang dan jasa maka sebetulnya progressnya bisa akan cepat. Jadi itu yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan anggaran.

Bapak Pimpinan, dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati,

Ijinkan pada tahap pertama ini kami melaporkan tentang penanganan limbah infeksius akibat kegiatan dan Covid-19.

Pertama, terkait dengan sosialisasi pengolahan limbah B3 infeksius Covid-19 dan fasilitas pelayanan kesehatan. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi bahwa sosialisasi ini didukung dan berlangsung bersama-sama yang terhormat Anggota yang secara langsung menjembatani bersama-sama dengan masyarakat. Jadi dalam record kita ada 55 wilayah. Kenapa kita pakai Dapil karena memang kami membutuhkan yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota untuk bridging dan bersama-sama masyarakat dan sudah terlaksana di 39 lokasi dan masih belum terlaksana pada 16 lokasi.

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati,

Pada daerah-daerah yang belum terlaksana. Ini pengertiannya adalah karena belum ada kesesuaian tanggal untuk pelaksanaan dilapangan. Jadi saya meminta Ibu Dirjen untuk mengintensifkan dan bila perlu mempersiapkan dilapangan lalu meminta waktu kepada yang terhormat Ibu atau Bapak Anggota yang berkaitan dengan lokasi tersebut.

Bapak Pimpinan, dan Bapak/Ibu Anggota yang terhormat,

Selanjutnya mohon periksa pada screen 9 prasarana dan sarana limbah infeksius berupa drop box, kemudian plastika pengumpul limbah, alat pelindung diri dan kendaraan pendukung. Kami laporkan bahwa pengadaan drop box dan plastik penampung limbah itu untuk 8 wilayah sudah dalam proses pengiriman. Jadi akan dilanjutkan terus dan nanti mulai 14 Juli akan diintensifkan lagi, akan berlangsung di lapangan. Kemudian 30 wilayah dalam proses penyelesaian administrasi dengan penyedia. Jadi ternyata drop box ini merupakan barang yang agak langka dan agak sulit. Sudah ada vendornya tetapi vendornya belum bisa merespon, sedang kami terus kejar. Kemudian pada 17 wilayah prosesnya sedang pengadaan dengan e-purchasing atau dan e-katalog. Pengadaan drop box pada wilayah-wilayah tersebut mohon periksa pada halaman 11 yaitu yang sudah selesai di 8 wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, kemudian NTT. Yang 17 segera menyusul. Jabar juga, Kalbar, Aceh, Jateng, Jatim, Jabar, Lampung, Sulawesi Barat dan NTB. Sementara yang 30 wilayah dalam penyelesaian. Mohon periksa pada halaman 11. Sementara itu untuk pengadaan APD (Alat Pelindung Diri). Di dalam *e-catalog*-nya memang tidak tersedia dalam 1 paket maka dilakukan dalam mekanisme lelang yang cepat, dan saat ini sedang dalam proses. Sedangkan untuk pengadaan kendaraan pembantu penyemprotan atau disinfektan untuk 26 wilayah sudah dalam proses juga pengadaan di e-purchasing. Beberapa dokumen kegiatan (mohon periksa pada halaman 13) dan progress report ada pada halaman 14. Jadi berapa persen, berapa dananya, dan sebagainya.

Bapak Pimpinan, dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati.

Selanjutnya berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan. Kita mempelajari dan belajar sangat kuat dari peristiwa pada Tahun 2015 yaitu kebakaran yang sangat dahsyat. Yang dipelajari terutama daerah-daerah

rawan karhutlah seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim dan kita terus pelajari.

Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Bagaimana cara kami mempelajari? Ini tidak ada didalam bukunya tetapi nanti bisa kami teruskan. Kami ingin menjelaskan bahwa kita melakukan overlay terhadap peta-peta yang ada, apakah itu peta kawasan hutan, peta hydrologis gambut, peta hutan primer, peta perijinan, peta hutan social, peta RAL, peta wilayah kerja KPH dan sejarah Karhutlah.

Ibu dan Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Ijinkan saya melaporkan bahwa selama 2015 sampai 2019 kita melihat daerah-daerah yang terus menerus terbakar seperti terlihat pada lingkaran yaitu di Riau, itu yang dilingkaran-lingkaran itu yang secara terus menerus terbakar seperti di Tesonilo, di Inhil, di Dumai, di Pulau Rupat dan lain-lain. Itu di Riau. Ini di Sumatera Selatan, juga didaerah-daerah yang lingkaran itu seperti di konservasi Berbak Sembilang, Musi Banyuasin, Oki, ini kelihatan datanya, juga di Jambi. Kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, itu datanya Pak Ketua seperti di Sebangao, Tanjung Putting, dan beberapa open akses dan di Kalimantan Selatan, di Tapin, di Hulu Sungai Utara Samasan Kota Baru.

Bapak Pimpinan, dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati,

Kalau kita pelajari, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas catatan dari Komisi IV DPR RI karena berdasarkan rapat-rapat di Komisi IV kami lalu mengembangkan secara keseluruhan apa yang terjadi, dan kita harus menyelesaikan seperti apa. Jadi rapat-rapat Komisi IV ini mendorong pada penyelesaian secara konseptual dan holistik. Kalau kita lihat dari yang kita lakukan atas dukungan Komisi IV yang bagian tengah adalah pengendalian operasional. Ini yang paling cepat dan sesaat dilakukan, seperti Satgas terpadu, deteksi dini hotspot maupun posko lapangan, penegakan hukum dan masyarakat peduli api. Ternyata disini lain belajar dari permasalahan di Riau tahun lalu itu asap yang berakumulasi dan bertumpuk dan menyebabkan kesengsaraan pada rakyat itu bisa diatasi dengan modifikasi cuaca. Disamping modifikasi cuaca itu juga bisa mengatur waktu hujan. Jadi oleh karena itu ada langkah analisis iklim dan langkah-langkahnya. Jadi bagaimana kita memonitor cuaca, bagaimana kita melakukan analisis, dan dengan demikian langkah modifikasi cuaca kita lakukan. Ini sudah mulai berjalan. Jadi tahun ini kita lakukan maka sebetulnya dan setelah itu bersamaan dengan itu kita harus melakukan pengelolaan landscape gambut misalnya itu terus menerus juga sejalan dengan operasi lapangan itu dilakukan, kemudian pengendalian terhadap para praktisi, konsesi, dunia usaha terutama dan juga penanganan pertanian tradisional. Ada dari catatan-catatan Rapat Kerja yang lalu kami membahas bersama Eselon I, ada yang menjadi perhatian dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV yaitu berkaitan dengan penegakan hukumnya bagaimana.

Oleh karena itu dari 3 konsep ini Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, serta Bapak/Ibu Anggota yang terhormat, itu kita masih harus melengkapi yaitu dengan langkah-langkah penguatan di tingkat tapak sembari meningkatkan masyarakat peduli api sambil memberikan kesadaran hukum masyarakat. Jadi dari 3 ini akan masuk yang ke-4 yaitu konsep para legal. Jadi kesadaran hukum masyarakat dengan memanfaatkan masyarakat peduli api dan penguatan KPH. Jadi sekarang ini kita harus melakukan praktek yang ini Pak Ketua. Oleh karena itu Tahun 2020 ini menjadi tahun yang kritis untuk kita bisa mendapatkan bagaimana upaya pencegahan Karhutlah secara permanen.

Jadi saya berterima kasih karena catatan-catatan sangat kritis dari Komisi IV ternyata konstruktif mendorong kami untuk berpikir sangat keras. Bagaimana contohnya? Contohnya nanti polanya seperti ini. Jadi konsesi juga bertanggung jawab, aparat juga kemudian langkah-langkahnya. Jadi ada kegiatan operasional KPH dan Desa. Kalimantan Barat adalah contoh daerah yang masyarakatnya sangat intens. Kalbar, dan Jambi, dan Kalsel saya lihat.

Jadi pola-pola tadi para legal dan masyarakat peduli api, dan KPH menjadi sangat penting. Kita dorong, ini contohnya di SIAK sudah di persiapkan desain untuk implementasi pencegahannya. Kalau ini berhasil baik maka sebetulnya kita bisa secara permanen mengatur jadwal untuk mencegah terjadinya karhutlah yang signifikan atau yang luar biasa.

Bapak Pimpinan, dan Ibu/Bapak Anggota yang kami hormati.

Selanjutnya saya mohon kita periksa halaman 18 yaitu lokasi prioritas pencegahan karhutla di 7 Provinsi. Ini tadi lokasi yang wilayah berulangannya, baik di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel maupun Kaltim. Jadi ini sudah terdeteksi. Wilayah-wilayahnya misalnya di Siak, Bengkalis, Tanjaktimur, Muara Jambi, Oki, Kuburaya dan seterusnya. Mohon periksa pada halaman 18.

Bapak Pimpinan, dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati.

Jadi ini langkah-langkah operasionalnya. Mohon periksa pada halaman 19. Jadi posko desa, kemudian juga penanganan terpadu di halaman 20, dan desa-desa sasaran patroli terpadu pada halaman 21, serta *Progress Report* pagu anggaran maupun capaian di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang bertanggung jawab untuk program karhutla pada halaman 22.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Selanjutnya ijin kami masuk kepada persoalan *illegal logging*. Mohon periksa selanjutnya pada halaman 24. Jadi ada kita memang ada gape antara kapasitas penindakan dan persoalan yang ada, kemudian juga ada langkah-langkah yang sedang kita upayakan dan progress kegiatan anggaran dan presentasi mohon periksa pada halaman 25.

Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Saya juga berterima kasih. Ini juga tidak ada didalam dokumennya tapi nanti bisa kami susulkan. Dari catatan-catatan pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, kita juga akhirnya bisa melihat secara konseptual penanganan *illegal logging* ini harus ada, dan kita lakukan sebetulnya. Hanya memang masih parsial. Dan ini harus ketemu. Polanya secara keseluruhan itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat *illegal logging* ini memang melibatkan KLHK, PPATK, Polri, TNI, Kejaksaan Agung dan Pemerintah Daerah. Dan berkaitan dengan langkah-langkah yustisia, kemudian langkah-langkah operasi lapangan, monitoring evaluasi, represif maupun pencegahan dan re-orientasi. Jadi dicart ini kelihatan bahwa *illegal logging* terkait dengan perambahan, ada kaitan dengan persoalan perijinan, ada metamorphosis ijin kebun, dan ijin tambang dan lain-lain.

KETUA RAPAT:

Bu Menteri,

Saya ingin nanya sedikit. Kalau kita lihat APBD per Provinsi untuk Dinas Kehutanan itu minim sekali, minim sekali. Contohnya di Lampung itu hutan lindung seluas itu APBD-nya Cuma 14 Miliar untuk Dinas Kehutanan. Ini juga saya bingung bagaimana. Kalau dari lihat rotmap penanganan ini kan bagus sekali tetapi pelaksanaannya dilapangan kan tidak demikian gampang Bu. Maka di Lampung itu Dirjen Gakkum lagi ramai marak-maraknya orang malingin kayu sono keeling. Itu tidak jauh dari Kota. Salah satunya Kabupaten Pesawaran atau di hutan lindungnya, sekitar Wan Abdul Rahmanlah itu. Itu masih banyak sekali. Dan hari ini ditangkap, minggu depan ada lagi yang maling. Jadi saya minta tolong, teman-teman Anggota Komisi IV juga melaporkan, menginfokan kepada Kementerian perihal APBD untuk Dinas Kehutanan. Sekedar info saja, berapa? Kecil kan. Nah itu loh. Yang lebih hebat lagi di Lampung contohnya untuk pertanian tidak sampai 10 Miliar. Ya ini sekedar kita sharing. Tujuannya kalau hanya mengandalkan Pemerintah Daerah nampaknya tidak bakal berjalan.

Bu Menteri,

Pak Dedi barusan nanya, mungkin tidak di Omnibus law dimasukan.
Pak Dedi silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ya saya menyampaikan memang hampir secara umum memahami hutan itu kan lebih banyak ke pemikiran eksploitasi, bukan perlindungan. Apalagi di daerah-daerah kalau dari sisi aspek. Sekarang kan musimnya musim pencitraan. Dari sisi citra susahlah nyari citra dari harimau, dari hutan itu susah sehingga tidak mendapat perhatian fokus utama. Apakah mungkin tidak di omnibus law sekarang kewenangan pengelolaan kehutanan itu kembali lagi ditangani oleh Pemerintah Pusat, kemudian semuanya dipetakan dan diperbanyak kembali hutan lindung. Saya sudah ngomong, kalau di luar

hutan lindung itu namanya kebon sawit. Tapi jangan sampai juga sawit jadi hutan, itu tidak cocok.

Terima kasih.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit Pak Ketua.
Boleh Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Mau nanya masalah apa? Masalah ini?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ada kaitan dengan Pak Ketua tadi.

KETUA RAPAT:

Oh ya silakan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya kira begini Pak Ketua sekedar masukan, kalau saya tidak salah kewenangan Kabupaten/Kota itu sudah ditarik ke Provinsi Pak Ketua. Inilah yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menganggarkan secara khusus masalah ini Pak Ketua. Saya kira ini kuncinya Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tadi Pak Salim yang saya sampaikan tadi Rp14 Miliar itu anggaran APBD Provinsi, bukan Kabupaten. Jadi Kabupaten pun seolah-olah bukan wewenang saya. Saya tidak punya tanggung jawab karena ini wewenang Provinsi tetapi di Provinsi dianggarkannya minim sekali.

Ya silakan Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

Ini saya mohon ijin menjawab dulu Ketua. Memang tidak merata daerah-daerah yang punya hutan produksi banyak. Biasanya dia punya APBD-nya agak lumayan. Kayak Sumatera Selatan misalnya APBD untuk karhutlah saja Rp37 Miliar Pak Ketua. Jadi kita harus lihat, nanti juga kami akan meneliti kembali sebaran ini Pak Ketua. Tetapi kalau misalnya, nanti kita akan exercise menurut pemikiran yang terhormat Pimpinan dan Bapak/Ibu

Anggota, bisa sebetulnya kalau APBN-nya didekonsentrasikan. Jadi kita mulai menstimulir Pemerintah Provinsi dengan dana yang kita limpahkan. Jadi bukan kita serahkan, kita limpahkan ke Pak Sekda misalnya untuk dia tangani kalau yang LH-nya ke Dinas LH, yang kehutanannya ke Dinas Kehutanan. Nanti kita bisa *exercise* itu. Dan pilihan yang lain adalah Pak Ketua dan Pak Dedi Wakil Ketua, saya sebetulnya mungkin sudah 2-3 tahun tapi tidak terlalu insist ya, tidak terlalu keras meminta pertimbangan untuk Komisi IV dan Komisi VII waktu itu, *involve* dan sangat terlibat didalam DAK (Dana Alokasi Khusus) itu juga sebetulnya menolong karena rata-rata tiap tahun kita mendapatkan, saya lihat Rp500 Miliar Pak Ketua. Tetapi kelihatannya kita belum terlibat untuk mendalami banget. Jadi nanti mohon mungkin kita sudah harus mulai melihat benar ini yang soal DAK-nya. Jadi kalau dekonsentrasi dan DAK itu dibarengin sambil kita lihat kawasan hutan produksinya karena dia dapat pajak juga dari situ, PNBP dan lain-lain nah ini mungkin akan menolong. Tapi yang kami ingin laporkan juga bahwa untuk langkah-langkah ini sebetulnya KPK sudah lama sejak 2011-an sudah mendorong untuk gerakan nasional perlindungan sumber daya alam. Sudah ada tanda tangan berapa belas Menteri begitu termasuk LHK pada Tahun 2015 dan ini masih terus dilakukan. Ini konsepnya adalah batas hutan kelihatannya. Kami di control terus oleh KPK tentang ini. Lalu pengendalian dengan pengembangan system penatausahaan hutan, system informasi Gakum, SPLK dan lain-lain, dan Simontana. Kementerian LHK sudah dapat juara penghargaan di KemenpanRB untuk 3 sistem ya Pak Sekjen. Setiap tahun dapat Pak Ketua, Bapak dan Ibu Anggota yang terhormat. Pertama, system informasi penatausahaan. Jadi setiap kayu yang lewat itu titik-titiknya langsung kelihatan. Sehingga sekarang tidak ada lagi perusahaan yang bilang bahwa saya tidak memproduksi karena aturannya LHK tidak bisa, karena truknya nomor berapa, sudah sampai di Pelabuhan atau sampai dititik mana itu kelihatan. Itu online. Ada lagi system kinerja perusahaan, itu juga kita dapat penghargaan dari KemenpanRB, dan satu lagi yang sedang di. Namanya sistem proper, lalu sistem sipongi (sistem informasi deteksi) kita juga dapat penghargaan juga, lalu yang sekarang sedang bertarung sudah di 99 sudah masuk sedang bertarung untuk 41, dan nanti bertarung lagi untuk 3 ke internasional yaitu system monitoring kehutanan nasional. Jadi system-sistem ini kita bangun terus, itu bisa menolong kelihatannya. Selain system pengaduan. Pengaduan masyarakatnya cukup banyak dan makin berkurang sih saya merasakan tetapi saya belum puas juga terhadap system pengaduan ini harusnya bisa lebih cepat. Catatan dari yang terhormat dari Ibu dan Bapak Anggota juga WA-WA ke kami itu juga kita respon dan itu di *Record* kedalam system pengaduan.

Kemudian ada juga pengendalian perijinan. Jadi moratorium-moratorium ijin baru juga penanganan keterlanjuran. Kemudian perhutanan social dan hutan kemasyarakatan di taman nasional misalnya itu juga menolong untuk mengurangi illegal logging serta pengawasan perijinan dan nanti kalau boleh kita akan tambahkan tadi dari catatan Pimpinan yaitu stimulan atau stimulasi penganggaran untuk Pemerintah Daerah dan petugas daerah. Jadi pendekatannya adalah pencegahan dari system pengaduan, patroli dan pengawasan, sanksi administratif, sengketa dan lain-lain. Dan hasilnya kita bisa lihat pada screen berikut, ini Pak Ketua hasilnya 2600

pengaduan. Ini sampai 2019. Kalau sampai Tahun 2020 itu datanya ada diberikannya. Kalau dibandingkan dengan periode selama 2010 dan sampai 2015, itu saya sengaja kasih datanya dibawah. Nanti mohon periksa Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati. Kalau lihat selama periode 2010-2015 itu table yang sebelah kiri bawah, itu bisa kita lihat perbandingannya cukup intensif karena dukungan dari Komisi IV dan pada saat itu juga Komisi VII DPR RI. Ini datanya sampai 2019.

Terus. Ini sampai Tahun 2020. Jadi 851 dan sebagainya. Ini capaian-capaiannya. Apa pendekatannya? Kelihatan sekali bahwa pendekatan yang harus dilakukan adalah kolaborasi, jadi langkah-langkah multidors, jejaring penyidik, jejaring masyarakat dengan *sains based* jadi berdasarkan pengetahuan sehingga ada system. Ini yang sedang kita kembangkan lagi, system forensiknya. Kemudian pengembangan instrument hukum, denda, non litigasi, dan juga penguatan kelembagaan.

Jadi saya berterima kasih sekali lagi dengan Rapat Kerja ini Pak Ketua dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati, itu jadi seperti memaksa kita berpikir secara konseptual dan kedepan harus mengatasinya seperti apa. Dan dengan demikian kalau konsepnya sudah jadi (firm) ini kedepannya tinggal kita melangkah. Jadi Tahun 2020-2021 ini saya kira tahun yang sangat penting untuk kita menangani secara keseluruhan persoalan-persoalan baik *illegal logging* maupun kebakaran hutan dan lahan.

Selanjutnya pada halaman berikut, didalam dokumen Bapak/Ibu sekalian pada halaman 28 kita akan masuk tentang konflik manusia dengan satwa liar dan pengawasan perederan *illegal* tumbuhan dan satwa liar ini sesuai dengan hasil Raker yang lalu.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Pada halaman 28 terlihat bahwa dalam tahun 2020 saja, selama bulan Januari sampai Juni itu kita melakukan pengawasan di pintu-pintu masuk Bandara dan Pelabuhan 40.142 itu dari Januari. Beberapa hari yang lalu Dirjen Konservasi, koordinasi ke Soekarno-Hatta ternyata terdapat paket Burung, satwa langka yang dikirim per-pos, jadi begitu ketahuan langsung ditangani. Jadi masih ada kelonggaran-kelonggaran itu kelihatannya yang terjadi di lapangan, ini kan memang tempo hari pak ketua kalau ingat kita waktu membahas tentang karantina kan sebetulnya KLHK meminta ada petugas kita yang masuk di dalam bagian karantina, kalau selama ini kita tidak bisa masuk ke dalam jadi hanya dari luar. Begitu yang terhormat pak Darori, saya kira ada pengalaman itu dan jadi tidak mudah untuk mengontrol secara langsung. Ini terjadi konflik selama tahun 2020.

KETUA RAPAT:

Sebentar bu, ini masih didalam masalah pengawasan, kita lihat petugas di bandara itu kan tidak bisa masuk yah, hanya di luar kira-kira seperti paranormal lah gitu. Kira-kira ini paketnya apa, isinya apa. Kemudian saran saya dari Sumatera menuju jawa itu banyak sekali yang ilegal, baik itu

tumbuhan dan satwa maupun lain-lain. Bisa tidak kira-kira kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bekerja sama badan karantina pertanian khusus untuk di Pelabuhan Bakaehuni? Kalau bisa, cepat di lakukan Karena hampir setiap bulan Badan Karantina Pertanian menangkap satwa liar yang akan diselundupkan ke Jakarta termasuk juga daging celeng. Padahal daging celeng atau babi hutan itu kalau dikerjakan dengan baik, dikemas dengan baik bisa diekspor ke Vietnam dan Thailand. Itu kan terutama paling banyak populasinya Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi itu paling banyak populasinya. Jadi saya harapkan segera bikin MoU kerja sama dengan Karantina terutama Pelabuhan Bakeuhuni. Karena itu setiap bulan mereka pasti ada tangkapan, dan mereka kan juga mempunyai kantor besar juga di sana baik itu karantina, pos jaganya yang dekat pelabuhan bakaehuni. Ini saran saya kalau bisa secepat mungkin.

Ya lanjutkan bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih pak ketua,

Terus *screen*-nya, Kita bisa lihat disini perdagangan ilegalnya, alur-alurnya tadi sesuai saran yang terhormat bapak ketua, saya kira pak dirjen konservasi, pak wiratno tolong kita harus sudah identifikasi seperti pola yang dimaksud pak ketua yang di bakaehuni. Karena yang di Maluku sudah lumayan, Sulawesi itu kalau tidak salah sumber Buaya juga.

Bapak ketua harga Buaya itu satunya yang setengah meter itu 7000-8000 dollar. Kalau Sumatera Utara misalnya yang paling banyak trenggiling itu satu sisiknya harganya 3 dollar, jadi satu trenggiling berapa sisiknya itu, di lehernya berapa puluh misalnya, tangannya, kakinya. Jadi barang ini tuh barang-barang mahal, jadi bayangin kalau sampai 7000 dollar. Ikan Arwana misalnya yang 5 cm itu harganya bisa sampai berapa ratus ribu, apalagi yang sudah besar berapa juta.

Pak Wiranto dari jalur-jalur ini tadi saya kira catatan yang baik dari pak ketua, kita mesti deteksi Pelabuhan-pelabuhan yang menjadi simpul, saya kira Bali, Surabaya yang paling banyak, Sulawesi selatan, Maluku. Mungkin kalau yang keluar Kalimantan timur seperti itu juga termasuk yang lumayan.

Nah ini catatan selanjutnya, mohon periksa pada halaman 30 penyelamatan harimau sumatera di balai-balai KSDAE seperti di Sumsel, Aceh, Riau, dan seterusnya. Ini peta-petanya di mana – mana kejadian konfliknya.

Bapak, Ibu pimpinan yang terhormat,

Mohon diperiksa selanjutnya pada halaman 31, itu untuk Harimau, dan untuk Gajah sumatera ini secara detail kelihatan. Selanjutnya untuk Gajah yang di sumatera mohon periksa pada halaman 33, kemudian khusus yang di Aceh dan di Lampung misalnya mohon periksa pada halaman 34. Sekarang

ini yang termasuk yang di lampung sudah di pasang 2 GPS *Coller*, jadi gajahnya di kalungin sehingga dia bergerak kemana gajahnya langsung ketahuan.

Sistem ini juga kemarin yang gambar badak yang di ujung kulon itu juga dipasangi kamera *trap* yang setiap dua belas hari sekali bisa diperiksa. Jadi sebetulnya sekarang langkah-langkahnya sudah dilakukan tetapi memang masih harus di intensifkan, sementara itu untuk orang utan di halaman 35 mohon periksa penyelamatan orang utan di balai-balai Kalimantan tengah, Sumatera Utara, Kaltim dan Kalteng sebanyak 16 ekor. Dan selama ini pelepas liaran sudah di lakukan kita punya voulenteeeri, yayasan-yayasan seperti bos *foundation*, orang utan, penyelamatan orang utan di sintang dan lain-lain. Dan selama tahun 2020 juga sudah dilahirkan sebanyak 6 orang utan. Jadi satu tahun sampai dengan bulan juni sudah 6 orang utan, Jadi *flagship species* yang di dunia menjadi perhatian itu adalah gajah, harimau, badak dan komodo. Jadi dengan demikian sebetulnya tidak tepat juga kalau dibilang pemerintah tidak mengurus atau tidak memperhatikan atau gagal mengurus ini, jadi kita terus berusaha.

Dan selanjutnya mohon periksa pada halaman 38 sebaran orang utan ini juga kita perhatikan ketika ada pembicaraan tentang rencana ibu kota Negara, maupun rencana penanganan wilayah pangan di Kalimantan Tengah. Jadi arahan Bapak Presiden perlindungan alamnya di duluin, Gambutnya diduluin, orang utan ataupun habitat-habitatnya harus menjadi perhatian.

Selanjutnya pada halaman 39 dan halaman 40 ini langkah-langkah penyelamatannya, itu gambar gajah ketika dipasangkan atau dikalungkan alat pantanya.

Kemudian selanjutnya, pada halaman 41 dalam dokumen Bapak/Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan patrolinya seperti di Taman nasional Gunung leuser, kerinci seblat, suaka margasatwa rawa singkil aceh, dan sikluk papua. Demikian pula gambaran aktivitas efektifitas patroli. Keliatan sekali di data ini bahwa misalnya jumlah jerat-jerat, jumlah jerat burung menurun, jerat nilun menurun, sling nah ini yang membuat celaka harimau ataupun gajah kakinya sampai busuk dan sebagainya itu juga kita ikutin perkembangannya di lapangan. Demikian seterusnya mohon periksa halaman 45 dan di halaman

Dan selanjutnya mohon periksa pada halaman 46 dan 47 tentang 10 UPT karhutla dan perairan serta juga tentang pemulihan ekosistem terumbu karang pada halaman 48 dan *Progress Report* KSDAE di halaman 50 sampai dengan 51 itu ada gambaran anggarannya, ada gambaran presentase progressnya.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Selanjutnya tentang kegiatan PDASHL, tentang kegiatan penanganan ekonomi produktif jadi RHL vegetatif mohon periksa pada halaman 53, volumenya juga kelihatan targetnya kemudian juga pagu anggarannya serta,

proyeksi-proyeksi capaiannya. Jadi ada mulai dari RHL vegetatif, penanaman, kebun bibit rakyat, kebun bibit desa, dan bangunan konservasi tanah dan air.

Selanjutnya pada halaman 56 selama menangani ini protokol Covid kita lakukan, saya mulai melakukan safari ke wilayah Jawa menggunakan mobil, lihat saja kalau menggunakan mobil bisa sampai ke Jawa Timur nanti setiap hari jum'at sampai dengan hari minggu. Kemarin kita bertemu dengan yang terhormat Bapak Sutrisno di Jawa Barat, di Majalengka saya sangat berterima kasih banyak arahan yang bagus-bagus. Saya bersyukur juga di Komisi IV DPR RI ini banyak mantan-mantan Bupati yang juga sangat paham tentang kedaerahan dan itu meningkatkan juga atensi masyarakat dan motivasi bagi masyarakat dan bagi KHLK.

Selanjutnya di halaman 56 jumlah hari orang kerja untuk kegiatan-kegiatan KLHK melalui rehabilitasi hutan dan lahan mencakup 5,66 juta hari orang kerja. Jadi kalau masa kerjanya 60 hari maka berarti orang yang bekerja menjadi 5,66 dibagi 60 jadi hampir 1jt orang yang terserap di dalam kerja-kerja terkait dengan KLHK.

Kemudian tentang realisasi fisik menurut kantor-kantor BPDAS, seperti cimanuk citanduy, Semanuk Serayu Opak Progo, berantas kemudian, solo dan lain-lain Mohon periksa pada halaman 58 dan 59.

Bapak pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya terkait dengan perhutanan sosial ini juga berada pada konteks memberikan dukungan kepada masyarakat, mohon periksa *Progress Reportnya* pada halaman 61 yang secara umum telah mencapai 4,194 juta hektar bagi 859 ribu KK dengan 6.632 kelompok.

Bapak Pimpinan, dan Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Saya mohon ijin, ini juga mungkin secara konseptual masih harus dikembangkan contohnya misalnya, hutan sosial di Jawa Barat pak Dedi misalnya. Kalau ada kelompok lalu satu kelompok 300 orang misalnya, didalam kelompok persil-persilnya kan harus ketahuan, nah ini sebetulnya dengan sistem GPS bisa ditentukan, karena kalau dia 35 tahun walau pun tidak dimiliki seperti sertifikat tetapi dia menjadi *line titling*, jadi bukan *Line Ownership* bukan dimilikinya tapi *titling*-nya atas nama dia selama 70 Tahun, Karena 35 tahun bisa diperpanjang jadi 70 tahun. Kami sedang memikirkan, merancang bahwa harus ada *line titling*-nya untuk Hutan Sosial supaya kalau di pakai untuk KUR ketahuan berapa luasnya, koordinatnya yang mana, kemudian namanya siapa, seperti itu bapak. Jadi, terima kasih banyak catatan dari Anggota Komisi IV DPR RI yang menstimulir untuk kita mengembangkan secara konseptual.

Jadi dukungan fasilitasi bagi Hutan dan Jasa Lingkungan pemberian alat ekonomi produktif seperti, alat pemisah kopi, rontok padi, alat sedot madu

dan seterusnya mohon periksa pada halaman 64 sampai dengan 67. Dan kalau kita lihat berapa sih misalnya, penghasilan, bagaimana meningkatkan produktifitas dan hasil masyarakat itu kita bisa lihat contohnya misalnya di halaman 70, jadi akan ketahuan kelompok tani hutan dengan hasil panen lalu dia mendapatkan per/tahun atau per/bulannya seperti apa. Jadi paling tidak program ini sudah bisa memberikan ruang untuk masyarakat menjadi produktif dan berpenghasilan. Saya mungkin dengan hormat mengundang Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati bisa ke Kalibiru kita lihat bagaimana peningkatan dia menjadi Eco Wisata dekat di Jogja. Atau ketangkahan Bapak, kita lihat bagaimana dari dulunya dia *Illegal logger*, tau-tau jadi pengurus Eco wisata. Jadi ada pola-pola yang sangat baik contohnya, di Padang Tikar ini di Kalimantan Barat ini juga luas, total modal dan pendapatannya ketahuan.

Selama masa pandemi Covid-19 kita melakukan pelatihan bagaimana telah kami laporkan kepada Bapak, dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati dan mohon periksa pada halaman 74 ini sudah selesai dilatih sebanyak 3.019 orang dan juga terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati, dalam gambar ini tidak semua Anggota ada, Yang terhormat Ibu Endang, Bapak Hermanto, dan lain-lain. Di halaman 77 dan seterusnya demikian pula, di Konservasi pada halaman 80 kalau dulu saya selalu menyampaikan, kalau di waktu yang lalu Hutan Konservasi itu kata yang terhormat Bapak Darori, "Ranting tidak boleh patah, nyamuk tidak boleh mati" jadi tidak boleh ada seorang pun yang boleh masuk. Sekarang dia berkembang Direktorat Jenderal KSDAE sudah melakukan pembinaan kemitraan, jadi masyarakat di desa-desa sekitar Hutan itu ada 6000-an desa *open up* areanya itu sekitar 2juta hektar, dan ini harus kita lakukan dengan cara ke mitraan Bapak Ketua. Jadi tidak bisa lagi masyarakat itu kita usir-usir, kita persoalkan tetapi sudah harus, kalau di Konservasi dengan pola kemitraan. Sekali lagi saya mengundang Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati kita ke tangkahan yah bapak salim yang terhormat nih, karena itu di Sumatera Utara dan Aceh, karena itu di Taman Nasional di sana. Jadi *Progress Report*-nya KSDAE sudah kami laporkan dan mohon periksa pada halaman 79.

Selanjutnya BP2SDM itu juga mendukung untuk pelatihan secara elektronik/*e-learning*. Disisi lain izinkan kami melaporkan untuk Hutan Produksi kita sudah melaporkan kepada Menteri Keuangan dan Bapak Menko untuk usulan relaksasi kebijakan guna mendukung ekspor dan lain-lain mohon periksa pada halaman 89 dan halaman 90 demikian pula rinciannya pada halaman 91, sampai dengan 96. Kemudian juga ada yang baru, ini juga secara konseptual masih harus kita kembangkan dan masih terus dikembangkan Bapak Ketua. Sekarang Hutan Produksi itu harus mengandung penerapan multi usaha, jadi bukan hanya Kayu tetapi, Getah boleh, Rotan Boleh, Madu misalnya kalau ada di dalamnya juga boleh. Oleh karena itu ini sedang terus kami kembangkan, sudah ada Peraturan Menteri untuk P6 Nomor 62 Tahun 2019, dan ini sedang kita lakukan jadi mohon periksa pada halaman 98 sampai 101.

Demikian pula SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu) yang selalu dipersoalkan. Saya mohon izin menegaskan di Rapat Kerja Komisi IV DPR RI ini, bahwa SVLK tidak akan mengganggu Industri Kecil Menengah Kayu, mengapa dalam hal bahan baku karena pada dasarnya kayu dari Industri Kecil Menengah Kayu kebanyakan dari HTI (Hutan Tanaman Industri) yang sudah ada SVLKnya juga. Kemudian yang sudah ada sertifikat Hutan Produksi Lestarnya itu kita Kontrol. Selama ini dikatakan bahwa SVLK akan menyulitkan bagi usaha kecil, itu tidak. Karena katanya mahal sertifikatnya nah ini kita sudah dukung dengan APBN, dan sudah diberikan fasilitasi kepada 1.894 industri menengah kecilnya.

Bapak Pimpinan, dan Bapak Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Selanjutnya tentang pengelolaan sampah kami sudah beberapa kali menyampaikan, mohon periksa pada halaman 103 sampai dengan 105, ini yang menarik adalah kalau kita lihat datanya pada halaman 105, bank sampah itu berkembang sangat pesat dari 2014 masih 1.170-an sekarang sudah menjadi 8.400. apa yang penting disini, berarti ada animo masyarakat dan adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitasi, tetapi memang di Undang-undang sampah itu bobot pembinaan dan pengelolaannya di Pemerintah daerah tetapi saya kira contoh-contohnya dari Pusat memang harus di berikan. Oleh karena itu pada konteks Lingkungan nanti kami mohon izin kita bisa Bersama-sama mendukung untuk masyarakat di dalam pemahamannya tentang sampah, dan terima kasih bahwa beberapa sosialisasi juga sudah dilakukan oleh beberapa Bapak, dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI.

Selanjutnya terkait dengan permintaan catatan-catatan pada saat RDP saya mohon izin melaporkan pada halaman 107 itu tertulis 125 hektar harusnya 125 juta hektar, jadi Saya mohon di koreksi. Datanya seperti terlihat pada halaman 108 dan 109 berapa luas Hutan menurut fungsinya, Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan lain-lain pada halaman 109 dan untuk setiap provinsi mulai dari Aceh, sampai dengan Papua di halaman 110 sampai dengan 139. Kita akan masuk ke tenurial dan Hutan Adat ini juga ditanyakan pada halaman 140 sampai dengan 149 mohon periksa itu adalah daftar kasus tenurial dan Hutan Adat di Areal kerja, nama-nama desanya terlihat, Provinsi dan Kabupaten itu datanya ada semua secara lengkap, Kemudian juga daftar kasus Tenurial dan Hutan Adat di Areal Izin Hutan alam di Halaman 148.

Kemudian terkait dengan Penegakan Hukum atas tindak kejahatan perusakan Hutan dan Lingkungan selama 2015-2019 pada halaman 150, jadi mohon periksa pada halaman 151 ini data Rangkuman hasil kerja Gakkum sampai dengan 22 Juni Jadi ada sanksi administratif. Di waktu yang lalu sanksi administratif belum di efektifkan kita baru mengawali setelah peristiwa kebakaran dahsyat di 2015, di halaman 151 itu ada sanksi administratif penyelesaian sengketa, juga ada angka-angkanya 4.729 pengaduan, sanksi adminisitratif 1.429 dan seterusnya. Penyelesaian kasus pidana 851 kasus dan 194 difasilitasi oleh Polisi dan Jaksa dan seterusnya. Detail hasil

penegakan hukum mohon periksa pada halaman 154 sampai dengan 189. demikian pula tentang nilai putusan dari penyelesaian sengketa dan denda nilai putusannya berapa dan sebagainya pada halaman 190 sampai dengan halaman 195, Jadi datanya sudah ada disitu.

Dan Selanjutnya ini juga penting tetapi ini kelihatannya masih secara konseptual kita harus pikirkan lagi soal Bio ... dan disini aspek kearifan lokal sebagai dasar dalam pembelian akses legal. Kementerian LHK sudah mengeluarkan peraturan sehubungan dengan kearifan lokal ini sudah ada di konvensi Riau dan Nagoya, di Konvensi *Biodiversity*. Jadi Kita memberikan ruang untuk masyarakat untuk terjadinya pengakuan dan perlindungan kearifan lokal jadi sudah ada permen 34 Tahun 2017. Jadi upaya yang sistematis dan terpadu untuk melindungi fungsi Lingkungan Hidup. Intinya bahwa kalau ada sesuatu dari lokasi tersebut sebagai kearifan lokal maka ketika dia misalnya di Produksi secara luas itu *benefit sharing*-nya harus diberikan kepada masyarakat lokal tersebut. Jadi sesuatu yang datang dari kearifannya kalau dia memberikan keuntungan, maka keuntungannya harus diberikan kepada masyarakat ataupun lokasi kearifan lokal tersebut.

Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami Hormati

Selanjutnya tadi terkait dengan keanekaragaman hayati dan pencurian itu *Bio*... mohon periksa halaman 200, 201, 202, bentuk-bentuknya di halaman 203 yaitu vaper tanpa sepengetahuan, kemudian pelanggaran kesepakatan kerja sama, publikasi tanpa izin terhadap pemanfaatan Sumber Daya Genetik, penelitian *Biodiversity* Indonesia tanpa izin, tidak ada peneliti Indonesia terkait *Biodiversity* yang dilakukan oleh Peneliti Asing, sampel hasil penelitian di bawa ke luar negeri tanpa Izin dan tidak dikembalikan ke Indonesia. Ini kalau hasil diskusi kami dengan LIPI memang terjadi, dan kita sedang berusaha terus bekerja sama dengan LIPI, kita kasih contoh misalnya di Halaman 204 ini mungkin yang terhormat Bapak Ketua sangat paham ketika yang terhormat Ibu Ketua Umum PDIP ibu megawati sangat marah soal kantung semar ini karena sebetulnya punya Taman Wisata Gunung Kelam terus dicuri dan di jual belikan, tau-tau ini hak patennya ada di Belanda. Kalau kita lihat *she shadow* itu kosmetik yang memakai tumbuhan-tumbuhan asal Indonesia tetapi hak patennya *she shadow* jadi kalau kita mau pakai kita mesti izin dengan *she shadow*. Jadi ada hal-hal yang seperti ini secara konseptual kita bapak ketua punya pekerjaan rumah untuk kita selesaikan. Contoh modusnya ini seperti yang sudah kami sampaikan di halaman 205, oleh karena itu memang perlu ada pengembangan aturan lagi perlu penerapan Saya kira Menteri Kumham Bapak Yasonna sudah berusaha untuk mensosialisasikan tentang hak paten dan mungkin dalam konteks Sumber Daya Genetik juga kami akan mengendors lebih kuat lagi tentang ini, disisi lain ada potensi *Bioprospecting*, jadi ada potensi-potensi nilai tinggi dari Sumber Daya Genetik tersebut.

Sudah hampir habis Bapak Ketua, ada satu atau dua isu lagi yaitu terkait dengan indeks kualitas Lingkungan Hidup mohon periksa pada halaman 208 ini angkanya adalah pencilan jadi begitu tinggi pencilan namanya kalau di statistik, kenapa? Karena sedang ada perbaikan metoda

jadi sehingga seolah-olah jatuh di tahun 2019 padahal sebenarnya metodanya sedang di perbaiki definisi-definisi dan lain sebagainya. Bagaimana tren kualitas air di daerah-daerah aliran sungai prioritas kita? Mohon periksa pada halaman 210 misalnya bagaimana di sungai citarum, bagaimana di sekampung, bagaimana di sadang, cisadane.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri, coba mundur dulu satu, saya mau tahu pengertiannya apa itu, terlewati, atau memenuhi, coba saya minta penjelasannya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ada baku mutunya bapak ketua, Baku mutu air

KETUA RAPAT:

Jadi kalau baku mutunya jelek, namanya terlewati?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Baku mutunya kan sudah di tentukan, nah begitu diambil contoh airnya dibawa ke lab, lalu kemudian dihitung, dicek "oh ini dibawah baku mutu" berarti tidak bagus.

KETUA RAPAT:

Terlewati?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terlewati

KETUA RAPAT:

Karena itu saya lihat kan ada way sekampung

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terlewati artinya, berarti kita harus memperbaiki sungainya atau mengendalikan pemanfaatannya dari orang-orang di tepi-tepi sungai itu. Yang bagus berarti cuma Bengawan Solo, Kapuas, Musi, dan Sadang. Yang lain terlewati. Cuma nanti berapa angkanya ini kelihatan, beban pencemarannya kelihatan bapak ketua.

Baik yang sisi lain tadi kualitas air, kemudian di kualitas udara seperti itu juga metodanya ada indeks, ini parameter 2,5 meter artinya dalam 1 meter³ udara ada partikel berapa %, ada P2,5, ada P10. P2,5 ini yang paling sensitif, P10 yang biasa dipakai. Artinya ada apartikel udara sebanyak 2,5% dari 1 meter³ udara. Kemudian kerusakan lain di ukur dalam lahan akses

terbuka di halaman 212 selanjutnya ini datanya terdapat lahan akses terbuka, artinya rusak dia pada 334 Kabupaten kemudian upaya-upaya pemulihannya juga sudah kita lakukan, contohnya yang di karawang, kemudian ada di bogor juga di malang juga, mungkin saya mengundang kita ke malang juga untuk melihat pemulihan akses terbuka, yang ada lagi di jogja juga sudah ada, kemudian di Sumatera Barat juga ada, di Dharmas Raya, dan beberapa lagi di daerah lain. Ini ada Jawa Timur, Jogja Gunung kidul, Bengkulu, Dharmas Raya, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Demikian Pula yang gambut kami sudah juga beberapa kali melaporkan kepada yang terhormat Bapak Ketua, mohon periksa pada halaman 214, dan 215 serta 216, dan juga tentang pencemaran sampah laut mohon periksa pada halaman 218 dan sampai 220, serta juga Langkah-langkah penegakan hukumnya mohon periksa pada halaman 227, jadi pencemaran dan perusakan lingkungan permasalahannya misalnya *dumping* limbah B3, pencemaran air akibat pertambangan, karhutla, dan lain-lain. Ini Langkah-langkahnya 228, sudah ada pengawasan terhadap 1.413 perusahaan, sanksi kepada 1.420 an, pencabutan izin, pembekuan izin, paksaan Pemerintah, paksaan Pemerintah itu artinya kita berikan SK kita kasih tau ke dia bagian ini harus di perbaiki, kalau tidak kamu akan ditingkatkan izinya di bekukan misalnya seperti itu. Ini ada urut-urutannya teguran tertulis, sampai dengan surat peringatan.

Selanjutnya terkait dengan Hutan adat ada dasar-dasar hukumnya, nah proses mohon periksa pada halaman 231. Jadi memang ini juga kelihatannya harus konseptual tetapi memang kalau kita ngomongin Hutan Adat kita banyak lakukan sesuatu tetapi ada persoalan. Ketika deliniasi hutannya sudah kita ketahui masyarakat adatnya ketahuan, tetapi tidak ada perdanya kalau dia di dalam Hutan gitu tidak bisa langsung tegak di berikan. Tetapi yang kita lakukan adalah kita cadangkan daerah itu bagi masyarakat adat tersebut, artinya dia sudah aman tidak akan mungkin diganggu oleh pihak-pihak lain, tetapi buat masyarakat adat itu belum cukup karena maunya mereka di SKnya dibunyikan dan SKnya kita serahkan ke mereka tetapi kita tidak bisa karena di dalam aturan Undang-undang 41 dikatakan itu boleh di berikan asal ada Perda tentang masyarakat adat itu sendiri, jadi bapak ketua ini ada Gep yang kami sedang usahakan komunikasikan dengan kawan-kawan di masyarakat adat terutama para aktivis pendukungnya begitu. Akhirnya memang dia akan terkait dengan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat yang sedang bergulir di Dewan itu ada kaitannya ke sana. Jadi dengan demikian kami mohon periksa pada halaman 234 itu sudah ada datanya, bahwa kita sudah mencadangkan sebetulnya, sudah di SK-kan bahwa daerah-daerah ini dari Aceh sampai Bali, Banten dan Seterusnya, Sumatera Barat, Papua Barat, Papua, 914 Ribu hektar ini sudah pasti untuk mereka tetapi ada persoalan Perda itu begitu, tetapi ini sudah aman, dan kita sudah diberitahukan kepada mereka.

Selanjutnya Langkah-langkah soal penyuluhan tadi sudah kami laporkan bahwa sudah ada FGD-FGD yang dilakukan, *Workshop* macam-macam subjeknya sesuai dengan Direktorat Jenderal demikian pula dukungan yang di Litbang.

Demikian kurang lebih Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak, dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tepat.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, ibu Menteri saya mau tanyakan, misalnya Satwa Liar yang sudah di offset, ditangkap, selama ini di kemanakan? Karena saya dengar ada info ada yang di musnahkan, ada yang diapakan, itu bagaimana?

Bisa tidak, kalau memungkinkan di manggala itu di bangun museum, misalnya 5 lantai paling tidak anak cucu kita akan dating "oh, Harimau Sumatera tuh seperti ini" tidak ada aslinya tetapkan tetap ada wujudnya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Izin Ketua, museumnya ada sudah puluhan tahun juga, tetapi museum kehutanan ada sebagian offset-offset itu tetapi memang tidak lengkap, dan kita belum cek secara sistematisnya, tapi kami akan periksa. Tetapi Cuma 1 lantai aja Bapak ketua.

KETUA RAPAT:

Ya kalau cuma 1 lantai kan membutuhkan tanah yang lebar, kalau 5 lantai misal satu bangunan 500 Meter, 5 lantai sudah 2500 M², paling tidak kan ada yang ditinggalkan secara *legacy*-nya. Jadi nanti dalam kesimpulan Rapat tolong dimasukkan, karena saya melihatnya kan sayang sekali kalau di bakar itu, ditangkap ya dibuat saja yang bagus misalkan kelompoknya Hewan Satwa Liar Besar; Harimau, kemudian lantai 2 apa, lantai 3 apa ya. Saya minta tolong cuma itu saja supaya ada sejarahnya lah.

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan selanjutnya kami persilahkan kepada Anggota Komisi IV DPR RI untuk Mengajukan pertanyaan atau tanggapannya.

Kami persilakan Pak Dedi.

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H./F-PG):

Baik.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Bu Menteri beserta jajarannya,
Pak Ketua,

Kalau rapat dengan KLH Ketua itu beda mukanya, tenang, lembut sedikit, gayanya playboy, tapi kalau rapat dengan Kementerian yang tidak usah sebut wah mukanya itu kayak harimau. Kalau sekarang ini Pak Ketua kelihatan unyu-unyu.

Baik. Kita mulai menyampaikan berbagai pokok pikiran dan gagasan yang saya tadi menyampaikan juga ke Eyang. Saya katakan tetap. Kalau saya sih nanti Omnibus law itu kalau yang produksi itu bukan hutan lagi, kebun. Kalau yang didalamnya konservasi namanya hutan. Karena saya khawatir nanti di peta itu dibuat. Hutan padahal kebun. Kelihatan hijaunya saja padahal kebun, bukan hutan. Karena bagi saya hutan itu fungsinya konservasi tidak fungsi lain. Kalau sudah fungsinya produksi, kebun. Makanya kita berkebun, berkebun sawit, berkebun jati, berkebun sengon, berkebun mahoni, dan ragam lainnya sudah ada kepentingan produksi. Mudah-mudahan ini bagian upaya menyelamatkan hutan kita kedepan karena ini aset yang tidak mungkin kita wujudkan kembali dan seiring dengan perkembangan waktu dimana fokus manusia Indonesia hari ini hanya pada bidang politik, isu-isu yang bersifat genit itu yang menjadi bahan perhatian, tapi isu-isu lingkungan relatif rendah perhatiannya termasuk persoalan harimau yang turun kampung, gajah turun kampung. Kemudian terakhir saya sangat trenyuh, menurut saya oleh Ibu Menteri diberi penghargaan deh sama orang yang setiap hari saya lupa namanya. yang setiap hari ke sungai kemudian kasih makan buaya, kemudian hidup berdampingan, anak-anak kemarin berenang bersama buaya, itu dikasih penghargaan oleh Pemerintah, penyayang buaya. Nah kalau yang buaya disini itu buaya lain.

Baik. Kita mulai dari penyanyi kita lama lawas Bu Endang Estorina.

Silakan Bu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua dan sahabat-sahabat saya.

Selamat pagi.

Kemudian Ibu Menteri dan jajarannya yang saya banggakan.

Jadi pertama kali penghargaan Pak Ketua kepada Ibu Menteri yang telah mendapatkan dari Pemerintah Norwegia dengan membayar 812,86 Miliar kepada Pemerintah Indonesia atas keberhasilannya menurunkan emisi karbon. Tepuk tangan dong untuk Ibu Menteri. Jadi saya bangga sekali Bu Menteri.

Nah ada beberapa yang kami usulkan untuk Perhutanan Sosial bu Menteri, jadi kebetulan Dapil saya di Cianjur ini ada beberapa LMDH (Lembaga Masyarakat Dan Hutan) Kelompok yang telah mengikuti beberapa pelatihan yang merupakan dari LHK. Kemudian hampir dari 80% luas

lahannya itu merupakan petani kopi yang belum diberi fasilitas untuk pasca panennya. Nah kemudian dari CSRnya BRI beberapa tahun yang lalu sudah ada tetapi tidak kontinu jadi mohon diperhatikan, yang diperlukan adalah mesin pengupas kulit kopi basah, kemudian mesin pencuci kopi, mesin pengupas kulit arinya, dan juga mesin pengering biji kopi, dan kalau ada mesin sangraynya ibu, satu paket. Kemudian tentu saja untuk pengemasannya juga diperlukan, apakah dari LHK, apakah harus ke Kementerian Perindustrian, ini dia yang mau saya tanyakan karena sudah mulai di ekspor. Kalau kita melihat dalam sejarah ini kopi yang paling tua bu di Indonesia Cianjur itu, cuma tidak di ekspos saja.

Kemudian yang kedua tentang pengendalian dan pencemaran dan perusakan lingkungan jadi kami mempunyai aliar DAS di cisadane, yang tadi bu yang tadi ibu ceritakan kearifan lokalnya ini diperlukan untuk sosialisasi program supaya mereka menyadari bu. Karena untuk menyelamatkan Makhluk Hidup dan Ekosistemnya akibat perusakan tersebut kemudian pemantauan dan memperbaiki bu kerusakan yang telah terjadi. Kemudian yang tadi saya dengarkan dari ibu, kalau kita memperkenalkan bagaimana melindungi dan mengembangkan sungai cisadane sebagai Objek Wisata. Kemudian menjadi Pendidikan alam bu, karena banyak sekali di sekitarnya itu sekolah-sekolah yang bisa memanfaatkan cisadane. Nah permasalahannya karena melintasi pemukiman padat misalnya di wilayah Bogor Timur, Bogor Tengah dan Bogor Barat jadi di wilayah tersebut banyak sekali tempat pembuangan sampah, yang tadi saya usulkan ke Ibu Dirjen kalau bisa kami memang sudah membuat beberapa titik untuk bang sampah tetapi tidak mempunyai mesin pencacahannya bu, sehingga agak sulit untuk dikembangkan sebagai pupuk organik misalnya.

Kemudian yang kami butuhkan adalah Perahu Karet yang bermanfaat karena kalau lagi banjir kami sangat sulit untuk mengungsikan para penduduk di sekitarnya. Kemudian solusi masyarakat tidak membuang sampah ke sungai adalah perlu membangun tempat pengolahan sampah dengan teknologi *Incinerator* kalau bisa, ini kami perlukan untuk daerah Bogor. Kemudian juga Bogor ini tempat pembuangan dari limbah Bahan, Berbahaya, dan Beracun (B3) jadi TPA Galuga saat ini yang ada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor merupakan titik yang terawan untuk polusi udaranya, nah mohon ibu bisa memfasilitasi karena tadi bu, Dinas Lingkungan Hidup Bogor anggarannya sangat kecil dan ingin mendapatkan support untuk mendapatkan prestasi Adipura jadi mohon bantuannya. Dan dari pihak Pemerintah Bogor sudah dihubungi oleh beberapa investor untuk memberikan teknologi dari mengubah produk plastik, kemudian menjadi solar atau diesel. Nah tapi saya belum mengijikan karena tentu saja harus ada kajian supaya limbah plastiknya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah tentu saja hal ini bagus sekali karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai akibat dari Covid ini.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih Bu yang mengingatkan tentang sungai Cisadane. Yang pada kesempatan ini juga saya nyambung, menyampaikan kepada Ibu permohonan dari masyarakat Baduy untuk di-*closing* terhadap destinasi wisata. Karena kedatangan wisatawan ke Baduy itu memberikan kerusakan lingkungan, membuang sampah plastik, coret-coret dimana-mana, dan terjadi eksploitasi kepentingan bisnis bagi masyarakat Baduy yang orang Baduy tidak suka melakukan itu. Atas nama orang Baduy jualan madu, atas nama orang Baduy jualan pernik-pernik, atas nama orang Baduy mungkin segala rupa dijual dan nama Baudy menjadi tercoreng, sedangkan orang Baduy adalah kelompok masyarakat sunda yang tersisa yang menjunjung tinggi kesucian hidup, kesederhanaan, dan kepasrahan pada alam. Mohon disampaikan ke Pak Presiden untuk ditutup kepentingan destinasinya. Biarkan orang Baduy menjadi peradaban yang menjadi guru kita utama dalam menjaga lingkungan, dan yang paling utama juga kawasan hutannya mohon diperluas karena selama ini mereka semakin terkikis kawasan hutannya dan mereka sudah bisa hidup. Barangkali satu-satunya pohon, satu-satunya Desa yang menolak bantuan Desa adalah mereka. Karena dengan menerima bantuan Desa bagi mereka menurunkan harkat dan martabatnya. Orang yang menerima bantuan itu adalah orang yang rendah dalam pandangan orang Baduy. Saya pikir sangat luar biasa.

Selanjutnya Pak Salim Fakhry.

Terima kasih.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Ibu Menteri dan jajarannya yang kami hormati.

Semoga Pak Dedi yang memimpin rapat ini kita, karena kesempatan Pak Sudin tidak ditempat Pak.

Baik. Saya langsung Ibu Menteri. Saya juga apresiasi Bu apa yang dikatakan Bu Endang tadi Bu. Rp812 Miliar menurut yang kami baca, dengar di *mass media*. Norway membayar insentif Bu untuk Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini benar? Ada uang kita Rp812 Miliar, hasil atau akan ya Pak Darori. Hasil, karena kita bisa menurunkan emisi karbon. Ini kalau memang kita sangat apresiasi. Keberhasilan Ibu dan teman-teman apalagi dulu Wamen tidak ada, mungkin berkat karena Wamennya ada Bu. Jadinya satu pertanyaan saya Bu, andaikan ini uang ada Rp812 Miliar.

KETUA RAPAT:

Pak Salim Fakhry,

Mohon kok Bapak tidak kayak biasanya, coba sedikit tegaslah saya minta.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Baik Pak Ketua.

Andaikan ini Rp812 Miliar Bu menyangkut ke pertanyaan saya yang lalu, sudah Ibu jawab Bu masalah pembangunan di Balai Penelitian di Gunung Leuser. Jawaban Ibu, kita harus dulu kaji bersama NGO, LSM, BLI, LIPI, Pemda. Memang benar Bu. Cuma harus Ibu pahami dan teman-teman semua. Taman Nasional Gunung Leuser karena saya ini anak bangsa Bu dan putra Aceh wajib memberikan pandangan, pemikiran, sumbang saran ke mitra Bu. Taman Nasional Gunung Leuser Bu khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara Gayo Luwes tersebut Bu, kita tidak bisa menanami apa pun Bu, berkebon sudah tidak bisa, berusaha tidak bisa. Karena ada Keppres 33. Sepanjang Keppres 33 belum dicabut ini apa pun tidak bisa, dari 100%, 84 koma sekian persen kalau saya tidak salah Taman Nasional Gunung Leuser yang tidak bisa diusahakan, diusahai oleh masyarakat disekitar Gunung Leuser untuk berusaha mencari nafkah. Sementara Pak Ketua, daerah kami pertanian adalah penghasil utama. Dari dulu kami menuntut agar ada kompensasi yang katanya hutan kami hutan perawan, hutan primer. Jangan diganggu, tidak boleh. Saya kira Pak Dirjen Pak Wiratno sudah hafal betul disana Bu karena Beliau mantan Kepala Taman Nasional Gunung Leuser. Jadinya tingkat penelitian saja kami minta. Tujuan kami bukan apa-apa Ibu Menteri supaya hutan ini terjaga Bu. Paru-paru dunia. Norwegia sudah memberikan. Andaikan balik ke pertanyaan saya, andaikan pembiayaan ini ada, apa salahnya fokus ke Taman Nasional Gunung Leuser. Sebab, masalah karbon ini kalau saya tidak salah di dunia Nomor 3 Bu Taman Nasional Gunung Leuser, setelah Amazon, setelah apa lagi. Taman Nasional Gunung Leuser adalah yang ketiga yang terbesar. Seperti yang saya katakan dalam Raker terdahulu Pak Ketua, Uni Eropa dunia mengatakan paru-paru dunia. Sementara orang disekitar Taman Nasional Gunung Leuser tersebut kena paru-paru, karena tidak bisa cari makan. Sebenarnya inilah harapan kami kepada Ibu Menteri dan jajarannya, bisa 2021 untuk fokus apalagi sesaat nanti rekan saya dari Aceh lagi memberikan nanti pasti permintaan masalah pengalihan Kantor Besar Taman Nasional Gunung Leuser dari Sumatera Utara ke Provinsi Aceh. Nanti Pak Khalid kami sudah bagi tugas, Pak Muslim lain nanti urusannya. Sebab kami ini Bu, beruntung Aceh Bu 3 Anggota DPR mitra Ibu, dan selalu mendukung Ibu.

Jadinya selanjutnya Bu yang terakhir, mungkin untuk menjaga Taman Nasional Gunung Leuser tersebut disana ada di pinggir-pinggir apa ada namanya Sungai Bu. Sungai Alas yang untuk tempat rafting luar biasa. Apa salahnya ini pun Bu mohon perhatian, karena ini adalah tugas seorang Anggota Dewan yang dipilih rakyat. Harus wajib menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah, karena kami digaji untuk berbicara untuk menyampaikan sesuatu demi kepentingan umat. Mungkin Pak Ketua, ini yang sangat sampaikan. Ijin juga ini Pak Ketua, Pak Khalid kami dari Aceh sudah bersepakat sama Pak Muslim memberikan sesuatu permohonan kepada Ibu

Menteri karena Pak Khalid dipanggil ke Kertanegara ada urusan mungkin mau promosi calon Gubernur Aceh *Insya Allah*. Aamiin.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Sejak kapan Bapak sama Pak Khalid baik banget. Kalau Pak Khalid dipanggil ke Kertanegara saya ijin. Yang saya tidak ijin Pak Khalid dipanggil *Allah Subhanahu Wata'ala*.

Silakan Pak.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Siap.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Pimpinan, seluruh Anggota Dewan yang saya muliakan, Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya yang saya banggakan.

Sebenarnya tadi sekilas telah disampaikan oleh senior saya Bang Salim Fakhry. Kenapa kami mungkin 3 orang ada di Komisi ini, karena kalau berbicara hutan ini tidak bisa lepas dengan Aceh apalagi bilang Leuser. Paru-paru dunia. Maka mudah-mudahan Bu Menteri pada kesempatan ini dan saya mohon dukungan Pak Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi IV DPR RI juga Kementerian Bu Menteri, beserta seluruh jajaran agar hari ini harus ada kesimpulan tentang pemindahan atau pengembalian Balai Besar TNGL ke Aceh. Kenapa ini perlu saya sampaikan, karena semakin hari Bu Menteri suara masyarakat arus bawah semakin besar, semakin terang terdengar. Seolah-olah perjuangan rakyat Aceh tidak lagi bersuara nyaring di Pusat malah Pusat lebih nyaring terdengar suara bom dari Aceh. Kami disini ada 3 orang. Kenapa mesti saya sampaikan di pengantar ini? Karena jujur saja Bu Menteri, permintaan pemindahan BP TNGL dari Provinsi Sumatera Utara ke Aceh sebagaimana juga telah saya sampaikan pada rapat virtual sebelumnya bahwa jumlah luas lahan yang masuk ke Aceh 75 sampai 80 persen, kemudian Pemerintah Aceh telah meminta kepada Pemerintah Indonesia sejak Tahun 2015. Ini ada surat Gubernur saya bawa. Tahun 2015 tanggal 22 Oktober malah surat ini diawali karena hadirnya Pak Menteri Kehutanan dulu Pak Zulkifli Hasan, Pak Gubernur saat itu Pak Dr. H. Zaini Abdullah meminta agar dipindah segera BP TNGL langsung Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri menyahuti didepan Eselon didepan Forkopimda akan dipindahkan. Ternyata tidak terlaksana. Kemudian pada Tahun 2016, Gubernur Aceh kembali menyurati LHK, meminta untuk dipindahkan juga tidak terlaksana. Pada Tahun 2017, kemudian masyarakat mengadu ke Ombudsman, Ombudsman juga merekomendasi untuk dipindah. Kemarin tanggal 29 Juni, saya juga menyampaikan melalui rapat virtual sehingga disikapi oleh Gubernur Aceh

sekarang Plt, tanggal 1 Gubernur Aceh menyurati lagi surat kepada LHK. Jadi mohon maaf, sebenarnya menyangkut hutan kami hanya minta menyangkut dengan pemindahan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser yang sudah nampaknya begitu berat perjuangan ini. Sejak Tahun 2015, sebenarnya ada apa. Maka pada hari yang berbahagia ini, di ruang rapat ini saya mohon dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan saya mohon agar ini masuk dalam kesimpulan Rapat hari ini kapan itu pindah, apakah bulan depan, atau kapan. Kalau jawaban yang kemarin.

KETUA RAPAT:

Ijin Pak.

Nanti mau dimasukin kesimpulan kan? Ya Bapak jangan dulu keluar dari sini sampai selesai.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Siap.

Karena kenapa Pak Ketua Pak Dedi, karena disini saya lihat alasannya. Jawaban saya kemarin waktu saya virtual kemarin. Jawabannya ada moratorium pembelian tanah dan pembangunan Kantor sejak Tahun 2015. Ini jawaban kemarin saya terima. Ini mohon maaf. Tolong Bu perjuangan kami orang Aceh dihargai juga. Janganlah sejak Tahun 2015 permintaan ini tidak tercover. Padahal mohon maaf ini, mohon perhatian kita semua dan seluruh Anggota Dewan Komisi IV dan Kementerian, kalau kita rujuk dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka ada sebuah point dimana 133 kami berhak mengelola hutan sendiri. Itu perjanjian GAM dengan RI, dan dijawab oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dimana pada Pasal 150, disebutkan Pemerintah Indonesia menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser diwilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari. Ini kapan, sudah 15 tahun malah Kantor saja kami minta begitu rumit dan jawabannya moratorium. Dan kemarin saya koordinasi dengan Plt Gubernur Aceh. *Insyaa Allah* kalau LHK tidak mampu menyediakan Kantor BP TNGL di Aceh, *Inshaa Allah* kami orang Aceh sanggup memberikan Kantor itu.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih.
Duduk dulu sebentar Pak.

Oh ya serahin.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Mohon saya didampingi oleh Kakanda saya Pak Salim Fakhry dan Pak Muslim. Ini bicara kepentingan Aceh, bukan bicara Partai.

KETUA RAPAT:

Ini bicara kepentingan Aceh, bukan bicara Partai. Silakan. Hanya minta pindah tempat bukan minta kemerdekaan.

Silakan yang merasa orang Aceh, tokoh Aceh kedepan.

Ya terima kasih.

Ini dua-duanya calon Gubernur Aceh. Oh tiga-tiganya. Yang paling kanan mewakili Harley Davidson. Ini Cuma pindah Kantor saja, gampang, besok juga pindah. Nanti masukin kesimpulan ya daripada urusannya panjang. Tapi kalau kata orang sunda jangan sampai pakai nama Pak Suhardi jawabannya. Kalau orang sunda jawabannya “duka” itu belum pasti.

Pak Suhardi silakan menyampaikan pernyataan. Silakan. Ada tidak? Tidak ada. Banggar. Lewat. Nah selanjutnya yang cantik, Bu Nur. Baduy tadi.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi,
Ibu Menteri beserta para jajaran Eselon I yang saya hormati.

Mungkin dari saya sedikit minta penjelasan kaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kehutanan serta adanya denda ganti rugi ini yang disetorkan kepada kas negara melalui KLHK. Disini Ibu Menteri belum menjelaskan, ini seperti apa ya. Kalau disini dari data-data yang disampaikan luar biasa nilainya fantastis sekali. Tapi kalau jawaban yang disampaikan melalui ini tertulis bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak ini disampaikan dari tahun ke tahun ini sepertinya fluktuatif ya, kadang naik kadang turun, kenaikannya pun tidak signifikan. Apakah memang PNBPN yang disampaikan lewat tertulis ini sama dengan denda ganti rugi yang disampaikan melalui KLHK. Ini mohon penjelasan.

Berikutnya, kalau dari sisi progress report serta evaluasi dalam kegiatan pandemi Covid yang lalu, memberikan apresiasi kepada Dirjen B3 (Ibu Vivien) yang sudah merealisasikan kegiatan tersebut, serta ada beberapa mungkin dari APD dan yang lainnya yang belum terealisasi. Tentu kami berharap untuk secepatnya untuk direalisasikan.

Dari PDASHL, ini sangat disayangkan karena memang programnya ini belum dilakukan secara signifikan, akan tetapi kalau dilihat dari sisi tadi indeks kualitas hidup, IKU, IK, IKL, serta DTBP. Ini kan data-data yang memang harus dikonkritkan, disesuaikan dengan program-program yang dilakukan. Dimana saat ini kita tahu bahwa DAS ini kan cukup signifikan ya dampak pencemaran limbah di wilayah-wilayah dari sisi limbah industri serta yang lainnya. Akan tetapi pemanfaatan programnya ini belum begitu dirasakan.

Nah kaitan dengan PSKSAL, program yang sangat positif dimana program Bank Pesona ini cukup luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan di tahun berikutnya.

Nah terakhir, tentu kami juga meminta adanya keseimbangan antara solusi terhadap pemulihan ekonomi dari nilai sisi lingkungan hidup serta kehutanan, akan tetapi bagaimana menyeimbangkan antara kegiatan yang berdampak untuk bisa memberikan solusi terhadap sisi ekonomi tapi tidak meninggalkan dari sisi ekologis kerusakan air, hutan dan lain sebagainya. Ini seperti konsep yang dibangun.

Yang terakhir, kami minta juga bahwa di daerah ini tadi disampaikan oleh Pak Ketua juga DAK ini cukup dibutuhkan di daerah karena minim yang digelontorkan anggaran di Dinas Kehutanan Daerah ini tentu butuh perhatian lebih, baik itu yang digulirkan dana reboisasi atau pun pembangunan fisik yang lainnya.

Terima kasih.

*Billauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih.

Di Banten kita punya Ujung Kulon. Itu benteng pertahanannya sunda. Dari Ujung Kulon kita juga pergi ke Pulau Komodo.

Dipersilakan Ibu.

F-NasDem (JULIE SUTRISNO):

Baik Pimpinan. Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman di Komisi IV,
Yang saya hormati Ibu Menteri, para Dirjen dan jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Indonesia sangat kaya akan alam dan budaya termasuk saya lebih ringan, tidak berat seperti Aceh, NTT (Nusa Tenggara Timur). Kebetulan program Pak Gubernur itu adalah *Prime Mover* Beliau programnya adalah pariwisata, dan sebelum Covid Pak Presiden menyebut bahwa kita NTT termasuk ke destinasi wisata prioritas. Saya memohon Ibu Menteri karena mempunyai lahan kehutanan yang bisa mendukung pariwisata sehingga saya minta Ibu Menteri bisa mendukung penuh suami saya tercinta Pak Gubernur, serta Nusa Tenggara Timur.

Untuk kami. Saya kebetulan adalah Ketua DEKRANASDA Provinsi NTT. Kami mempunyai program yang adalah menuju Eco Wisata dan Agro Wisata, contohnya kami tenun yang setiap hari saya pakai. Kami mempunyai budaya ini yang sangat luar biasa. Jaman dulu itu tenun itu dibuatnya kalau aslinya itu adalah dari kapas. Tapi kami punya pohon kapas sudah hampir punah sekali di Nusa Tenggara Timur. Saya bermimpi bisa berkolaborasi dengan Ibu, mohon dukungannya untuk DEKRANASDA bisa menjadikan itu pariwisata seperti ada pohonnya. Ada wilayah yang pohonnya itu kita bisa petik, turis bisa petik kapas, terus bisa belajar kintal benang, dan sampai dengan tenunnya itu jadi seperti apa dan ada tokonya yang bisa dia bawa cendermatanya pulang. Salah satu contoh lagi adalah kakao, coklat. Kalau ke Luar Negeri saya iri sekali pabrik Hershey. Yang mana kita melihat dia proses pembuatan coklat, terus habis itu pulangnyanya dengan kita punya belanjaan 2 koper coklat kita, sedangkan termasuk di NTT kakao kita itu juga sangat luar biasa kualitasnya. Dan untuk info di Ibu bahwa kami ada pengusaha muda milenial dari NTT, coklat Sumba yang kami dapat penghargaan di Paris waktu tahun lalu. Jadinya saya ingin DEKRANASDA ini membantu Pemerintah untuk bisa tanya supaya orang datang enjoy the alam, tetapi pulang juga ada ekonomi yang mereka belanja ditinggalkan untuk masyarakat, seperti itu.

Dan mungkin yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih. Ibu Menteri dengan Dirjen kita Ibu yang sudah membantu kami di Laboan Bajo bangun LP3 ya. Karena Laboan Bajo adalah paling ujung mengingat kami NTT Bu Menteri adalah Kepulauan. Dan kalau dari ujung Laboan Bajo limbahnya itu saya rasa transportnya saja sudah lebih mahal kalau untuk sampai sana. Saya minta untuk paling tidak berkenan bertahap mungkin Ibu. Mungkin paling tidak tahun depan 1 lagi yang bisa dibantu ditengah-tengah Flores, mungkin Sika atau Ende, dan juga di Sumba karena itu beda 4 sumba bisa jadi satu. Itu yang saya titipkan untuk NTT.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih ya.

Kita berusaha untuk mempertahankan Laboan Bajo, bukan hanya sekedar wisata tetapi menjaga ekosistem kelautan termasuk Pulau Komodo. Nah dari Pulau Komodo kita bergeser ke daerah yang kuat akan budayanya, budaya pertanian, budaya kehutanan walaupun tanahnya agak tandus dan suhu udaranya panas, dan ini adalah petani yang milenial tapi kelahiran tahun '60.

Dipersilakan Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan, Ibu Menteri, Bapak Dirjen, semuanya yang hadir, Pak Wamen juga, dan sahabat-sahabat Komisi IV.

Selamat pagi, dan sehat Bu ya. Dan saya tunggu di Kabupaten Karanganyar minggu ini.

Terima kasih.

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yang pertama tadi Ibu sudah menyampaikan juga laporan yang terkait dengan soal *illegal logging* ya Bu ya. Dari tahun ke tahun ini memang sudah menjadi isu internasional. *Illegal logging* Indonesia sudah jadi banyak sekali karya disertasi bahkan yang mengambil kasus di *illegal logging* ini. Nah yang ingin saya sampaikan sebenarnya, yang terkait dengan regulasi ini Bu. Bahwa yang terkait dengan *illegal logging* ini di Indonesia sudah menerapkan satu sistem untuk verifikasi yang menjamin bahwa kayu yang digunakan oleh berbagai industri adalah kayu yang legal, dan juga dari hutan yang terkelola secara berkelanjutan. Kalau instrument ini mungkin disini disebutnya yang SVLK itu ya, semacam itu. Jadi sistem verifikasi legalitas kayu. Nah hanya saja ada yang mengejutkan saya Ibu Menteri, bahwa pada tanggal 27 Februari di tahun ini ada Peraturan Mendag Nomor 15 Tahun 2020 yang mana ketentuan ini mengatur tentang ketentuan ekspor produk industri perhutanan dan kemudian ini dihapuskan. (Tidak dihapuskan, oke.) Nanti kita minta tanggapan dari Bapak.

Kemudian disisi lain bahwa Indonesia dan juga Uni Eropa sudah menandatangani semacam *Agreement Forest Law Enforcement And Governance Voluntary Partners Agreement*, yang mana kalau dilihat dari Agreement ini juga dianggap Permendag itu kita dianggap punya potensi melanggar perjanjian itu karena adanya alasan apakah itu relaksasi ataukah itu. Nanti mohon penjelasannya. Disisi lain Permendag ini juga dianggap tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan Bab VII Pasal 64 sampai 73. Nah yang menjadi pertanyaan saya dari Kementerian ini, apakah Ibu masih tahu tentang hal ini. Kalau memang itu benar seperti yang disampaikan oleh teman-teman para pegiat sebenarnya lingkungan hidup, apakah Ibu tidak protes, apakah Ibu menjadi bagian dari yang sering kali kita dengar di Komisi ini adalah rapat koordinasi bersama antar Kementerian. Nah apakah Permendag ini juga lahir dari Rapat Koordinasi yang melibatkan Kementerian LHK, tetapi tentu saja ini kita sayangkan kalau memang ini terjadi. Dan ini juga satu hal yang membuat

catatan kita bahwa lingkungan hidup belum menjadi satu komitmen yang selaras antar Kementerian dan juga Kelembagaan.

Nah yang terkait dengan satwa liar Bapak. Di Tahun 2019, memang ini tahun kemarin tetapi karena ini masih menjadi isu terutama ini di Dapil saya. Di Gunung Lawu itu ternyata ditemukan macan tutul. Kemudian macan tutul ini ditemukannya karena diperangkap, ditemukan dalam kondisi sehat, hidup. Kemudian sama BKSDA dititipkan di kebun binatang Karanganyar Solo itu tapi kemudian disitu mati. Nah itu kemarin ketika saya disana ditanyain, apakah hasil investigasi itu sudah ada penyebab kematiannya, apakah karena sakit, atau karena apa, dan seterusnya karena kemudian memang kita tidak mendengar lagi penjelasan itu.

Nah beberapa minggu yang lalu juga saya laporkan kepada Pak Dirjen bahwa di Lawu ini ternyata masih ada macan tutul, bahkan dimungkinkan semacam kayak harimau tetapi ini masih perlu dicek ya Bu. Karena yang macan tutul itu ditemukannya melalui kamera yang sangat jadul. Kamera jadul saja sudah bisa memotret, apalagi kalau dapat dukungan dan bantuan dari Ibu sehingga alatnya lebih canggih, sehingga ini bisa dimonitor lebih baik. Nah kalau yang terkait dengan macan besar itu dilihat dari jejak kaki yang tidak bisa diluar ukuran macan tutul dan kemudian bentuk rebahan. Jadi ada jejak rebahan dari binatang yang ukurannya ini sih bisa pantas disebut seperti kayak harimau itu. Nah saya kira ini perlu untuk di *follow up* dan juga mohon dukungan. Jadi kalau Ibu nanti ke Karanganyar kebetulan, karena lokasinya itu juga ada di Gunung Lawu.

Nah kemudian yang terkait tadi saya suka sekali mendapat laporan dari Ibu bahwa Bengawan Solo itu statusnya masih terpenuhi unsur sehatnya ya Pak ya. Nah ini kan tidak terlepas dari dukungan dari masyarakat disekitar Bengawan Solo atau yang di aliri oleh Bengawan Solo. Oleh karena itu mungkin perlu untuk didukung bagaimana kondisi ini bisa tetap terjaga sehingga masyarakat disana justru harus diberdayakan, di edukasi, terus kemudian didampingi, dan juga mendapatkan manfaat dari adanya Bengawan Solo yang statusnya masih relatif sehat. Justru bukan kemudian terbiarkan, baik itu manfaat secara ekonomi, manfaat dari sisi lingkungan hidup dan seterusnya. Termasuk bisa menggerakkan kelompok-kelompok rumah tangga yang ada disana, kelompok-kelompok perempuan, kemudian juga kelompok-kelompok muda dan seterusnya.

Nah yang keempat terkait dengan rehabilitasi Waduk Wonogiri. Dulu Ibu pernah minta dukungan kepada kita baik itu anggaran atau pun politiiik dan kita mengatakan kita siap untuk mendukung, dan kemudian sekarang kita mendapatkan musibah Covid. Nah apakah rencana rehabilitasi besar Waduk Wonogiri ini masih akan tetap menjadi prioritas di 2021, dan saya harap sih iya karena memang sedimentasi di Waduk Wonogiri ini sudah tidak terkira ya Bu ya, sudah jutaan ton kubik dan itu sudah sangat tidak sehat juga untuk perikanan disana. Hanya saja yang saya inginkan bahwa perencanaannya mohon untuk melibatkan dan mendengar aspirasi masyarakat di Wonogiri. Jangan ditinggalkan lagi sebagaimana pada saat Waduk Wonogiri dulu dibangun. Ada sekian ribu orang yang harus dipaksa untuk bedol Kecamatan,

bukan hanya Desa karena melibatkan sekian jumlah Kecamatan, dan mereka harus ikut transmigrasi. Tetapi kemudian masyarakat di Selatan Wonogiri terutama mereka mengaku tidak mendapatkan terlalu banyak manfaat terutama hak air atas Waduk Wonogiri. Jadi Ibu mohon ini dipimpin. Kalau memang rehabilitasi ini di mana manfaat lingkungannya kemudian dapat tetapi hak airnya juga dapat dan kemudian pertanian disana juga bisa mendapatkan dukungan dari adanya rehabilitasi ini.

Saya kira itu Ibu yang terakhir. Sukses dan ikut bangga atas kerja-kerja luar biasa dan penghargaan yang diterima dari Pemerintah Norwegia.

*Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Tadinya nyangkut-nyangkut ngomongin harimau. Bagi orang sunda harimau itu sebuah prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang kuat. Dan saya ingat betul dulu waktu Pak Menteri Kehutanannya Pak Zulkifli itu menyampaikan harimau. Saya tidak mau menyebut harimau Jawa, harimau Sunda sudah tidak ada, tetapi setelah saya berkeliling ke berbagai tempat ternyata masih ada Bu di daerah Bandung, Kabupaten Bandung dekat kawah putih itu masih sangat banyak dan rata-rata banyak yang mati karena makan kambing yang diracun petani. Nah mohon barangkali mendapat perhatian. Di Ciamis kemarin juga masih ada, di daerah Subang Selatan juga masih ada. Sisa-sisa yang ada ini mohon dijaga harimaunya sebelum nanti harimaunya pergi ke Luar Negeri untuk jadi TKI.

Selanjutnya kita ke Pak Sulaeman Hamzah.

Dipersilakan. Ini pasti juga punya hutan. Pokoknya setiap Anggota menyampaikan sebelum prolog penyampaian isi sampaikan kekayaan alam didaerahnya yang perlu dipertahankan agar menjadi catatan penting.

Terima kasih.

F-NasDem (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Baik. Terima kasih Pimpinan.

Pak Ketua dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Ibu Menteri para Eselon I dan II, dan para mitra yang saya hormati.

Pertama saya menyampaikan apresiasi "Selamat" untuk Bu Menteri yang sukses menjaga kawasan hutan sampai berhasil mendapatkan penghargaan dari Norwegia. Itu juga sukses menangani kebakaran hutan yang terjaga dari waktu ke waktu sebagaimana tadi penjelasannya, saya ikuti

dengan seksama luar biasa. Mudah-mudahan kita akan berubah total, tidak mengalami lagi asap seperti tahun-tahun sebelumnya.

Yang kedua Bu Menteri saya mau sampaikan di Papua ini di Kabupaten Asmat. Kotanya itu berada dalam kawasan hutan. Dan itu diproses sudah dari Tahun 2017 kalau tidak salah sampai hari ini belum selesai untuk bisa memutihkan paling tidak karena selalu ada masalah disana. Seluruh masyarakat yang ada di Kota itu tinggal. Kalau saya bilang mereka tidak punya tanah air. Mereka tinggal diatas tanah berawa, kemudian airnya tadah hujan, praktis mereka itu tidak punya tanah air disitu. Tersiksa sebetulnya tetapi karena kawasan itu belum dilepas sehingga statusnya masih seperti itu masih dalam kawasan hutan. Barangkali dari Planologi bisa menelusuri. Prosesnya sampai dimana sampai kandas, dan belum tahu apakah di Provinsi atautkah di Pusat sini belum ada kelanjutannya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ada usulan kemarin di kawasan hutan di Wasur. Kawasan hutan Wasur ini ada pengrajin disana yang sudah melakukan penyulingan minyak kayu putih. Yang pada rapat yang lalu saya sudah titipkan proposal dari masyarakat untuk bisa diperhatikan, karena ini mereka hidupnya sehari-hari itu mencari kayu bakar dan menyuling minyak kayu putih. Barangkali ada penugasan atau kepada petugas yang ada di daerah bisa menelusuri itu untuk kebenarannya, dan kemudian bisa ada program bisa membantu mereka disana.

Kemudian ada sekelompok, beberapa kelompok masyarakat Bu Menteri itu mendapat pemberian tanah adat yang kemudian jadi masalah. Ceritanya begini, tanah adat itu diberikan oleh masyarakat adat kepada sekelompok masyarakat dan pada waktu penyerahannya disaksikan juga oleh Pemerintah. Tapi belakangan diketahui bahwa hutan yang diserahkan itu adalah kawasan hutan. Hutan lindung disitu sehingga akhirnya distop tapi masyarakat sudah terlanjur masuk disana. Nah ini mungkin bisa diatasi dengan program perhutanan sosial. Di Daerah Jayapura dekat perkebunan Sinar Mas itu. Nah itu ada perkampungan disitu, kemudian meminta masyarakat dari luar untuk bisa masuk ikut membangun daerahnya. Barangkali ini juga bisa ditelusuri disana. Karena ini kita tentu mengharapkan kawasan hutan ini tidak boleh diganggu, tetapi ketika ada pemberian karena masyarakat adat merasa punya lalu itu menjadi masalah lalu ternyata pemberian itu Pemda juga sama sekali tidak mengetahui barangkali. Nah ini barangkali diikuti oleh sosialisasi. Sosialisasi diperluas karena ternyata memang tidak semua orang memahami bahwa hutan itu sudah di patok fungsinya.

Kemudian masih ada persoalan juga di perkebunan sawit di Daerah. Kewajiban perusahaan perkebunan itu 20% itu ternyata dia tidak ambil dari lahan HGU-nya, itu diambil dari lahan usaha 2 dari transmigrasi dan diluar HGU. Nah ini kan sebetulnya akal-akalan dari perusahaan yang barangkali ini perlu juga ada tindakan tegas, apakah pintunya dari sini atautkah dari pertanian, Dirjen Perkebunan. Tapi kawasan hutannya yang saya persoalkan

disini yang dibuka dari lokasi itu yang sama sekali tidak ada identitasnya yang jelas. Nah itu perlu ada penanganan yang serius.

Saya kira itu Bu Menteri beberapa hal yang saya sampaikan. Dan terkait dengan Asmat tadi mungkin bisa diseriusi Bu karena dari waktu ke waktu ini menjadi masalah disana.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Ya dari Papua kita kembali lagi ke Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat kembali Pulau Komodo.

Ada Pak Ansy Lema? Ada. Nanti tambah lagi Pulau Buaya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan, Kang Dedi.

Bapak/Ibu Anggota Komisi IV yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat siang, dan Salam Sejahtera.

Ibu Menteri, Pak Sekjen dan jajaran KLHK yang juga saya hormati.

Yang pertama Bu Menteri, saya memberikan apresiasi program Bank Pesona itu, itu sudah sampai di NTT dan memang saya arahkan di Selatan Indonesia Bu, itu di Pulau Rote Bu. Nah Bupati di Pulau Rote itu perempuan juga, dari Partainya Ibu juga. Dan saya ingat pesan Pak Jokowi, wilayah-wilayah perbatasan beranda depan Indonesia itu harus dibantu, dan KLHK tangannya sudah sampai disana Bu. Terima kasih.

Yang kedua Bu Vivien, ini masih ditunggu nih bantuannya Bu. Kita sudah memberikan bantuan secara simbolis. Rumah Sakit St. Yohanes itu menanyakan Pak Ansi kapan? Tenang saja, percaya Bu Vivin pasti akan penuh, Bu Menteri akan penuh.

Yang berikut, saya kemarin mendapatkan video Bu Menteri dikirim oleh seorang pegiat Lingkungan Hidup di sekitar Taman Nasional Komodo. Video itu merekam kondisi komodo kita yang kekurangan makanan, dan kemudian kurus bahkan turun sampai kepada ke pemukiman warga dan kemudian memangsa ternak-ternak warga. Nah ini kondisi pandemi ini membuat akhirnya komodo kita itu mungkin juga mengalami hal yang memprihatinkan ini. Karena itu saya ingin tanya juga minta penjelasan ke Ibu, *New Normal* di

sector pariwisata terkait dengan KLHK ini seperti apa Bu, dan kita juga minta untuk kalau boleh komodo ini diperhatikan lagi.

Yang terakhir beberapa hari lalu Ibu, saya dan beberapa rekan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menerima diaspora warga Manggarai Nusa Tenggara Timur yang datang di DPR ini mengadukan tentang rencana tambang batu gamping dan pabrik semen di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka datang menyampaikan keberatan mereka karena menurut mereka wilayah pertambangan ataupun rencana pabrik semen yang mau dibangun disana itu berada di kawasan karst Bu. Mereka menyampaikan kepada Fraksi PDI-Perjuangan, mereka sudah menandatangani KLHK berdiskusi dengan pihak terkait di KLHK bahkan juga dengan Kementerian ESDM. KLHK dalam kasus ini memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi AMDAL. Penolakan masyarakat karena menurut mereka wilayah ini merupakan wilayah bentangan alam karst, dan ketika bicara karst itu adalah wilayah konservasi yang tidak bisa diganggu-gugat Bu. Karena itu point saya adalah saya mendorong KLHK untuk tidak terlalu cepat mengeluarkan rekomendasi AMDAL sebelum ada study atau pun kajian akademik yang dilakukan oleh Badan Geologi di Kementerian ESDM Bu. Karena terus terang, Manggarai Timur ini di wilayah Pantai Utara itu tidak jauh-jauh amat dengan Riung, ada taman nasional disana Bu, tidak jauh-jauh amat dengan Taman Nasional Komodo. Ini merupakan suatu wilayah kesatuan terintegrasi dari pariwisata di Nusa Tenggara Timur Bu. Kami sangat mendukung program dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meletakkan pariwisata sebagai *Prime Mover* penggerak dari pembangunan di Nusa Tenggara Timur, dan kami memberikan catatan pariwisata itu ya kita bicara soal konservasi. Sementara ya kalau pertambangan ya berarti eksploitasi dan eksplorasi. Nah karena itu juga saya ingin mendapatkan gambaran Bu, penjelasan kira-kira terkait dengan bentangan karst ini seperti apa, dan apakah memang Ibu juga sudah mendengar hal ini karena kemarin mereka tidak bertemu dengan Ibu. Ini beberapa hal yang mau saya sampaikan.

Saya kembalikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih.

Mudah-mudahan selepas dari ini komodo yang kurusnya itu kembali menjadi gemuk karena ada suntikan anggaran.

Selanjutnya ada sastrawan kita. Kalau dulu sastrawannya Rosihan Anwar, ini Pak Johan Rosihan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati para Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Bu Menteri beserta seluruh jajarannya,

Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bu Menteri seperti Pak Ansilema tadi itu Bang Pesona sudah sampai di Sumbawa dan kemarin kami sudah melaksanakan juga penanaman pohon dari pembagian bibit kebun rakyat itu Bu Menteri. Terima kasih.

Menyambut apa yang disarankan oleh Pimpinan Kang Dedi, saya ingin menyampaikan beberapa potensi di Pulau Sumbawa yang saat ini sudah masuk dalam kondisi lahannya kritis. Kami di Pulau Sumbawa Bu Menteri tidak mau kalah sama Aceh. Kalau Aceh itu 3 Anggota DPR-nya disini, kalau Pulau Sumbawa itu 2 dari 3 kursinya itu ada disini Bu. Jadi 60% lebih Pulau Sumbawa ini saya sama Bang Rudi dari Pulau Sumbawa. Jadi 2 dari 3 kursi Bu ada di Komisi IV ini. Nah ini sebagai sebuah pesan yang harus ditangkap bahwa kita konsen di soal kehutanan ini. Ada lahan kemiri di Parado Bima Bu, sudah banyak dikonversi ke komoditas lain. Kami ingin supaya kejayaan kemiri di Parado ini harus bisa kita kembalikan. Ada juga potensi kayu Gaharu dan Ulin di Desa Mata dan Tolok Uyi Sumbawa. Ada potensi kayu manis Daerah Lantung dan Ropang di Sumbawa mesti diseriuisi sampai level industri, kemiri di Batu Dulang, Tepal, Orong Telu, banyak kopi juga disini. Potensi kemiri di Pulau Sumbawa itu ada di 6400 hektar dengan produksi 22.400 ton per tahun. Tapi ini sudah masuk lahan kritis ini. Saya dulu ketika di DPRD Provinsi, saya kebetulan Ketua Pansus penyusunan perlindungan hutan Bu. Di Parado itu masih ada awik-awik istilah masyarakat disana itu bahwa tidak boleh memotong pohon, mereka hanya boleh mengambil buah yang jatuh di parado. Tapi saat ini mereka sudah tidak menggunakan itu, nah lahannya juga sudah kritis karenanya mungkin perlu mendapat perhatian. Karenanya saran kami program-program terkait rehabilitasi hutan dan lahan, baik sipil teknis dan pengendali rehabilitasi vegetative KBR, ..., produkti dan lain-lain mungkin skalanya bisa diitingkatkan untuk di Pulau Sumbawa.

Berikutnya terkait dengan Perhutanan Sosial. Saran kami supaya tidak hanya mengejar luasan, perluasan ijin sesuai dengan target. Tetapi perlu juga di support masyarakat di sekitar hutan itu masyarakat Hutan Adat, masyarakat Hutan Desa, HKM, segala macam itu dengan bentuk support anggaran, baik dalam hal penguatan kelembagaan maupun kelola kawasannya.

Ibu Menteri,

Berikutnya saya ketika Covid kemarin sempat jalan-jalan, namanya di Desa Pancasila Bu, Kecamatan Pekat di Dompu. Nah itu adalah pintu masuk orang mendaki ke Rinjani tapi mereka tidak punya air minum Bu. Sumber airnya ada di dalam hutan. Nah ini kan kalau misalnya dana desanya mau dipakai itu tidak bisa, tapi kalau misalnya dari KLHK yang memberikan fasilitas berupa penampungan air dan lain sebagainya saya pikir ini lebih tepat dan lebih cepat sehingga masyarakat Desa Pancasila namanya Bu. Ini mungkin perlu juga dibuat monumen disana, karena ini menjadi pembicaraan masyarakat soal Pancasila ini bahwa di NTB ada namanya Desa Pancasila.

Perlu diberikan perhatian khusus terutama pengadaan air bersih. Disitu juga ada potensi kopi Bu. Di Pulau Sumbawa itu ada Daerah di Bima ada potensi kopinya, di Dompu juga ada kopi Tambora dua-duanya juga Tambora namanya, di Sumbawa ada kopi Tepal dan sebagainya. Karenanya apa yang diminta kalau misalnya ada itu yang disampaikan oleh Bu Endang tadi mungkin juga bisa ada 1-2 paketlah untuk di Pulau Sumbawa tentang pengelolaan kopi itu.

Nah berikutnya juga Ibu, kami juga soal industrialisasi skala kelompok tani hutan baik hasil hutan maupun hasil hutan bukan kayu mungkin segera bisa diimplementasikan. Saya lihat di anggarannya tadi itu dihalaman 77, itu realisasinya masih sangat rendah. Terdapat 32 volume bantuan, dia dibagi dengan pagu anggaran baru sekitar 1,6% realisasinya Bu walaupun tertulis di Ibu itu adalah 16,5 tapi setelah saya hitung bukan 16,5 baru 1,6% saja dari anggaran yang tersedia Rp178 Miliar tapi realisasinya baru Rp2,8 Miliar. Bisa dilihat dihalaman 79 Ibu program pembangunan ekonomi produktif. Nah ini kalau kemudian bisa segera dilaksanakan apalagi bisa menggunakan data berbasis Dapil, nah ini penyebarannya tentu akan lebih cepat.

Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan.

Oh terakhir Bu, kemarin saya sudah sampaikan di Kementerian Pertanian. Saya juga sudah cerita disini, saya ada berkunjung di suatu sungai, ada embung disitu Bu. Itu setahun itu 4 kali mereka melakukan rehab dan mereka tidak menggunakan alat bangunan Bu, semen, segala macam, batu, tidak. Tapi yang mereka gunakan adalah kayu. Satu kali rehab itu 4 kubik. Setahun mereka rehab 4 kali Bu. Berarti kan sudah 16 kubik setahun, rusak hutan kita. Alhamdulillah Ibu, saya sudah bertemu dengan Kepala KPH-nya. Disitu kami punya komitmen, *Insyallah* kami akan menjaga DAS-nya. Dan kemudian disitu ada 1 budaya yang namanya Olat Ojong. Itu kita ingin menanam kayu-kayu khusus karena kekayaan budaya itu Kang Dedi adalah minyak Sumbawa yang pembuatannya sering menggunakan istilah Festival Muharram, dan minyaknya berkaitan dengan laki-laki ini Pak Ketua. Nah karenanya dengan KPH ini, saya dengan KPH Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya ingin nanya dulu, itu minyak sebelumnya minum susu kuda liar dulu tidak?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Nanti setelah ini kita ngomong Pak Ketua.

Saya sepakat dengan teman-teman beserta KPH-nya, kita ingin membuat hutan itu khusus untuk kayu-kayu yang dibutuhkan oleh para pembuat minyak ini. Nah karenanya untuk ini Bu Menteri, mohon dukungannya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih.

Nah kita pergi lagi ke Daerah yang sebenarnya habitat awalnya itu sebagai daerah yang cukup kuat sebagai tempat persinggahan Raja Padjajaran, dan hari ini rusak gunungnya, lautnya, diangkat pasirnya. Dan ini satu-satunya Anggota DPR yang sering memperjuangkan tapi belum berhasil sampai hari ini.

Dipersilakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Sampurasun.

Terima kasih Ketua.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,
Ibu Menteri beserta seluruh jajaran, Pejabat KLHK yang hadir, teman-teman tamu undangan, pers yang juga hadir.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Ketua, ingin kami sampaikan beberapa hal. Tentunya pertama, kita ikut bangga kinerja Ibu Menteri banyak penghargaan walaupun ditengah-tengah kebahagiaan itu kami ingin menyampaikan banyak duka yang ada dalam kenyataan.

Ibu Menteri,

Jika memang hal-hal yang krusial dan tidak bisa selesai. Saya sarankan, saya rekomendasikan Ibu ganti pasukan Ibu. Saya yakin pasukan Ibu lebih tahu masalah daripada saya. Mungkin saya tidak punya *basic* kehutanan tapi saya orang dari pinggiran hutan. Yang tahu dan memahami bagaimana nyamannya hutan dan bagaimana dan apa pentingnya air dan hutan. Mungkin Ibu karena tinggal di tembok-tembok besar dan beton-beton kuat berani mengizinkan surat-surat yang penting yang itu merusak kehidupan ekosistem kita, dan ini kenyataan. Contoh kondisi yang ada di Cikurai sebetulnya ini saya amati lama. Daerah Garut itu Mandala Giri, ada Papandayan, ada Cikuray. Dan tingkat kerusakan hutannya sudah sangat berat, dan ditengah-tengah dan di puncak-puncak gunung itu adalah banyaknya mulsa karena ada tanaman horti disana. Dan ini jaman Ibu Siti Nurbaya, Menteri Kehutanannya. Dan Bupati temannya Pak Ketua Dedi Mulyadi, teman jauh Pak Ketua. Saya ingin sampaikan betapa tidak mereka melakukan sebuah proses kepentingan daerah atas nama kepentingan daerah, mereka melakukan pembebasan lahan atau penggunaan lahan tanpa prosedur tanpa ijin. Bukankah 1 tegakkan pohon pun dilindungi oleh Undang-Undang. Jangankan ratusan, ribuan atau 1 tegakan pohon pun dilindungi oleh

Undang-Undang. Di Garut ada kasus yang sangat besar, dan tentu kita mendengar pada 3 bulan yang lalu banjir di 4 Kecamatan yang berakibat dari serapan air di gunung-gunung itu tentu sudah berkurang. Saya tahu KLHK turun, Pak Gakkum turun tapi memang belum menjadi langkah yang disikapi tegas dan berhentilah pekerjaan yang melanggar hukum. Saya setuju jalan itu dibangun, poros tengah Cilawu Banjarwangi. Karena sejarahnya Ketua, Pak Dedi lebih tahu itu dulu adalah sejarah jalan Desa yang pernah ada, tapi kenapa jalan itu harus berbelit ke puncak bukit, ke puncak gunung karena disana ada akses lahan yang dibuka "itu adalah milik para Pejabat". Saya minta biarkan jalan ada tapi pada jalan yang benarnya. Disana juga ada Daerah Kabuyutan. Ini urusan Kang Dedi nih yang lebih piawai. Jadi itulah Kabuyutan Prabu Darma Siksa Raja Sunda Galuh yang melahirkan ajaran Siksa Kandang Karsiah. Dan itu warisan budaya yang luhur yang tak kita miliki, dan mereka juga adalah leluhur baik Majapahit sampai Sriwijaya. Jadi kalau kita mau bersikap baik dan jujur, kenapa mereka masih berlanjut, kenapa mereka tidak takut. Saya ingin tanya kepada Bu Menteri, apa kewenangan yang diberikan kepada Perhutani sampai Perhutani sudah merilis ini belum ada prosedurnya, ini belum ada surat ijinnya, kenapa belum bisa berbuat? Apa Perhutani di kerangkeng oleh KLHK? Saya minta kepada Dirjen Planologi. Ini terakhir nanti ijin di Planologi. Kalau masih memberikan ijin, ini ada masalah di lingkungan Ibu Menteri. Saya rekomendasikan ganti Pejabat Eselon I Bu, daripada 3 gunung dikorbankan. Daripada gunung-gunung dikorbankan, daripada hutan-hutan dikorbankan, tidak ada satupun hutan yang sudah dieksploitasi kembali menjadi hutan. Dan itulah kerusakan kita. Ini kedukaan negeri kita Bu. Ini adalah tentu harus menjadi perhatian yang sangat serius dari kita semua.

Yang kedua Ibu Menteri, secara filosofis. Ini kan tadi masalah. Ini masalah filosofisnya mengingatkan. Air itu adalah sumber kehidupan kita, dan air ada dalam batang-batang pohon, dalam akar-akar pohon, dalam rimbunan dedaunan pohon-pohon hutan kita. Kalau itu hilang apa yang akan kita terima, kalau itu hilang pernahkah kita pikirkan apa yang akan kita wariskan untuk anak-cucu kita kedepan.

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan Pak Sudin tidak menginterupsi Bahasa saya, tidak menghentikan kata-kata saya. Dan itulah kebijaksanaan Ketua, Bapak Sudin.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sebetulnya Pak Sudin itu sudah suruh stop dari tadi. Cuma karena ini ceritanya cerita hutan di Jabar, jadi saya bertahan untuk menjagain Bapak. Dan saya sampaikan ke Ibu, pada jaman Pak Menteri Anulah (tidak usah

disebutin) Jabar itu mengalami perubahan banyak Bu. Papandayan misalnya gunung-gunungnya diubah kemudian menjadi areal pariwisata, banyak berdiri *cottage*, segala macamlah yang akhirnya terjadi banjir. Termasuk Tangkuban Perahu Bu, itu diacak-acak juga. Ya mudah-mudahanlah, dan bisa tidak itu dikembalikan kembali ke asalnya. Kalau saya itu saja.

Selanjutnya, nah ini kalau dibidang hutan ini embahnya dari gajah tua, harimau tua, Bapak Eyang Darori.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Teman-teman Anggota yang kami hormati,
Ibu Menteri dan para Eselon I,

Saya akan beri masukan Bu Menteri bahwa berdasarkan Rapat dari Baleg dengan Pemerintah yaitu Menteri Kumham Undang-Undang 41 Tahun '99 didrop sebagai pembahasan di Tahun 2020 Bu Menteri. Nah sebetulnya karena ini didrop harapan kita selama ini Rapat di Komisi IV akan sirna antara lain, apa yang disampaikan bahwa Undang-Undang 41 itu adalah perpanjangan dari Undang-Undang 5 Tahun '67 yang bobotnya masih dibidang perusahaan hutan. Jadi kalau dikelompokkan masih bobotnya dibidang politik dan ekonomi, sedang dibidang lingkungan kerakyatan dan tanah adat atau masyarakat itu belum. Tadi Bu Menteri sampaikan, tanah adat itu bisa diberikan sepanjang ada Peraturan Daerah, ini menghambat. Nah harapan saya di Undang-Undang 41 cukup Surat Keputusan Menteri, tapi kita tidak bisa berbuat karena Undang-Undangnya kita drop.

Yang kedua mengenai masalah kompensasi dengan adanya Otonomi Daerah Bu Menteri. Ini hubungan hirarki antara hilir dan hulu tidak ada, contohnya DKI Ciliwung. DKI 15 tahun yang lalu saya sarankan "mbok yo DKI nyumbang ke Jawa Barat 1 Triliun untuk nanam pohon di DAS-nya Bogor. Tidak mau, malah airnya jangan dikirim-kirim ke saya. Coba kalau 15 tahun yang lalu 1 Triliun tiap tahun. Nah ini saya mengingatkan Bu, mungkin dalam Undang-Undang 41 juga dicantumkan. Bahkan saya berpikir Bu bagaimana KPH itu bagaimana kita kembangkan menjadi 1 Daerah Aliran Sungai Bu, bukan ikut administrasi. Jadi biar hulu-hilir bisa ditangani.

Yang kedua, teman-teman telah protes orang nyuri kayu 1 batang dihukum. Nah itu Undang-Undangnya, maka sebetulnya Undang-Undang 41 kita akan mengubah bagaimana kalau mencuri 1 batang cukup diperingati atau 1 bulan hukumannya, tidak disamakan dengan yang 1 kontainer itu hukumannya 15 tahun. Sama juga dengan kebakaran hutan juga begitu Bu. Kebakaran hutan siapa pun yang membakar dikawasan hutan secara sengaja itu 15 tahun. Ya kalau rakyat hanya membakar ladang kena 15 tahun kan tidak benar, Yang korporasi sebetulnya. Nah ini Undang-Undang ini mestinya Pak Ketua untuk didorong lagi masuk ke Prolegnas Tahun 2001. Kalau ini tidak bisa ya repot.

Yang ketiga, Taman Nasional. Ini pemikiran saya, Taman Nasional itu banyak daerah-daerah hampir 70% wilayahnya Taman Nasional. Bagaimana Pemerintah dari kantong kiri, kantong kanan memberikan PBB Taman Nasional. Jadi Kabupatennya yang ada Taman Nasionalnya bisa bangun. Selama ini kan menjaga hutan saja. Jadi di protes. Bahkan sering Taman Nasional yang di hulunya itu mengubah fungsinya, sengaja dibebaskan. Karena tidak bisa bangun. Jadi mungkin pemikiran ini tolong dikaji, bayar PBB untuk bantu Daerah, DAK misalnya tinggal bentuk DAK tapi PBB kawasan konservasi.

Dan selanjutnya juga kami sampaikan kepada Ibu mengenai Perhutani ini. Ini tadi disampaikan oleh Pak Haerudin, tolong Dirut dikaji betul para KPH suruh ekpose apa masalahnya. Ya kalau teknis sampaikan kepada Bu Menteri, kalau masalah dukungan politik bisa ke Komisi IV DPR RI. Karena di Perum ini kita 1 bulan itu minimal membayar gaji Rp150 Miliar. Yang dipaksakan itu eksploitasi Bu, sedangkan eksploitasi terbatas. Bagaimana caranya mengatasi? Siapa pun Dirutnya kalau tidak ada perubahan kasihan. Akhirnya memaksakan menebang, KU3 sudah ditebang. Yang harusnya umur 50 tahun terpaksa 30 dengan alasan lingkaran tahunnya sudah 2 senti, tidak 1 senti. Itu ilmu pun tidak tahu saya baru, selama kuliah 1 tahun 1 lingkaran jati ya 1 senti. Tapi katanya sekarang ada ilmu baru sampai 3 senti, apa betul Pak Sekjen sebagai komitnya itu ya.

Yang terakhir juga saya minta mengenai, sekarang banyak diskusi Bu ya. Diskusi diluar mantan-mantan yang kita kayanya tidak paham. Bahkan ada temuan bahwa kita kehutanan gagal, tidak serius, setengah hati ini, Pak Laode. Tolong kalau ada seperti ini teman-teman ada yang ikut masuk, dia memberi contoh Taman Nasional Tesso Nilo Bu. Tesso Nilo hancur, loh Saudara. Terpaksa saya masuk. Anda tidak tahu sejarahnya Tesso Nilo saya bilang begitu. Tesso Nilo itu bekas HPH tapi disitu karena banyaknya gajah bersidang, Rapat disitu gajah-gajah akhirnya dimasukan Taman Nasional. Nah itu tidak paham, menyalahkan bahwa ini pengelolaannya tidak beres. Tidak tahu sejarah. Kalau tidak tahu sejarah menuduh orang itu tidak baik Bu. Tolong kayak seperti ini ada teman-teman di KLH yang ikut masuk dalam virtual rapat, Ini tiap hari Bu. Jadi kesannya ke daerah-daerah itu tidak baik itu.

Saya kira itu Pak Ketua. Jadi saya harapkan.

Satu lagi tata batas. Ini sudah sejalan dengan Pak Sekjen kita. Keputusan MK tata batas kawasan hutan itu wajib kalau sudah ditunjuk, diukur, dipetakan, ditetapkan. Kalau belum itu kawasan hutan bisa dihilangkan. Ini berbahaya sekali. Tapi Pak Sekjen sudah ... kita, tata batas tidak perlu kita pakai koordinat, seperti laut. Titik batas laut kan tidak ada patoknya. Nah ini dilakukan segera, karena ini dengan adanya pengurangan-pengurangan kawasan dianggap ini kawasan ini ilegal. Kalau kita ke pengadilan pasti kalah karena kita kalah di MK Bu.

Saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Saya baru tahu kalau gajah itu rapatnya di Tesso Nilo. Sepengetahuan saya gajah itu Rapatnya di Jakarta. Terima kasih.

Ini yang terakhir ya, jam 13.00 kita makan siang. Ini penuh dengan keseriusan Bu, yang nanya sampai 25, belum virtual loh Bu. Ini baru kali ini rapatnya luar biasa.

Nah selanjutnya kita dengarkan dulu. Kalau dari namanya ini qoriah ini. Ema Umiyyatul Chusnah. Ya sebelah sana geser disebelah kir. Inshaa Allah kita tutup pertemuan siang hari ini untuk di skors makan siang, dan langsung ditutup oleh doa oleh Bu Ema.

Terima kasih.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan, beserta Bapak/Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Ibu Kementerian LHK, beserta jajaran.

Tidak banyak yang ingin kami sampaikan, singkat. Yang pertama terkait dengan pengelolaan sampah yang merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan adanya perubahan prilaku masyarakat untuk memilah sampah dari sampah organik dan sampah anorganik. Kami menilai edukasi mengenai hal tersebut harus dilakukan secara massif agar berdampak signifikan, misalnya KLHK melakukan kerjasama atau sosialisasi dengan ormas perempuan baik dari semua tingkatan atau kelompok masyarakat di tingkat Desa tentang pentingnya prilaku memilah sampah ditingkat rumah tangga. Selain mengajarkan prilaku memilah sampah, masyarakat di edukasi untuk mengelola sampah organik sebagai media untuk budidaya maggot, atau sumber protein untuk pakan ikan atau produksi pupuk kompos. Sampah anorganik di daur ulang menjadi produk *hand craft* sehingga ada dampak social ekonomi dari gerakan pemilahan sampah ini. Selain itu dengan konsep *zero waste* dapat diterapkan dimulai dari skala rumah tangga.

Yang kedua, terkait program Bank Sampah. Kami menilai dan mengapresiasi ini memang sudah baik. Kami berharap program ini bisa dialokasikan didaerah pemilihan kami untuk menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan. Salah satunya terkait

dengan program eco pesantren. Kami ingin menanyakan kepada Ibu Menteri dan Bu Dirjen bagaimana alokasi program ini untuk tahun ini. Kami berharap program ini bisa dioptimalkan untuk membina para santri agar peduli terhadap lingkungan dan kami menilai program ini sangat cocok diterapkan di masa pandemi ini. Karena saat-saat ini para santri sudah mulai berdatangan di pesantren dan terlebih lagi di Dapil kami terdapat banyak Pondok-Pondok Pesantren. Jadi mohon untuk lebih diperhatikan terkait dengan program eco Pesantren.

Yang terakhir Bu Menteri, ini yang telah kami suarakan berulang kali terkait dengan di Kabupaten Jombang ini ada pembuangan limbah B3. Yang ini memang sangat berbahaya dan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Kami mohon lebih diperhatikan bagaimana solusi untuk penanganan limbah B3 ini karena limbah B3 di Kabupaten Jombang ini terbesar se-Jawa Timur. Mohon lebih diperhatikan.

Itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak 1 menit ya Pak, kasihan orang sudah pada lapar Pak.
Terima kasih.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Ibu Menteri, Pak Wamen dan seluruh jajarannya yang saya hormati pula,
serta teman-teman wartawan.

Kami dari Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri dan Pak Wamen yang telah merespon keluhan masyarakat Kalimantan Tengah beberapa saat yang lalu. Saya ingin menanyakan terkait dengan pertanyaan saya yang terdahulu Bu, terkait dengan program TORA yang ini memang ditunggu oleh masyarakat pinggir kawasan hutan tetapi ada sebagian yang tidak tepat sasaran, ternyata setelah saya pelajari jawaban dari Kementerian ini diserahkan ke Gubernur. Verifikasinya ada di Gubernur baru diserahkan ke KLHK. Nah ini mohon nantinya ini bisa diklarifikasi ketika ada verifikasi dari Gubernur karena takutnya ada kepentingan seperti yang terjadi di Barat. Punya sebagian malah tidak masuk. Saya kira Pak Wamen lebih tahu, Ibu bisa bertanya ke Pak Wamen nanti kenapa bisa terjadi demikian.

Kemudian program TORA ini Bu. Kemarin ada masyarakat Pedalaman yang mengerjakan lahan usahanya, kemudian dia memotong 1 tegakan di ladang usahanya itu langsung di proses hukum. Sekarang divonis 1,5 tahun. Ini petani-petani tradisional, kasihan betul ini. Karena mereka tidak menyadari bahwa itu masuk kawasan hutan, karena sejak dulu ladang usahanya ada disitu. Kalau program TORA itu menyentuh kesana, saya kira ini menjadi solusi yang terbaik.

Kemudian terkait dengan menjelang musim kemarau. Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bahwa ini ada potensi konflik, karena masyarakat yang biasa tebas tebang bakar ini pada saat Reses kemarin saya melihat lumbung padinya sudah tidak ada, kosong semua. Karena 4 tahun praktis mereka sudah tidak bisa menanam. Nah saya khawatir kalau ini mereka langsung daripada mati kelaparan mereka akan melakukan tebas tebang bakar, tetapi dengan kebijakan dari Pak Kapolda. Kemarin dengan kebebasan kemudian ini dirapatkan di DPRD Provinsi memberikan peluang 2 hektar di tanah mineral. Saya pikir ini cukup bijaksana. Kalau ini dikendalikan oleh semua pihak bisa terkendali Bu. Ini pengalaman saya pada saat saya menjabat disana, walaupun dilarang Presiden saya berikan kesempatan tapi kami tunggu ditanah mineral, dan ini Alhamdulillah bisa dilakukan dengan tertib. Tapi bergilir tidak sekaligus, per 2 hektar, per 2 hektar. Saya kira itu. Kiranya nanti dapat dukungan dari Kementerian agar tidak menjadi potensi konflik di masyarakat pedalaman.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Sudah selesai untuk session yang pertama.

Selanjutnya skors ½ jam, atau 30 menit.

(RAPAT DI SKORS PUKUL 13.00 WIB)

(RAPAT DICABUT PUKUL 14.00 WIB)

Bu Renny.

F-GERINDRA (RENNY ASTUTI, S.E., S.PN.):

Terima kasih Pimpinan.

Kang Dedi yang terhormat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, beserta Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang saya hormati Ibu Menteri LHK beserta jajarannya.

Perkenalkan Ibu, saya Renny Astuti. Saya warga baru di Komisi IV dari Dapil Sumsel I. Ini juga menjadi bahan pertimbangan Ibu karena sekarang di Sumsel I ada 2 orang Wakil. Kalau tadi Cuma ada Ibu Kiki, sekarang ada saya Bu. Ada *two queen* sekarang dari Sumsel.

Ibu Menteri yang saya hormati,

Sebelumnya saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian LHK yang telah berhasil menurunkan emisi karbon. Ini merupakan kabar baik buat kesehatan kita beserta anak-cucu kita. Dari paparan Ibu Menteri tadi saya sedikit menggarisbawahi mengenai karhutlah Bu. Sebagaimana paparan dari Ibu tadi Sumsel ini juga mendapat perhatian yang serius dari tahun ke tahun berulang terus mengenai kebakaran hutan dan lahan ini. Di masa pandemi Covid-19 ini pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan akan lebih berat sehingga lebih beresiko bagi masyarakat.

Ibu Menteri yang saya hormati,

Seperti kita tahu saat ini di Sumatera Selatan Pemprov sudah menganggarkan anggaran yang meningkat secara signifikan dari yang tadinya Rp1,7 Miliar menjadi Rp37 Miliar. Dan saat ini Pemprov Sumsel sudah memberikan status siaga darurat karhutla walaupun saat ini masih musim hujan. Ini didasarkan pada prakiraan musim kemarau. Yang ingin saya berikan masukan kepada Ibu Menteri beserta jajarannya, yang berkaitan dengan karhutlah ini. Karena di Sumsel itu memiliki lahan gambut yang sangat luas. Kalau tidak salah Nomor 2 di Sumatera. Untuk mengatasi karhutlah ini selama ini memang sudah dilakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi akumulasi asap. Akan tetapi setahu saya hal ini tidak dilakukan secara rutin Ibu. Bahkan 2019 kemarin pada masa sosialisasi itu juga tidak ada modifikasi cuaca seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya mengharapkan dari Kementerian LHK untuk mengurangi akumulasi asap ini, saya mohon perhatian dari Kementerian untuk mengedukasi masyarakat Ibu. Tidak saja mengedukasi masyarakat untuk peduli api, akan tetapi saya sangat berharap bahwa dari Kementerian bisa mengedukasi masyarakat tentang mata pencaharian baru yang berkelanjutan Ibu terutama di ekosistem gambut. Karena akibat dari kebakaran hutan ini sangat buruk sekali, bahkan setiap kali ada kebakaran hutan itu sekolah-sekolah itu diliburkan. Jadi mohon perhatiannya ini saya mungkin sedikit memberi masukan kepada Ibu untuk mengedukasi masyarakat ini mungkin bisa melibatkan polisi hutan. Jadi Polhut ini tidak saja mereka hanya berkeliling untuk mencari titik-titik api, tetapi saya harap mereka juga bisa mengedukasi masyarakat untuk mencari mata pencaharian baru yang berkelanjutan.

Kemudian yang kedua Ibu, saya minta perhatian Ibu untuk kawasan hutan margasatwa Padang Sugihan. Kalau kita tahu kawasan hutan margasatwa ini ada di air Sugihan OKI. Akan tetapi informasi yang saya dapatkan Ibu, saat ini kawasan hutan margasatwa ini sudah semakin meluas Ibu. Jadi ada perluasan kawasan yang masuk wilayah Kabupaten Banyuasin Ibu. Saya mendapatkan informasi dari masyarakat. Ini juga saya minta menyiapkan secara tertulis supaya bisa saya sampaikan ke Kementerian bahwa disana ada 1 Desa, namanya Desa Baru Ibu di Kabupaten Banyuasin. Disini masyarakat saat ini mereka tidak bisa bercocok tanam disana. Kenapa mereka tidak bisa bercocok tanam, karena ternyata di kawasan hutan itu sekarang menjadi perluasan kawasan hutan margasatwa Padang Sugihan. Sehingga kalau mereka bercocok tanam, mereka harus kucing-kucingan dengan polisi hutan. Mohon Ibu perhatiannya untuk daerah sini. Itu namanya Desa Baru. Kalau saya tidak salah Kecamatannya masuk Kecamatan Air Kumbang Ibu itu di Banyuasin. Jadi mohon Ibu perhatiannya untuk wilayah itu, karena saya sempat bicara dengan Kades disana untuk perluasan kawasan hutan ini Kades tidak dilibatkan sama sekali. Mohon penjelasannya.

Itu saja.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Baik.

Terima kasih.

Ibu Menteri sebagai bentuk kerangka pemaparan kita bahwa salah satu kelemahan dalam pengelolaan Undang-Undang di kita ini adalah kaku. Misalnya diserahkan kepada Gubernur tujuannya Provinsi agar Provinsi bisa melakukan pengelolaan dengan baik. Pada faktanya ada yang baik, ada yang jelek. Saya sih cenderung begini, pengelolaannya oleh Pusat, oleh Kementerian tetapi bisa didelegasikan berdasarkan kemampuan Daerah. Daerah ini dianggap layak dalam mengelola lingkungan hidup, dalam mengelola kehutanan, maka daerah ini diberi kewenangan penuh untuk melakukan kewenangan. Ketika mengalami degradasi kemudian diambil lagi. Ini cara yang terbaik agar tidak bongkar pasang Undang-Undang. Ini yang harus kita lakukan, karena memang kita tidak bisa juga membuat bahwa seluruh daerah jelek. Banyak juga Pemerintah Daerah yang baik. Seluruh Pemerintah Daerah baik, banyak juga yang jelek termasuk juga Pemerintah Pusat juga ada jeleknya juga. Nah ini barangkali sebagai bentuk koreksi kita semua di Omnibus Law nanti seperti itu. Daerah yang mempunyai kemampuan dan punya komitmen melakukan pengelolaan hutan diberikan, termasuk pengelolaan lingkungan ini penting. Di Daerah itu di Dlnas Kabupaten/Kota, mungkin juga di Provinsi semakin sedikit tenaga ahli

lingkungannya. Apalagi mutasi pergeseran orang, sering kali tidak mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas. Nah itu kan sudah ditempuh oleh BPK termasuk Kementerian Dalam Negeri persoalan pengolahan pengawasan, Inspektorat. Inspektorat itu disitu tetapi dibikin kualifikasi sehingga yang masuk inspektorat orang-orang yang punya kualifikasi tertentu. Lingkungan Hidup menurut saya harus mengikuti gaya itu dan tidak bisa menyimpan sembarang orang disitu kalau tidak punya standarisasi. Ini bahan kedepan. Repotnya sekarang di penindakan itu adalah industri sudah berjalan. Laporan ke penindakan, dari penindakan disposisi lagi ditindaklanjuti oleh Dinas Kabupaten/Kota ya sudah *wassalam* itu tidak maju lagi. Itu saja. Termasuk yang kemarin Bu, yang masalah peternakan itu yang di Subang. Sampai sekarang tidak ada perubahan apa pun, baunya tetap, buang limbahnya masih ke sungai. Karena sudah didelegasikan ke Kota Dinas Lingkungan Hidup setempat. Ya sudah *wassalam* itu. Itu saja.

Yang selanjutnya agar paripurna karena lingkungan hidup ini adalah persoalan keparipurnaan diri dan orang yang paripurna itu adalah orang yang secara totalitas mengabdikan, berserah diri, dan itulah seorang Muslim sejati.

Dipersilakan.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi IV,
Bu Menteri, Pak Sekjen dan jajaran KLHK.

Pertama tentu apa pun ceritanya kita harus memberikan apresiasi Bu Menteri. Tadi hampir semuanya saya pikir ada kebanggaan buat kita bahwa apa yang telah diperjuangkan oleh Ibu Menteri berkaitan dengan komitmen ya mengurangi emisi gas, saya pikir ini harus kita berikan apresiasi. Mudah-mudahan dana yang diberikan Rp812 Miliar ini bisa dimanfaatkan dikelola dengan baik khususnya berkaitan dengan lingkungan.

Yang kedua Bu Menteri saya juga memberikan apresiasi ini berkaitan dengan penanganan konflik gajah yang ada di Aceh Tengah khususnya di Bener Meriah ya. Waktu itu Pak Dirjen sudah turun kesana dan langkah-langkah sudah dilakukan dan bantuannya sudah termasuk pembangunan beryl ya kurang lebih sekitar 10 kilometer. Namun demikian Pemerintah disana berharap ada dukungan yang maksimum Bu Menteri. Harapan kita adalah karena kawasan gajah terbesar di Aceh itu yaitu di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, waktu itu Pak Wiratno Kementerian dampingi kita disana. Tentu kita berharap ini bisa juga seperti yang dilaksanakan di Sumatera Utara yaitu di Tangkahan. Mudah-mudahan ini saya sudah sampaikan ke Pak Sekjen. Ini juga bisa diberi dukungan jadi sehingga persoalan gajah ini bisa kita jadikan sebagai eco wisata. Jadi sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga dunia pariwisata.

Yang ketiga berkaitan *illegal logging* Bu Menteri. Ini saya melihat di halaman 25 ya. Ini tantangan termasuk peran pengamanan kawasan oleh KPH perlu diperkuat, kemudian Kantor Balai Gakkum baru ada 5, dan 15 seksi. Kemudian juga penindakan. Nah ini persoalan yang mendasar saya lihat ini ada di Pemerintah Daerah Bu Menteri. Ini bagaimana sinkronisasi Kementerian dengan Pemerintah Daerah juga harus tegas. Kenapa? Karena saya lihat *illegal logging* di daerah paling banyak terlibat Pemerintah Daerah Bu Menteri bahkan ini dibiarkan. Ini apa langkah-langkah, saya pikir Ibu Menteri harus melakukan langkah demikian. Kita lihat juga menyangkut penguatan KPH dengan SDM, kemudian juga penguatan Balai Gakkum, kemudian masalah personil. Saya pernah beberapa waktu yang lalu sudah tanyakan, ... ini ada terkendala di Kementerian terkait. Ini tentu kita berharap. Saya berharap setiap tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup bisa menambah termasuk polisi-polisi hutan itu. Kalau ini tidak dilakukan saya yakin orang semena-mena. Saya juga mendapat laporan dari beberapa Kabupaten Bu Menteri, kurang lebih 2 hari yang lalu juga. Ini persoalan *illegal logging* di daerah ini luar biasa. Ini perlu saya pikir nanti pada saat Ratas dengan Pak Presiden sampaikan. Itu kan hadir juga dipanggil itu Panglima TNI dan Kapolri. Kenapa? Karena mereka yang punya ranah disitu. Kalau ini tidak dilakukan saya yakin ini persoalan khusus *illegal logging* ini tidak akan pernah selesai.

Yang terakhir yaitu terkait dengan realisasi program perhutanan sosial. Kita tahu betul per Juni 2020 itu baru mencapai 4,1 juta hektar dari 12,7 juta hektar yang ditargetkan. Artinya baru sekitar 32%. Nah ini mungkin bisa Bu Menteri menggambarkan persoalannya dimana. Kita tahu betul ini Pak Presiden ini kan punya target terhadap perhutanan social ini bisa segera bermanfaat juga buat masyarakat, termasuk juga dalam semangat reformasi agraria yang dicanangkan oleh Pak Presiden.

Mungkin itu beberapa hal Pak Ketua.

Yang terakhir saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Khalid tadi, Bang Salim Fakhry juga, ini persoalan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser ini kita harapkan dalam waktu tidak terlalu lama bisa segera dikembalikan ke Aceh Bu Menteri. Ini sangat penting. Kenapa? Karena pengawasan penting sekali. Ini mudah-mudahan bisa dimasukkan ke kesimpulan nanti Pak Ketua sesuai kesepakatan Pak Ketua tadi. Jadi sehingga kita bisa pertanggungjawabkan kepada masyarakat Aceh dan juga terhadap lingkungan. Kita tahu betul Taman Nasional Gunung Leuser ini sangat ketergantungan hutan dunia disitu.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Itulah seorang Muslim yang baik. Dia berkomitmen menjaga alam lingkungan secara utuh karena kalau lingkungannya rusak kita mau tinggal dimana. Dan usulan hukumannya bagi penebang liar, illegal logging adalah per pohon. 1 pohon itu 1 bulan. Jadi kalau menebang 1 juta pohon berarti 1 juta bulan. Itu bikin begitu kalau mau serius. Tetapi ya setiap bikin Undang-Undang pasti yang menghalaginya banyak, karena yang menebang pohon duitnya lebih banyak.

Yang berikutnya bahwa kalau pohonnya sudah baik, alamnya tertata, lingkungannya terjaga, maka manusianya hidupnya harmonis. Orang hamonis itu kalau orang sunda bilang sama temannya itu "aa", dan kemudian sudah "aa" itu nanti lingkungannya menjadi bagus. Kalau sudah bagus maka "aa"-nya segera punya adik, Adhi. Dan akhirnya Adhinya hidupnya sejahtera dan punya anak namanya Mahendra Putra.

Jadi silakan A.A Bagus Adhi Mahendra Putra.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,
Ibu Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Pertama-tama saya mengapresiasi program kerja Ibu yaitu terkait dengan multi usaha kehutanan. Ini luar biasa. Tadi perhutanan sosial yang di Bali ada 90. Jadi masih 4 lagi yang masih menunggu fertek. Jadi pada konkritnya beberapa hutan sosial yang saya sambangi dalam melaksanakan fungsi pengawasan kami pada hutan social, ada beberapa hal yang kita harus lakukan di perhutanan social itu. Yang pertama adalah kita harus buat desain bu. Apa yang kita ingin wujudkan di perhutanan sosial itu, biar jangan nanti fungsi hutan itu hilang. Ini di beberapa tempat di Kabupaten Buleleng, dan kemarin terakhir yang saya jambangin di Karangasem. Disini ada pemahaman-pemahaman yang belum sama terkait dengan pola, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kita yang ada di perhutanan social tersebut. Nah jadi saya mencoba dengan Kadis PMD Bu. Saya memberikan percontohan di Bali dengan menggendeng Kadis PMD karena dia mempunyai anggaran untuk membuat desain di hutan Wanagiri. Kita membuat satu kawasan yang boleh difungsikan untuk fungsi social dan tempat umum itu kita desain 1 hektar. Di 1 hektar itu ada kemahnya, dan sebagainya. Nah ini yang kira-kira yang perlu kita memberikan arahan atau motivasi kepada KPH-KPH kita sehingga hutan sosial itu bisa berfungsi sebagai destinasi daerah wisata baru di Indonesia ini. Dan terkait dengan hal tersebut mungkin kedepan perlu dilombakan setiap tahunnya. Mana hutan sosial yang sudah menghasilkan produk turunan, dan produk yang bisa dia menjadikan satu *icon* di perhutanan sosial tersebut, dan produk itu tidak boleh hilang selama perhutanan social itu dipegang oleh yang bersangkutan. Dan yang perlu kita lakukan di perhutanan sosial itu, contoh yang di Karangasem Bu itu ada 6 jenis madu yang dihasilkan di perhutanan sosial tersebut. Yang dari 6 jenis madu itu ada dari apis cerana dan juga apis trigona. Kalau di apis cerana saja itu bisa menghasilkan nama dudi. Trigona bisa menghasilkan 3 rasa. Jadi tergantung dari jenis pohon yang ada disana. Yang contohnya saya

catat disini pada bulan November itu kayu sendok, itu warna dan rasanya beda. Sudah itu kayu nangi di Desember, sudah itu kayu nangi dan kaliandra di bulan Maret. Itu beda-beda warna dan rasanya. Nah untuk itu, dan saya melihat ini menjadi komoditi ekspor bulan kedepan. Bisa tidak kita lakukan penelitian terkait dengan madu-madu tersebut. Unsur apa yang ada didalamnya, dan ada klasifikasi. Madu ini oh dijual harga sekian dan sebagainya terkait dengan unsur-unsur tersebut.

Terus yang juga di Trigona Bu. Di Trigona itu pada umumnya rasanya madu itu kecut tapi pada suatu ketika yaitu munculnya bunga kaliandra ini rasa madunya manis. Ini perlu juga dijadikan penelitian. Dan satu paham antara nyata dan hoax. Di masyarakat itu berkembang, kalau madu asli itu ditaruh di kulkas tidak beku. Kenyataannya masyarakat menghasilkan madu ditaruh di luar kulkas dalam kurun waktu 3 bulan dia beku. Menurut masyarakat terjadi penurunan kadar air disitu sehingga dia menjadi beku. Nah ini yang perlu pemahaman-pemahaman dan diberikan suatu penelitian ditempat tersebut sehingga apa yang dihasilkan oleh masyarakat itu bisa kita tingkatkan nilai jualnya.

Terus yang kedua, jadi terkait dengan hutan kita yang berada di kawasan Provinsi Bu. Kalau tidak salah saya baca ini minimal harus ada 30% dari luasan daerah di Provinsi itu. Pertanyaan saya, mungkinkah aturan itu kita ubah. Kita pakai skala Kabupaten/Kota Bu. Jadi kita wajibkan Kabupaten/Kota itu harus mempunyai kawasan kehutanan minimal 30%. Mungkin bisa diwujudkan hutan kota, yang tadi pohon buah-buah unggul dan sebagainya yang kemudian menjadi wisata agro. Nah sehingga konteks kita bagaimana keterjagaan hutan itu bisa jangka panjang, dan burung-burung juga bisa terbang kesana, ada burung hantu kita, dan burung-burung lain. Nah itu bisa kita laksanakan dan akan menjadi *icon* yang sangat indah di Kabupaten/Kota tersebut.

Yang terakhir Bu, terkait dengan hewan yang dilestarikan. Nah perlu diberikan kemudahan kepada masyarakat, bagaimana dia bisa ikut berperan didalam melestarikan hutan-hutan tersebut. Jadi satu contoh sekarang, Ibu sudah memberikan ijin terkait dengan penangkaran Jalak Bali. Pada tahun kemarin bagus, ijin edarnya cepat keluar saat ijin edar itu berada di BKSDA. Dan sekarang begitu ijin edar itu kembali ke Pusat yaitu di BKPM, nah ini tersendat Bu. Jadi pergerakan ekonomi di penangkar kita sudah terhambat, sangat terhambat sekali, karena ijinnya dari BKSDA lari ke Pusat dulu baru kembali ke Daerah. Nah ini yang hasil yang saya dapat dari teman-teman di BKSDA di Provinsi Bali.

Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membuat ... di areal-areal hutan mangrove kita. Nah ini bagus sekali juga kita menjadikan satu destinasi pariwisata kalau kita poles dengan desain-desain pariwisata yang unggul.

Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan salah satu terkait dengan hutan yang berkawasan kota ini mohon dipikirkan kalau kita bisa lahirkan menjadi salah satu kesimpulan ini akan sangat baik dan akan memacu Kepala Daerah-Kepala Daerah untuk membuat sosial kota.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak A. A. Bagus Mahendra.

Selalu 3 orang Indonesia itu, alam madyapada, alam mayapada, alam marcapada. 3 terus. Kemudian dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Kemudian juga agama esensinya 3, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Ahad. Satu, akhirnya di Ahad, di tunggal sudah tidak ada yang di akui. Keberhasilan tidak ada yang diakui dan selanjutnya pasti yang menyampaikan Muhammad Syafudin.

Ada? Tidak ada lagi sudah dipuji-puji.

Sebenarnya kalau ngomongin kebakaran hutan kata Ibu cara yang terbaik adalah dengan membuat hujan buatan. Hujan buatan itu pasti diawali oleh petir. Petir itu disebutnya Guntur. Dan selanjutnya memang agar hujannya turun segera Pak Guntur untuk turun.

F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Pimpinan, bersama teman-teman Komisi IV yang saya hormati, Ibu Menteri dengan jajarannya yang saya hormati.

Kami akan melihat Bu Menteri dari masalah kerusakan lingkungan hidup. Pernah kami kunjungan spesifik ke wilayah Jambi. Kalau tidak salah itu yang memimpin Pak Dedi sendiri. Tolong nanti Pak ditambahi yang saya lupa-lupa. Ada sebuah sungai besar Bu disana yang itu merupakan mata pencaharian rakyat sehari-hari. Akibat pencemaran lingkungan hidup perusahaan tersebut akhirnya ikannya sudah tidak ada lagi Bu, sehingga masyarakat setempat untuk makan sehari-hari saja sudah bingung. Kemudian juga ada dari sana tokoh bahkan beli tanah sekitar kawasan itu sudah tidak diberdayakan lagi, dengan cara-cara intimidasi tertentu supaya kawasan tersebut menjadi wilayah perusahaan. Pengelola kawasan itu adalah PT Sinar Mas. Keputusan sementara pada waktu kami Kunjungan Spesifik tersebut adalah Bulog memberikan bantuan beras kurang lebih 3 bulan kepada rakyat setempat untuk mengatasi akibat pencemaran hidup tersebut. PT Sinar Mas Pak Dedi janji juga akan kita panggil untuk kesini. Kemudian dari KLH akan menindaklanjuti. Harapan kami Ibu, kalau kami turun mendapatkan suatu efek jera daripada masyarakat atau pun perusahaan tersebut. Kami mohon nanti kiranya apa langkah yang sudah ditentukan oleh KLH tersebut.

Kemudian yang kedua, ini juga masalah lingkungan hidup. Kami Kunjungan Spesifik ke Dapil kami di wilayah Mojokerto di Desa Bangun. Itu tumpukan-tumpukan sampah akibat impor dari luar, 2-3 rumah lebih tinggi dari rumah masyarakat. Betul-betul sangat tidak sehat. Kami mencoba untuk kesana bahkan dengan Pak Mutarom sama-sama dari Dapil. Ada hati yang

rasanya tidak ikhlas dari warga setempat. Mereka menjawab bahwa ini sudah puluhan tahun menjadi mata pencaharian kami. Sudah meluluskan S2, S3 dan lain sebagainya. Yang kami menjadi lebih tidak enak lagi dari Dinas Lingkungan Hidupnya kelihatannya lebih berpihak kepada perusahaan Bu. Kami tidak tahu lagi kondisi seperti itu di wabah Corona yang sekarang ini. Keputusan sementara kemarin, Bupati menyanggupi akan membangun atapnya. Tingkat 1 membangun lantainya, KLH akan menindaklanjuti. Hal-hal seperti ini Bu menyangkut reputasi kita semuanya. Kami mohon kiranya apa yang bisa kita lakukan untuk hal-hal seperti diatas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kerusakan lingkungan kerusakan alam itu karena manusianya serakah padahal umur tidak akan melebihi 200 tahun atau 100 tahun saja sudah jarang. Manusia serakah itu adalah manusia yang tidak bahagia karena dia tidak memiliki hati. Hati itu kata orang Jawa itu budi, dan pendidikan yang idealnya melahirkan manusia yang berbudi luhur. Orang berbudi itu punya kesetiaan pada alamnya. Sehingga Pak Budhy Setiawan akan menyampaikan itu.

F-PG (BUDHY SETIAWAN):

Terima kasih Pimpinan. Memang Pak Dedi ini mantap sekali memberikan pengantarnya.

Ibu Menteri beserta jajaran.

Tadi kalau soal sampah masyarakat sudah banyak dari rekan-rekan Komisi menyampaikan. Pertanyaannya saya khusus mengkhususkan kepada limbah industri. Terkait khususnya limbah industri yang ada hubungannya dengan *normally occurring radioactive material*, dan juga *technologically in hands normally occurring radioactive material*. Ini menjadi perlu perhatiannya terutama dari jajaran Kementerian LHK ini bahwa penggunaan radioaktif bahan-bahan beradioaktif ini sudah bukan dalam batas-batas di industri energi, pupuk, tetapi sudah kepada penggunaannya di industri bahkan pengalengan makanan, yang terkait dengan makanan, sudah ada penggunaan juga disitu. Belakangan ini malah diberitakan kemarin ini ditemukannya limbah radioaktif di sebuah perumahan di Tangsel. Di lingkup perumahan bergalon-galon, ada pembuangan limbah. Ini yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sebenarnya pengawasan pengelolaan, terutama kalau yang menyangkut tenorm ini ada lingkup Bapeten disini. Ada kerjasamanya kalau tidak salah MoU-nya KemenLHK dengan Bapeten. Nah ini bagaimana pengelolaan, pengawasan terkait dengan limbah industri yang mengandung bahan radiaktif ini. Baik yang saya tanyakan itu terkait dengan norm maupun tenorm. Dan ini industri kelasnya, dan industrinya ini belum

masuk ke industri industri berbahan makanan. Apakah ini sudah masuk ke pengawasannya di KemenLHK ini? Itu saja satu yang ingin saya tanyakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Orang berbudi luhur itu setia pasti hidupnya selamanya abadi, tiada tapi tetap ada, bukan dibalik ada tapi tiada. Nah orang yang abadi itu *Insyah Allah* selamat. Tapi selamatnya bukan karena sapinya sudah turun, tapi selamatnya karena memang hidupnya selamat, sering pergi umroh. Pergi Umroh berjelajah ke Riyadh, maka lahirlah Slamet Ariyadi.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Terima kasih Pimpinan, ini bedanya bu kalau dipimpin oleh budayawan suasana hidup.

Pimpinan, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Ibu Menteri, Bapak Wamen dan beserta jajarannya yang kami hormati pula.

Yang pertama, saya mengapresiasi apa yang menjadi target dalam Kementerian Lingkungan Hidup ini adalah melibatkan optimalisasi masyarakat dalam mencegah adanya karhutlah. Memang keterlibatan masyarakat ini memang menjadi suatu keharusan sebagai langkah konkrit untuk mencegah terjadinya karhutlah diberbagai wilayah Provinsi yang memiliki potensi untuk adanya kebakaran hutan. Namun yang perlu kita cermati didalam melibatkan peran masyarakat ini selain mereka hanya dilibatkan tentunya kita minta kepada jajaran Kementerian atau pun yang bertugas bagaimana jaminan keamanan dan kesejahteraan mereka. Ini yang terpenting, karena kita lihat didalam optimalisasi peran masyarakat disini ada 440 Desa sasaran patroli terpadu untuk mencegah karhutlah. Tentunya ini perlu dipikirkan bagaimana keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat.

Kedua, ketika disini kita lihat didalam pembahasan kejahatan kehutanan ini disebabkan salah satunya karena penindakan oleh Pemda tidak banyak dilakukan. Ini tentunya kami menyayangkan karena ini sebagai salah satu bentuk lemahnya koordinasi dengan Pemda. Tentunya ketika memang ini koordinasinya atau pun stimulus responnya yang diberikan dengan Pemerintah Daerah dan Provinsi, tentunya ini menjadi solusi bagaimana bisa meningkatkan adanya kejahatan hutan yang terjadi. Setidaknya ini perlu dibangun koordinasi Ibu Menteri dengan Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Provinsi untuk bisa mencegah adanya kejahatan hutan.

Yang ketiga, melihat adanya berbagai lahan Perhutani khususnya ini berbicara di wilayah Madura sebagian adalah lahan Perhutani yang tandus

atau pun tidak produktif, tentunya kita mengajak kepada Perhutani bagaimana melibatkan masyarakat untuk bisa ikut andil memanfaatkan lahan Perhutani tersebut. Setidaknya ada regulasi yang dibangun bagaimana adanya keterlibatan oleh masyarakat.

Yang terakhir, terkait masalah kesejahteraan Polisi hutan ini Bu Menteri. Karena kemarin kami ketemu dengan Polisi hutan yang ada di Pulau Kangian, tidak tahu apa kendalanya. Jadi mereka senjatanya diambil untuk sementara waktu, mereka minta bagaimana untuk bisa menjaga keselamatannya ini perlu diberikan senjata untuk bisa mengamankan minimal senjata jenis SS dan sebagainya, mungkin seperti apa perlu digaji.

Yang terkait tentang masalah keamanan. Tentunya polisi hutan ini perlu kiranya ditingkatkan kesejahteraannya karena melihat adanya serapan atau pun gaji pokok yang diterima oleh mereka hanya sekitar Rp3.500.000,-. Tentunya ini hal yang sedikit karena pertaruhan nyawa bagi mereka untuk terus mengabdikan, berbakti kepada bangsa dan negara.

Itu saja yang dapat kami sampaikan.

*Wauallahumafiq Illa Aqwamith Thoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sudah pergi menjelajah selamat ke Riyadh, akhirnya orang bosan dunia karena dunianya sudah rusak, alamnya sudah hancur, gunung-gunungnya sudah hancur, hutannya sudah rata. Akhirnya mau pergi ke ruang angkasa menemui Bu Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV dan juga Anggota, Bapak/Ibu sekalian, dan juga Ibu Menteri, Bapak Wamen, beserta jajarannya.

Bu Menteri,

Saya ingin menyampaikan ada beberapa hal. Saya juga di Maluku Utara ada masyarakat tougutil di Pulau Halmahera yang hutannya juga tempat tinggal mereka lambat laun sudah sangat kecil Bu, karena memang mereka sudah orang-orang sudah mulai. Karena disitu daerahnya pertambangan Bu. Jadi mereka sudah mulai naik-naik tapi sungguh sangat

miris sekali karena mereka juga wajib kita lindungi. Mohon atensinya juga untuk masyarakat tougutil yang ada di Pulau Halmahera di Maluku Utara.

Kemudian Bu, saya ingin menyampaikan bahwa saya mendapat laporan juga di beberapa daerah di Sumatera, itu ada penumpukan limbah fly ash, bottom ash (FABA) di banyak titik PLTU Bu. Itu ada PLTU Labuan Angin (Sibolga Medan) hasil pengecekan lebih dari 200.000 ton dan sudah melewati masa simpan yang semestinya sudah harus dibuang. Terus juga disitu ada PLTU Nagan Raya Aceh, limbah FABA sudah menumpuk 100.000 lebih dan melewati masa simpanan, PLTU Sebalang Lampung (ditempatnya Pak Ketua) permasalahan limbah menumpuk dan belum dibuang sampai sekarang. Terus juga PLTU Teluk Sirih, limbah menumpuk dan belum dibuang juga. Permasalahan di PLTU Ombilin, Sawahlunto Sumbar. Limbah FABA menumpuk ratusan ribu ton. Laporan masyarakat limbah FABA dibuang ke lubang bekas tambang oleh PT Guguk Tinggi Coal, area pembuangan sangat dekat dengan pemukiman masyarakat, dan banyak juga dikeluhkan oleh masyarakat. Ijin yang dimiliki oleh PT Guguk Tinggi Coal yang dikeluarkan KLHK pemanfaatan limbah B3 FABA sebagai penetralisir asam tambang dari Kementerian KLHK sesuai SK Menteri LHK Nomor SK 197/MenLHK/Setjen/PLB.3/3/2019 tanggal 16 Maret 2019. Bekas lubang tambang ditutup dengan limbah FABA PLTU, bukan ijin *landfill* tapi kegiatan PT Guguk Tinggi Coal seperti *landfill*. Bagaimana fungsi pengawasan dari limbah perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki pabrik-pabrik menghasilkan limbah FABA, SPE dan limbah lainnya. Contohnya, PT Indah Kiat di Riau. Sebelum memiliki ijin *landfill* limbah dibuang kemana-mana, dan setelah ijin *landfill* terbit bagaimana prosesnya. PT RAPP Riau laporan masyarakat *landfill* sudah *overload*, produksi limbah bertambah dan menumpuk, PT Wilmar Nabati Belitung penumpukan limbah FABA dan SPE juga pun banyak. Mohon Bu ini juga menjadi atensi karena limbah ini juga mempengaruhi ekosistem kehidupan kita di hutan.

Bu Menteri,

Ijinkan saya menyampaikan di Maluku pun juga banyak pertambangan. Sekali-kali memang harus ada tim yang turun kesana karena memang kemarin ada dampak katanya plankton yang ada di air laut Maluku Utara Kota Ternate dan sekitar Kota Halmahera itu menjadi masalah dan ikan-ikan pun mati. Ini juga menjadi atensi kita. Dan Ibu Menteri, saya juga ingin menyampaikan ada ijin yang diterbitkan. Ijin prinsip dari BKPM sudah keluar dan ditolak oleh masyarakat yang ada di Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara karena ijinnya dikeluarkan tidak melihat dari RT/RW kabupaten tersebut sehingga ijin yang dikeluarkan masuk dalam areal perkantoran, pendidikan dan juga areal masyarakat. Tolong Bu, diatensikan juga bahwa ijin-ijin yang keluar dari KLHK memang harus melihat geografis dan peta wilayah tersebut agar tidak tumpang tindih dan tidak masuk dalam wilayah-wilayah areal di permukiman masyarakat. Kita juga di Pulau Taliabu di Maluku Utara, ada ijin yang dikeluarkan untuk PT Godomogena sebesar 85.000 hektar yang juga tidak diperhatikan letak dan geografisnya. Mohon menjadi atensi dari Bapak dan Ibu bahwa ijin-ijin yang dikeluarkan dari Menteri LHK tolong juga melihat bagaimana geografis dari wilayah tersebut.

Karena ini memang sangat tertanggung Bu. Dan ijin saya Pimpinan, saya akan melanjutkan surat yang disampaikan oleh Pemerintah setempat dan juga disini ada kita melihat surat yang dikeluarkan oleh Bapak Bahlil Lahadalia BKPM. Jadi disini sudah kita lampirkan. Yang ingin saya sampaikan di Pulau Taliabu itu curah hujannya begitu tinggi Bu, sehingga apabila dikeluarkan lagi untuk IUP HHK untuk penebangan pohon itu bisa jadi banjir Bu. Bu, tahun ini sudah banjir 2 kali. Ini ada fotonya. Yang dikeluarkan ini arealnya. Belum saja melakukan produksi atau penebangan sudah banjir begini apalagi penebangan itu terjadi. Bisa jadi kita banjir lagi. Ini tempat kelahiran saya ini Bu Menteri. Memang dari Daerah yang paling terpencil, jauh dari wilayah yang ada di. Mohonlah diberikan atensi. Karena wilayah ini juga sering saya sampaikan, selain listrik juga belum bisa ada, wifi tidak ada, terus signal juga susah Bu. Jadi Alhamdulillah dengan keindahan pohon hutan yang begitu luar biasa itu sudah sangat kita bersyukur. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wata'ala, dan saya mohon atensinya Bu Menteri untuk ijin dikeluarkan agar bisa ditarik kembali. Ijinkan saya sampaikan surat.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Alien yang sangat. Karena Bu Alien itu kenapa sampai memahami Riau, memahami Maluku, memahami Sumatera karena memang melihat Lampung melihatnya dari atas, dari luar angkasa. Jadi alien itu kan diluar diri kita. Jadi memang orang yang diluar itu lebih memahami lebih detail dibanding yang didalam. Nah tetapi dalam hidup itu walaupun nebang pohonnya berjuta-juta, punya hutannya berjuta-juta tidak ada artinya tidak akan bahagia, tidak akan selamat kalau pada akhirnya sama Tuhan dikurangi kebahagiaannya. Dan orang yang bahagia itu adalah orang yang menikmati rizkinya. Jadi yang diminum barusan saya makan 5 sukro itu rizki namanya. Dan di tahun ini Anggota DPR RI yang punya rizki adalah Riezky Aprilia. Nah itu rizkinya siapa pun tidak bisa melewati badai yang seberat Riezky.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Alhamdulillah.

Terima kasih Ketua, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kepada Ibu Menteri beserta Bapak Sekjen, Bapak Wamen yang saya hormati.

Hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Terakhir, ini memang harusnya saya sampaikan pada saat Raker terakhir. Saya hanya ingin bertanya, mohon pencerahan Bu. Karena pada saat saya kemarin ke Pundi Kayu, dimana disitu banyak UPT kan Pak ya. Saya hanya ingin memahami apakah, tadi saya tanya sama Pak Darori juga terkait BPTH Bu (Balai Perbenihan Tanaman Hutan). Saya kan sempat diskusi dan saya tanya, Cuma saya sempat memahami bahwa mereka itu hanya terbagi 2 ya Pak Sekjen, Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Nah saya hanya

mempertanyakan sama mereka, *How do you reach it*, maksudnya bagaimana apakah tercover atau tidak gitu kan makanya saya tadi nanya Pak Darori dulu seperti apa karena saya kan harus mengcompare antara hari ini dan kemarin. Nah saya mohon pencerahannya Bu karena ini terkait juga Balai Perbenihan Tanaman Hutan ini kan penting juga, apakah mungkin tidak sih dikembalikan seperti dulu supaya tercover semua wilayah supaya hutan kita tetap kita jaga. Itu saja.

Nah kemudian terkait juga kalau tadi Ibu Alien bicara limbah, sungai. Kalau saya hanya ingin memberi informasi bahwa saya rasa Pak Wamen ini dari Kalimantan ya Pak ya bahwa Kalimantan sama Sumatera Selatan ini dalam konteks transportasi tidak jauh berbeda bahwa kami dialiri sungai-sungai besar. Nah hanya memang hari ini Pak sungai-sungai besar ini menjadi alat transportasi untuk mengangkat mineral. Nah mungkin DAS itu juga penting dipahami bagaimana, ini kan mulai mencemari secara tidak langsung.

KETUA RAPAT:

Bu Riezky kenapa kok sekarang kelihatan lembut? Kok gayanya sama dengan Ketua sih. Pak Ketua lembut, Bu Riezky lembut. Kalau Ketua galak, Bu Riezky galak. Ketua nakal, Bu Riezky tidak.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya 1 minggu ini lagi *soft* Pak. Jadi kembali lagi masalah normalisasi sungai terkait DAS. Saya hanya ingin memastikan ini dicermati karena demi nama baik KLHK sendiri, kami siap membantu Bapak/Ibu. Karena memang terkait tambang ini terkadang sirkulasi sungai ini terpegaruh. Ini tidak di Sumsel saja, hampir disemua tempat yang memiliki sungai-sungai besar.

Kemudian ini yang mungkin saya mohon maaf kalau Ibu bosan mendengarnya Bu, tapi mudah-mudahan tidak. Saya *Insha Allah* Bu satu periode ini saya ingin memperjuangkan masalah gambut Bu. Karena apa? Ibu kan kemarin, saya apresiasi yang sebesar-besarnya KLHK mendapat dari Norwegia terkait emisi. Dalam arti kata begini, ini juga gambut ini saya baca juga memiliki potensi yang sama *lasting about the future* Pak maksud saya. Bahwa saya baca gambut ini kan hanya sedikit sekali diseluruh dunia. Nah ini potensi kedepannya terkait *infiremental economic*, apalagi Pak Wamen sekarang kan lagi gencar dengan Kalteng terkait *Food Estate* kemarin saya baca (ini maksudnya beda cerita, lain). Jadi bahwa saya inginnya, saya diskusi Bu dengan namanya Pak.

KETUA RAPAT:

Bu Riezky, sudah mukanya cerah, jerawatnya makin gede lagi Bu.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Dengan Pak Bastoni Pak di Sumsel. Saya mendorong Pak ini kalau boleh Pak ya sebuah gagasan, Beliau berdiskusi terkait yang kemarin saya bilang Agro supaya gambut ini menjadi *legacy* KLHK, saya mendorong itu. Dan saya yakin ini bisa menjadi hal yang baik. *Compare* tuh Pak, maaf ya. *Compare* dengan adanya *Food Estate* tadi. Nah jadi kedepan siapa tahu setelah dari Norwegia bicara kedepannya lagi ya dengan gambut terjaga bisa jadi potensi untuk Indonesia sebenarnya. Dan saya dengan Ibu Renny disini perwakilan Sumatera Selatan yang memiliki lahan gambut, ada Aceh juga. Bang Muslim juga punya gambut, ada Bang T. A. Khalid juga, dan teman-teman dari Kalimantan, mari sama-sama kita menjaga kelestarian gambut. Ini kita bantu KLHK untuk menjaga kelestarian gambut.

Demikian dari saya Pimpinan.
Saya ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bu Riezky ini orang yang senantiasa berserah, meminta petunjuk oleh Allah, berpegang teguh pada agamanya, pada keyakinannya, pada Ketuhanannya. Itulah fatwa yang senantiasa diberikan oleh Muhammad Syafurudin.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFURUDIN, S.T., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ibu Menteri, Pak Wamen, kemudian seluruh jajaran LHK.

Saya memohon untuk ada namanya Desa Parado di Kecamatan Parado di Kabupaten Bima, ada beberapa Desa di Kecamatan Parado itu Pak tapi lahannya sudah sangat luar biasa karena disana itu harusnya dulu kemiri banyak sekali. Saya pernah meminta bantuan kepada pemerintah Pusat melalui Pak Doni BNPB untuk hadir memberikan edukasi kepada masyarakatnya dan Beliau hadir, kemudian ada Pak Bupati, Walikota untuk diberikan masukanlah bahwa hutan ini adalah tanggung jawab. Cuma memang problemnya bahwa urusan hutan disana itu kata orang-orang bahwa sudah diambil sama Provinsi. Jadi kami tidak punya kewenangan lagi Pak Haji gitu ya. Jadi ditarik sama Provinsi. Nah oleh karenanya saya mohon bantuan kepada Ibu Menteri dan jajarannya untuk bisa dibantu pembibitan kemiri. Kemiri disana itu sudah habis Bu Menteri ditanam jagung. Oleh karenanya saya sampaikan juga kepada masyarakat untuk tidak melakukan membuka lahan baru pada saat panen ini. Biarkanlah yang sudah tetapi kita

tanami tapi mungkin kalau bisa dengan penanaman kopi dan kemiri. Itu yang pertama.

Yang kedua Bu Menteri dan jajaran, saya mohon bantuan waktu virtual saya sampaikan. Untuk TN Tambora itu bisa dibekali oleh *Radio All Band* yang bisa mencakup komunikasi taktis ya. Karena memang disana sinyalnya tidak bagus apalagi sekarang ini untuk persiapan mendaki supaya bisa full terkomunikasi, karena *All Band* itu bisa kemana-mana, bisa berkomunikasi langsung dengan di Jakarta, bisa dibantu mungkin untuk anggaran kedepan dengan bantuan *Radio All Band* yang handal.

Kemudian yang ketiga, saya minta juga kemarin itu untuk alat pemadam yang 5000 liter ya. Itu disana ada 6 sektor yaitu 3 Kabupaten Bima dan 3 di Kabupaten Dompu. Mungkin karena terbatas bisa dibantu untuk 3 unit dulu dengan kapasitas 5000 liter. Ini sangat penting sekali Ibu Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan Pak Wir, Pak Dirjen. Ini saya menyampaikan ini karena mungkin Beliau-Beliau teman-teman kita dibawah tidak bisa menjangkau kita di Jakarta.

Yang terakhir Bu Menteri mohon bantuannya untuk sarpras teman-teman PKH yang ada di lapangan itu untuk bisa dibantu dalam kondisi Covid. Ini sekali lagi saya sampaikan agar tetap bisa bekerja maksimal. Jangan sampai karena Covid ini teman-teman juga tidak bisa bekerja tetapi kita tuntutan tanggung jawabnya.

Saya kira itu saja Bu Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen dan Pak Dirjen, Pak Ketua yang selalu berfilosofi.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Hidup senantiasa nikmat kalau sudah hidupnya beragama, hidupnya ada batasannya senantiasa mendapat petunjuk, dan pada akhirnya ini adalah satu-satunya Anggota kalau nanya agak lama tapi kalau tidak dia nanya perasaan tidak sempurna rapat ini, karena memang namanya juga Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ketua, dan Anggota, serta Bu Menteri, bersama jajarannya.

Saya ingin menyampaikan satu kesedihan saja Bu Menteri. Tahun'40 harimau Bali dinyatakan punah, Tahun'80 harimau Jawa dinyatakan punah. Prediksi kita Tahun 2050 harimau Sumatera punah. Setiddak-tidaknya kalau

kita memegang patokan prediksi ini setidaknya-tidaknya 30 tahun lagi harimau Sumatera akan punah. Artinya Indonesia akan kehilangan hewan yang paling berharga yang paling langka dan paling berharga di dunia ini. Nah tentunya Bu Menteri mengertilah apa sebabnya dia punah, dan ada sebabnya dia langka dan segala macamnya. Tapi patut dicatat bahwa di Indonesia ini keanekaragamannya sangat banyak dan terkaya di dunia. Sebagai parameter harimau sudah langka berarti hewan-hewan lain juga, flora dan fauna yang lainnya juga mengalami tingkat kelangkaan yang luar biasa juga. Bu Menteri mungkin tahu itu salah satu sebabnya karena adanya deforestasi yang luar biasa dan berlebih-lebihan. Data terakhir Indonesia ini mengalami penyusutan hutan sebanyak 680.000 hektar per tahun. Apabila tidak disertai dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah dan alih fungsi lahan dan hutan tidak bertambah maka pengurangan itu sebesar 680 itu mungkin itu sudah menjadi given, tapi kalau ini terus diadakan maka jumlah penyempitan hutan akan semakin melebar. Begitu Bu Menteri. Nah ini persoalan kehutanan kita Bapak/Ibu. Jadi Bangsa Indonesia mestinya melalui Kementerian ini menyatakan deklarasi bahwa Indonesia sudah berduka dengan hutannya yang semakin menyempit, kemudian hewan langkanya juga semakin berkurang, dan tidak ada lagi yang dibanggakan di Indonesia ini terhadap hutan kita. Oleh karena itu saya minta supaya ini juga karena akibat kebijakan kita. Ada 40,7 juta hektar hutan yang dikelola oleh swasta. 95,7% diserahkan kepada swasta pemodal besar. Dan hanya 1,7 juta dari 40,7 juta hektar hanya 1,7 juta hektar yang dikelola oleh masyarakat kecil yang dia hanya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Saya pikir ini adalah tidak seimbang. Inilah yang menyebabkan hutan kita semakin menipis, semakin menyempit karena disitu juga illegal logging, ada illegal fishing, ada illegal mining, dan segala macamnya disana terjadi illegal besar-besaran. Dan kalau kita melintas di atas Sumatera sekarang Bu Menteri, di atas udara itu banyak kawasan-kawasan yang sudah tidak ada lagi hijaunya. Di Daerah katakan di Indarung Kota Padang itu kalau kita menyaksikan jalan dari Padang ke Solok itu kita lihat betapa semakin cepatnya terjadi penyempitan hutan lantaran disitu ada pabrik yang senantiasa yang mengeruk bahan-bahan untuk keperluan industri. Dan tidak ada upaya-upaya untuk bagaimana menghijaukan lahan itu. Sampai sekarang Bu Menteri, itu sudah bertahun-tahun saya lihat tidak ada upaya penanaman disana, pemulihan dan segala macamnya. Ditambah lagi misalnya beberapa waktu yang lalu ada harimau Sumatera yang diperangkap, saya tidak tahu dimana dilepasnya. Semestinya kan dia dilepas di hutan yang sebenarnya tapi saya dengar informasinya dilepas di tempat yang lain dan kabarnya juga itu sudah ditangkap oleh para yang penunggunya. Saya pikir kata yang menunggunya ini sudah mengertilah Ibu Menteri. Jadi saya tidak mengerti harimau Sumatera yang tertangkap kemarin itu sudah 2 Bu Menteri dari 3 yang sudah berkeliaran, 2 yang sudah tertangkap, dan saya tidak tahu dimana itu dilepasnya harimau. Kalau ini ternyata 2 harimau ini dilepas tempat yang lain dan lalu ada yang menunggu disana berarti sudah semakin berkurang juga jumlah harimau kita. Yang sekarang ini di Sumatera jumlah harimau itu hanya 350 sampai 400 ekor. Jadi pas waktu menjelang 30 tahun kedepan jumlah sebanyak ini barangkali saya pikir rasional juga dia akan mengalami kepunahan Bu Menteri. Lantaran kita tidak juga memperbaiki kondisi hutan kita.

Nah saya minta Bu Menteri, didalam dokumen-dokumen Bu Menteri yang sudah pararkan di Komisi IV ini saya pikir sangat logis, tetapi saya tidak cukup mendengarnya hanya diruangan ini saja. Tapi saya ingin supaya hutan-hutan yang gundul ini tumbuh kembali dan habitat dari harimau dan flora-fauna kita bisa tumbuh berkembang lagi. Itu saja Bu Menteri permintaan saya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dan kita akan masuk lagi ke. Ini kan alam marcapada kalau di wayang. Kita akan masuk ke alam mayapada. Halo silakan yang di alam mayapada. Ada Pak Budi Djiwandono dan ada Pak Kyai Asep Maoshul.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya minta Pimpinan tadi saya minta permintaan untuk bicara.

KETUA RAPAT:

Oh, belum Bapak?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Belum.

KETUA RAPAT:

Oh iya. Baru masuk lagi sih Bapaknya.

Silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Bu Menteri, Pak Wamen, Pimpinan dan teman-teman sekalian.

Kemarin kita dengan Kementerian Pertanian sempat bicara mengenai masalah hutan, perambahan hutan di Kalimantan. Ada pernyataan bahwa ada sawit yang masuk di kawasan hutan itu sekitar hampir 1 juta hektar atau minimal 800.000 hektar. Ini apa memang dibiarkan atau memang untuk kepentingan petani ataukah memang ada untuk kepentingan orang-orang tertentu sehingga bisa sejauh itu bisa merambah kawasan hutan untuk penanaman sawit. Ya kalau 100, 1000 hektar saya kira, tapi ini sejauh kurang lebih 800.000 sampai dengan 1 juta hektar. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah program TORA, yang Ibu Menteri pada pertemuan yang lalu kami sudah sampaikan, dan mungkin juga sudah Ibu tindaklanjuti. Hanya saja petugasnya tidak memahami dilapangan. Saya kasih tahu bahwa Kantor Kominfo di Sulawesi Barat itu masuk kawasan hutan, dan banyak lagi perumahan yang ada disitu yang masuk kawasan hutan. Saya kira ini juga dipertahankan tidak ada gunanya, dan saya kira juga telah bersertifikat perumahan-perumahan itu saya kira dikeluarkan saja, tidak usah terlalu jauh dipertahankan karena juga sudah bukan kawasan hutan lagi bahkan Kantor Pemerintah.

Demikian juga mengenai masalah PB sawit yang, Gakkum sudah stafnya turun, hanya tindaklanjutnya belum, mungkin kita akan jadwal ulang untuk turun bersama ya supaya kita betul-betul tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat terhadap kepentingan pelaku ekonomi besar. Saya kira apa yang dikatakan Pak Hermanto tadi tentang keadilan didalam pemanfaatan hutan, kita rasakan bahwa memang rakyat hanya mendapatkan limbahnya saja, dan bukan hanya rakyat tapi juga binatang-bintang yang harusnya dilindungi tetapi korban demi untuk kepentingan ekonomi. Saya kira solusi yang ditawarkan oleh Kementerian KLHK adalah perhutanan sosial. Saya kira ini perlu terus kita support agar rakyat juga bisa mengambil peran didalam pemanfaatan hutan, saya di Mamuju itu banyak menggunakan nilam. Saya ada janji dengan Pak Bambang tapi dia belum turun dia punya penyulingan nilam. Saya kira mohonlah supaya bisa diarahkan untuk nilam ini di Kabupaten Mamuju.

Yang terakhir Inhutani, ada Direktur Inhutani ya Pak ya. Setahu Inhutani broker. Karena saya didaerah saya ada sekian puluh ribu areal Inhutani tetapi satu pun alat beratnya Inhutani tidak pernah saya lihat. Dia dapat RKT, tetapi RKT-nya diserahkan kepada orang lain untuk dikelola. Saya ingin pertanyakan, bagaimana kedudukan Inhutani ini apakah sama juga dengan PTPN-PTPN yang lain yang rugi, dan apa kontribusinya Inhutani terhadap PNPB kalau PTPN-PTPN yang lain kan kita tahu dia rugi semua, apakah juga Inhutani rugi semua. Saya kira Inhutani tidak akan rugi karena dia hanya memiliki ijin HPH dan ijin yang lainnya, kemudian dikontrakkan kepada orang lain untuk diambil kayunya dan lain sebagainya, dan dikatakan menanam kembali saya tidak pernah melihat pembibitannya. Oleh karena itu saya minta laporan dimana kedudukannya sekarang Inhutani, apa rugi atau untung, dan sejauhmana partisipasinya kepada negara.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Kita sudah dari dunia bumi, sekarang ke dunia langit ke alam mayapada. Halo yang didunia maya, Pak Budi Djiwandono.

Bapak mau nanya apa, mau panjang atau pendek, saya yang punya kuasa hari ini.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Dedi.

Pimpinan, rekan-rekan Komisi IV yang saya hormati,
Bu Menteri, Pak Wamen dan jajaran KLHK yang saya hormati juga,
Selamat sore.

Saya ucapkan apresiasi kepada Bu Menteri dan jajarannya yang sudah mendapatkan capaian-capaian yang patut dibanggakan untuk kita semua. Kalau Bu Menteri ingat di Rapat Kerja terakhir saya sempat mengingatkan bahwa ini adalah kesempatan kita semua untuk benar-benar menjalankan beberapa program atau pun dorongan, salah satu yang saya soroti kemarin adalah pengelolaan sampah. Saya hanya ingin mempertegas saja tadi dari Bu Ema dari PKB, akan pentingnya edukasi mengenai pengelolaan sampah. Tadi saya lihat dari bahan yang dipresentasikan saya sangat senang bahwa norma-norma misalnya pemilahan sampah itu yaitu menjadi salah satu dari bagian perjuangan Bu Menteri dan jajarannya. Ini dengan edukasi apakah itu melalui edukasi formal, sekolah-sekolah atau kerjasama dengan PKK misalnya, disini ada Ibu Julie mungkin bisa membantu juga (Rekaman Terputus). pengelolaan sampah sangat penting, edukasi Bu Menteri. Saya dorong semoga sosialisasi ini bisa benar-benar dijalankan sampai ke kalangan kita komunitas rumah-rumah, Rt-Rt yang ada di Indonesia. Ini saya sangat sangat ingin mendorong Bu Menteri dan Bu Dirjen untuk melaksanakan program ini.

Kemudian kita apresiasi bersama. Kemarin Ibu Menteri mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Norwegia dan dipaparan yang Ibu Menteri sajikan kepada kami juga isu-isu aktual yang disajikan, salah satunya adalah kualitas udara. Kalau Ibu Menteri ingat di periode lalu saya sempat juga menyuarakan kualitas udara yang di musim kemarau ini biasanya mengalami keburukan. Tadi saya lihat dari data yang disajikan Bu Menteri yang disaat PSBB berlangsung di Kota-Kota Besar seperti Jakarta, dan sebagainya kualitas udara membaik, tapi begitu PSBB dicabut kualitas udara ini mulai jelek lagi. Pertanyaan saya ini, kedepannya mau bagaimana? Saya ingin

mendorong Bu Menteri dan jajaran untuk melakukan terobosan supaya kita bisa benar-benar memitigasi masalah kualitas udara ini. Mengingat salah satu pilar penting dari perjuangan Bu Menteri juga adalah perlawanan mengenai *climate change*. Saya beberapa minggu terakhir ini banyak mengikuti berita berkembang sekali. Adanya *development* mengenai Hutan Kota, miniatur Hutan Kota yang dipelopori oleh ilmuwan dari Jepang ..., mungkin Ibu Menteri juga tahu dan jajaran juga sudah tahu. Dimana mereka dan dimana dia benar-benar mendesain sebuah model Hutan Kota dimana penanaman dengan ... local, dengan yang padat itu dengan area tanam yang tidak besar, tidak lebih besar dari lapangan tenis ini bisa benar-benar menjadi terobosan untuk memitigasi masalah lingkungan khususnya kualitas udara, dan juga miniatur hutan kota ini kalau di tanam dengan metode yang benar ini bisa mengembangkan keanekaragaman hayati, biodiversity di areal yang kecil. Ini saya rasa kalau bisa diterapkan ya di Kota-Kota Besar seperti Jakarta ini alangkah baiknya. Ini bisa mempercepat tujuan-tujuan kita, tujuan sdgs kita dan bisa mungkin mendapat penghargaan lebih banyak lagi didalam arti penanggulangan *climate change* Bu Menteri. Di negara-negara seperti India, di Amerika Selatan bahkan di Eropa sudah banyak di Kota-Kota ini yang menerapkan miniature forcity ini ya dikembangkan metode Miyawaki. Moga-moga ini bisa menjadikan contoh, itu ada areal besar di lapangan DPR siapa tahu bisa menjadi demplot atau areal contoh supaya kita tanam dengan secara alami.

Kemudian Bu Menteri tadi sempat juga mengemukakan masalah biopiracy, bioprospecting. Ya saya Cuma ingin mengingatkan Bu Menteri punya banyak asset dilingkungan KLHK yaitu baik Balibang KLHK yang tersebar diseluruh Indonesia. Saya ingin memberi contoh saja di Kalimantan Timur ada yang namanya herbarium wanariset, ini salah satu Balitbang KLHK yang menyimpan banyak sekali data-data mengenai tanaman-tanaman yang ada di Kalimantan. Ya moga-moga ini nanti bisa menjadi kekuatan Bu Menteri untuk kedepannya kita mengatasi masalah-masalah seperti biopiracy dan juga bioprospecting supaya kita bisa mengoptimalkan asset-asset dari tanaman-tanaman dan keanekaragaman hayati yang kita miliki.

Dan terakhir Bu Menteri dari saya mengenai isu perambahan hutan atau areal kawasan hutan. Dengan maraknya isu Ibukota negara ini didaerah Pemilihan saya kebetulan Kalimantan Timur ya saya terakhir bulan Februari melakukan kunjungan ke beberapa areal termasuk kerja Dinas Kehutanan Provinsi khususnya di area Samboja, itu banyak sekali masyarakat-masyarakat dari luar Kalimantan Timur yang datang untuk mulai mematok-matok dan merambah di areal hutan yang diduga akan menjadi bagian dari Ibukota Negara ini. Saya minta Bu Menteri dengan jajarannya ini menjadi perhatian khusus dengan koordinasi yang baik, dengan kerjasama antara Bu Menteri dan juga Pemerintah Daerah, aparat kepolisian kita benar-benar perlu menegakan masalah ini sebelum hutan-hutan ini yang mengelilingi nanti calon Ibukota Negara kalau memang jadi pindah ini menjadi rusak.

Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan.

Sekali saya terima kasih. Saya apresiasi kerja Bu Menteri, semoga penyerapan anggaran di KLHK bisa dioptimalkan, dan saya kembalikan ke Pak Dedi, dan para Pimpinan yang lain.

Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Budi Djiwandono yang sekarang berada di dunia maya. Sebentar lagi mudah-mudahan akan turun di dunia nyata dan bagaimana nikmatnya di dunia nyata itu. Dan ini ada tokoh kita dari Selatan Jawa Barat yang paling berani kalau turun ke jalan itu, Pak Kyai Haji Asep Maosul. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Dan kalau sudah tidak ada, kita selanjutnya diberikan kembali ke Pimpinan disamping kiri saya.

KETUA RAPAT (SUDIN S.E./F-PDIP):

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan jawabannya. Nanti setelah Ibu menjawab baru bertanya lagi.

Silakan Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati,

Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas berbagai catatan. Di catatan saya ada 31 halaman dari 27 yang terhormat Anggota dan Pimpinan.

Pimpinan yang kami hormati,

Saya akan menyampaikan jawaban secara highlight dan saya kira nanti akan kita siapkan yang tertulis Pak Ketua. Pertama, tentang museum. Dimana offset satwa itu sekarang masih ada rata-rata di UPT. Dan museum, kami sudah bicarakan dengan Pak Wamen dan Pak Sekjen. Kita akan coba ambil tempat. Kita siapkan, pertama tentu sebelum gedungnya ada, materialnya dulu kita *collect*. Kita punya tempat yang baik di Cimanggung ya, di Rumpin Pak Ketua. Nanti kita lihat etalasenya dimana nanti, tapi museumnya bisa di sana.

Kemudian yang kedua, saya menyampaikan ucapan terima kasih dulu atas apresiasi mengenai karbon, dan itu dikaitkan dengan penurunan karbon karena kita sudah berupaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, dan itu record untuk tahun penurunan dari 2016 ke 2017. Oleh karena itu, ini terkait dengan deforestasi. Saya ingin menyampaikan kepada Pimpinan yang terhormat dan Anggota Komisi IV DPR RI, tidak benar bahwa sekarang deforestasi kita 680.000 Pak Hermanto. Itu angkanya sudah di 340 ribuan itu di Tahun 2018. Memang angka 680.000 itu angka di 2015 masuk ke 2016. Sebelumnya Pak Ketua dan Bapak/Ibu yang kami hormati, itu angkanya 1,2 juta per tahun Bapak di periode-periode sebelumnya. Dan di 2016 lalu menjadi 680, kemudian 2017=340, di 2018 juga angkanya masih sekitar 340 ribuan, dan kita masih terus bekerja keras untuk masalah deforestasi ini. Kenapa terjadi begitu beratnya deforestasi, karena ini akumulasi juga dari seluruh persoalan yang terjadi belasan tahun atau puluhan tahun. Bedanya sekarang kita melakukan aksi-aksi korektif yaitu dengan cara *law enforcement*, penegakan hukum, kemudian hutan sosial, TORA dan sebagainya. Mengajak serta masyarakat didalam hutan dalam pengelolaan hutan itu ternyata memang menjadi begitu sangat positif. Memang dalam kurun waktu 4-5 tahun belakangan ini masih banyak yang harus kita perbaiki. Makanya tadi saya mengatakan bahwa Rapat-Rapat Kerja seperti ini akhirnya menghasilkan konsep yang komprehensif. Jadi kami juga merasa sangat terbantu dengan pemikiran yang baik dan kita *develope* konsepnya sambil implementasi lapangannya. Saya *very much welcome* untuk semua untuk terhormat Anggota dan Pimpinan untuk melihat bagaimana kondisi lapangannya.

Kemudian yang sonokeling Pak Ketua sudah diturunkan Gakkum, ketahuan 20 kasus dan sudah ada langkah-langkah hukum acaranya, dan 31 tersangka itu sudah berproses sekarang. Dan tentang simpul-simpul untuk pengendalian dan kerjasama karantina itu kita lakukan didaerah-daerah perbatasan terutama Natuna, Entikong, Aru dan sebagainya. Jadi yang sudah disiapkan sudah setengah jalan dan agak matang itu di Bakauheni. Jadi itu sudah kita lakukan.

Saya meminta kepada kawan-kawan Pak Sekjen, dan Litbang terutama dari catatan yang terhormat Pak Dedi bahwa memang konsepsi tentang hutan itu kita mungkin perlu lihat betul secara akademik. Kalau Bahasa operasional secara gampang yang disebut hutan itu apabila kira-kira 10-25 meter², tinggi pohonnya 3 meter, kemudian kanopinya ketemu. Kalau kanopinya tidak ketemu itu belum disebut hutan, misalnya seperti itu dan lain-lain. Nah tadi yang menarik adalah kalau HTI itu bukan atau bukan? Karena Hutan Tanaman Industri jadi memang ditanam, jadi ditanam jati, ditanam apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu saya kira secara akademik saya meminta Pak Sekjen tolong dibahas bersama Dewan Kehutanan Nasional dan Litbang, dan nanti akademisi kampus. Karena kalau sekarang memang memakai kategorisasi di Undang-Undang 41 yaitu hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Jadi masih seperti itu.

Kemudian kami juga memahami dan sangat sependapat yang terhormat Pak Dedi bahwa penghargaan harus diberikan kepada local

champion. Jadi memang kalau lihat posisi Indonesia sekarang memang utamanya mesti di *local champion*. Jadi itu sudah dicoba dikembangkan. Oleh karena itu tadi, Anggota yang terhormat mengusulkan untuk hutan sosial ada lomba dan sebagainya kita sudah ada sebetulnya, sudah mulai dirintis. Ini tahun ke-2 ya Pak Dirjen ya? Sudah lewat 2 tahun, ini mau tahun ke-3, kerjasama dengan Tempo, jadi dipilih tokoh-tokoh perhutanan sosial, selain itu untuk tokohnya. Selain itu ada festival pesona ya. Nah nanti saya akan minta lagi Pak Dirjen untuk ikuti terus pola *reward* apalagi yang bisa kita kembangkan.

Saya juga berterima kasih, tadi usulan untuk *eco edu forest*. Jadi kalau lihat sekarang terutama di Jawa, dan juga di beberapa kota di luar Jawa itu yang sudah benar-benar memanfaatkan *scenic beauty* (pemandangan yang indah) serta alam yang baik untuk kepentingan pariwisata tetapi sekaligus pendidikan. Sebetulnya sih perintah Bapak Presiden kepada saya untuk sebetulnya setiap Provinsi itu punya Kebun Raya. Pundi kayu mungkin contoh yang baik, dia dekat Kota dan sangat bagus. Saya sebetulnya sedang berusaha supaya pundi kayu ini mendapat dukungan dari CSR-nya BUMN supaya makin keren, sebab tempatnya relative baik tapi memang fasilitasnya masih relative kurang. Nah *eco edu forest* ini menjadi sangat penting untuk pendidikan masyarakat kita terutama anak-anak. Kami sudah mencatat usulan-usulan terkait dengan Bank Sampah dan tadi berbagai fasilitas yang perlu ditindaklanjuti dan kita akan *record*, dan ini nanti akan kami jelaskan secara tertulis.

Terkait dengan Gunung Leuser, saya sebetulnya dengan surat-surat Pak Gubernur itu sudah mengirimkan surat ke KemenpanRB tetapi berarti ini adalah perubahan organisasi walaupun di kotaknya kotak Eselon II. Pada saat sekarang sedang dibahas struktur organisasi Kementerian yang baru termasuk yang Eselon II. Oleh karena itu saya sebetulnya berharap sih mungkin dalam 2-3 bulan ini sudah bisa selesai yang untuk permintaan Balai TNGL. Balai Besar itu Eselon II, itu ke Aceh.

Kemudian terkait dengan kawasan ekosistem leuser. Itu memang sudah ada Keppres sebetulnya Tahun '98 Nomor 33, luasnya 2 juta Pak Ketua. Kalau sekarang sudah 800.000 dan diantara 800.000 itu ada mungkin 18 ribuan sampai 20 ribu yang areal terbuka yang bisa untuk kemitraan dengan masyarakat. Tadi atas permintaan yang terhormat Anggota dari Aceh saya akan minta ini Pak Dirjen untuk meneliti lagi, terutama dalam kaitan dengan soal-soal kewenangan dan lain-lainnya.

Terkait dengan usulan yang terhormat Ibu Julie, untuk serat. Saya akan cek kalau kapas itu apakah kehutanan, apa pertanian. Tapi pilihannya yang lain yaitu eucalyptus. Eucalyptus itu serat yang panjang, dan kalau mau dilihat contohnya bisa di RAPP di Riau.

KETUA RAPAT:

Eucalyptus itu bukan yang Pak Menteri Pertanian pakai bukan?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Namanya sama tapi kayunya. Jenisnya lain, yang ini buat serat Pak Ketua. Spesiesnya beda. Ini eucalyptus untuk serat. Jadi kalau di Sritex di Solo itu juga nanti bisa dilihat. Kalau yang terhormat Anggota berkenan untuk melihat kita akan memfasilitasi. Itu sudah dipakai untuk baju tentara (Army), termasuk *army piece*. *Piece skipping army* juga kalau tidak salah pakainya baju dari situ dan seratnya dari eucalyptus. Jadi nanti kalau mau dilihat contohnya dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kami mendukung untuk fasilitasi kepada masyarakat di tingkat *grass road* Pak Ketua, karena saya kira memang harus bermanfaat keberadaan kita.

Kemudian soal fee legal, Permendag 84 yang terhormat Ibu Luluk tadi yang menanyakan kalau tidak salah. Struglennya buat KLHK cukup berat untuk ini. Dan ini dikeluarkan secara sepihak oleh Kementerian Perdagangan tetapi masalahnya sudah selesai. Waktu saya melapor kepada Bapak Presiden dan bersama-sama Menlu karena tadi yang terhormat Ibu Luluk juga menyampaikan bahwa ini sudah ada perjanjian ini, perjanjian itu dan lain-lain. Dan beberapa indikasi pelanggaran bisa terjadi disitu sehingga kami appeal kepada Bapak Presiden untuk minta arahan, akhirnya Permendagnya dicabut dengan nomor Permendag Nomor 45. Jadi sudah selesai Ibu Luluk. Permendag Nomor 45 sudah mencabut Permendag Nomor 84.

Kemudian soal waduk dan sungai. Pak Ketua, saya minta maaf paling saya bisa meneruskan kepada Menteri PU. Karena ada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air disana, dan ada Direktorat Sungai dan mereka punya Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi itu otoritasnya ada disana. Dan untuk tanah yang di Kota Asmat pada dasarnya sih kalau kehutanan sekarang dengan posisi keberpihakan pada masyarakat, itu sedapat-dapatnya kalau ada masyarakatnya itu kita coba keluarkan kecuali kalau di konservasi itu harus dicarikan jalan keluarnya dengan kemitraan. Oleh karena itu yang di Asmat sudah diproses untuk TORA tetapi masih menunggu rekomendasi dari Bapak Gubernur.

Kemudian tentang 20% kebun sawit. Ini nanti penyelesaikan di RUU CK, sebab di 2 Undang-Undang itu berbeda. Kalau sawitnya untuk rakyat kelihatannya bisa dilepaskan tetapi, karena Undang-Undang 41 saya yang terhormat Pak Darori sangat paham bahwa dia bisa juga non litigasi. Tetapi ketika ada Undang-Undang 18'2013 di address untuk swasta, untuk corporate itu agak berat hukumannya tetapi akhirnya Undang-Undang ini dipakai justru yang kena masyarakat-masyarakat kecil, pakai Undang-Undang yang 18'2013. Oleh karena itu terkait dengan 20%, sawit didalam hutan dan lain-lain ini nanti penyelesaiannya di RUU Cipta Kerja Pak Ketua. Oleh karena itu RUU itu sebetulnya untuk KLHK juga menjadi relative penting.

Kemudian untuk kawasan Taman Wisata Alam, dan lain-lain. Ini dengan pola *New Normal* itu kita sudah coba menyusunnya dan sudah di declare dari 54 taman nasional dan 133 kalau tidak salah taman wisata alam, itu yang semula ditutup semasa Covid sekarang sudah 29 kita *declare* boleh dibuka. Tetapi tetap harus menunggu progress dan dinamika kerawanan

Covid, sebab ternyata daerah-daerah itu kerawanan Covidnya juga sangat dinamis. Sekarang mungkin Pak sudah 7 atau 8 karena saya tiap hari minta bagaimana progressnya. Jadi dari tanggal 20-an Juni sampai dengan pertengahan Juli ini diproyeksikan sebetulnya 29. Kalau nanti ada yang sudah stabil juga dan daerah kerawanan Covid-nya relatif membaik itu juga bisa dikembangkan.

Terkait dengan pabrik semen. Karena menyangkut juga persoalan *supply* dan *demand* semen, kami berkonsultasi juga kepada Kemenko Perekonomian (Pak Menko), dan juga BKPM.

Kemudian kami mendukung untuk Parado tadi disampaikan oleh yang terhormat Pak Rudi dan juga tadi disampaikan bahwa kita akan mendukung ini, karena pada dasarnya kayak di Sumatera Barat misalnya peraturan-peraturan adat itu justru bagus Pak Ketua. Pak Dedi yang terhormat saya kira lebih paham tentang ini. Jadi saya kira diangkat lagi kearifan lokalnya, *benefit sharing*-nya, sistemnya. Mungkin secara konseptual bagian-bagian ini yang masih harus dikembangkan lagi untuk dirasakan manfaatnya buat rakyat. Jadi kita akan lakukan tetapi kalau di kawasan hutan lindung itu, dan hutan konservasi itu. Kalau hutan lindung tidak ada masalah tetapi kalau hutan konservasi mau diambil airnya untuk air minum itu ada Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 yang melarang pemanfaatan air di kawasan konservasi kecuali airnya untuk individu masyarakat. Jadi kalau dia berindikasi komersil, ijin komersil tidak boleh. Jadi ini kalau KLHK di konservasinya bisa kerjasama. Tapi kita sambil lihat bagaimana Undang-Undang Sumber Daya Airnya.

Saya akan cek yang lokasi di Perhutani yang terhormat Pak Haerudin tetapi Gakkum sudah turun dan kita sudah minta Pemda untuk menghentikan dan itu sudah dihentikan. Saya masih akan lihat bagaimana proses selanjutnya. Kalau lihat tadi arahan yang terhormat Pak Haerudin harusnya tidak boleh dilanjutkan lagi atau akan dilihat seperti apa. Oleh karena itu saya akan cek lagi, tetapi pada dasarnya kalau sekarang Pak Ketua itu sudah dihentikan.

Kemudian.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pak Ketua ijin.

KETUA RAPAT:

Masalah apa ini?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Yang berkaitan dengan hutan yang tadi.

KETUA RAPAT:

Tadi sudah dijelaskan sama Ibu sudah distop.
Mau diperdalam lagi?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Perdalam sebentar.

Cukup 2 menit.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Ibu Menteri,

Kita juga sudah terima Pak Gakkum tentang ini dihentikan dalam point 4, tapi kalau konteksnya sampai ada ijin. Nah tadi saya sampaikan adalah salah satunya hati-hati dalam mengijinkannya. Karena itu ada kesalahan jalur yang seharusnya lebih pendek malah diputar karena ada target ruang yang keatas. Kita ingin setelah itu ingin mendorong Cipura tadi taman nasional, biar tidak berubah lagi, tidak hilang lagi hutan gunung kita itu.

Terima kasih Bu Menteri.

KETUA RAPAT:

Ya lanjutkan Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Pak Ketua.

Pada dasarnya untuk menetapkan ijin itu ada 2 justifikasi. Pertama, justifikasi hukum, yang kedua justifikasi wilayah di lokasinya. Jadi disitu ada soal masyarakat, ada soal pertimbangan politik, Pejabat, dan lain-lain. Kami perhatikan Bapak.

Kemudian saya berterima kasih yang terhormat Pak Darori soal, terima kasih dukungan untuk LHK bahwa dikatakan kita tidak beres menangani satwa dan lain-lain. Saya juga menyayangkan tudingan-tudingan kepada Pemerintah tanpa data dan *Evidence Based*. Oleh karena itu saya meminta kepada para Dirjen untuk mengatasi hal-hal ini dengan memberikan data yang akurat, data yang lengkap, dan baik. Terus terang tidak mudah Pak Ketua dalam menghadapi hal-hal seperti ini itu menguras energi saya,

mungkin 40%-lah kira-kira. Tidak gampang tetapi termasuk bagian yang harus diselesaikan.

Saya terima kasih tadi dukungan dari yang terhormat Anggota bahwa konflik-konflik masyarakat dalam konteks kawasan hutan itu bisa diselesaikan dengan TORA dan hutan sosial, termasuk juga tadi yang terhormat Ibu Renny mengatakan soal edukasi masyarakat, karhutla dan operasi penyuluhan. Kita teruskan, kita lanjutkan tetapi memang khusus soal bagaimana mengembangkan masyarakat untuk mata pencahariannya. Jangan asal dilarang Pak Ketua, Bapak/Ibu yang terhormat, Bapak Presiden memang meminta kepada kami pada Rapat tanggal 23 yang lalu untuk mendalami tentang pengelolaan lahan tanpa bakar atau yang 2 hektar itu di Undang-Undang 32 Pasal 69 untuk ada jalan keluar. Kompensasinya apa? Pada dasarnya masa kalau di tanahnya sendiri kok dilarang misalnya seperti itu. Lalu kalau mau dikasih ini dong, substitusinya apa, kompensasinya apa begitu. Oleh karena itu, ini BRG sudah sebetulnya sudah mencoba riset-riset lapangan, eksperimen-eksperimen. Tapi saya kira ini sangat tepat seperti tadi didalam konsep penyelesaian permanen karhutla ini bagian penting yang mesti kita selesaikan Bapak. Jadi saya mohon dukungan terus termasuk pemikiran-pemikiran tentang hal ini.

Kemudian tadi dalam posisi. Ini yang terhormat Pak Dedi tadi menyampaikan soal bagaimana layer untuk desentralisasi. Memang didalam penegakan hukum bisa kita katakan belum banyak Pemda berani melakukan law enforcement tetapi sudah mulai di dukung oleh KLHK dan dalam hal misalnya ada permasalahan yang tidak diselesaikan oleh Pemerintah Daerah maka akan berlaku *second layer enforcement*. Jadi bisa ke Nasional. Kita sudah mencoba mendukung dengan membantu menyiapkan PPNS-PPNS memberikan latihan, kita memfasilitasi ke unit di Polri yang menyiapkan PPNS.

Saya akan cek soal luasan air sugihan, ini apakah tepat soal perluasan atau soal tata batas yang baru ketahuan. Oleh karena itu kami akan cek dan nanti jawaban tertulis.

Kemudian saya juga akan memfasilitasi bagaimana konflik-konflik gajah, bukan hanya di Aceh saya kira, di beberapa Provinsi yang lain juga. Kalau bisa jadi seperti di Tangkahan. Kalau gajahnya bagus, pemandangannya indah, ada sungainya, air atau apa itu harusnya memang bisa menjadi eco wisata yang baik. Termasuk penanganan illegal logging, penguatan kelembagaan ini juga kami perhatikan.

Kemudian soal mengapa target hutan sosial 12,7 juta tetapi sekarang baru 4,19 juta. Karena 12,7 juta hektar itu sebetulnya target ideal. Kalau 12,7 juta hektar itu selesai maka sebetulnya kombinasi antara ijin untuk swasta, dan ijin untuk rakyat itu kira-kira angkanya 30-70. Tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Hermanto juga tidak benar bahwa sekarang itu sudah atau masih banyak untuk swasta ijin-ijinnya sehingga hanya 1% yang untuk rakyat, enggak. Dalam catatan kami itu yang selama perijinan berpihak pada rakyat ini sudah 12% angkanya. Jadi sudah angkat dari kurang dari 5% sudah

menjadi 12%, dan kita berharap sebetulnya yang perimbangannya yang untuk rakyatnya makin banyak.

Kemudian tadi perlombaan sudah. Kita akan mendalami. Saya minta Pak Dirjen PSKL, tadi ada usulan untuk bagaimana bisa dilakukan penguatan nilai tambah misalnya dari kualitas madu dan lain-lain, nanti tolong dieksplorasi.

Kemudian soal 30% Provinsi itu ada di Undang-Undang 41. Dengan posisi itu saja sekarang sebetulnya seperti Provinsi seluruh Jawa itu kurang dari 30%, Lampung, Kalimantan Selatan, Bali, NTB.

KETUA RAPAT:

Saya rasa bukan kurang Bu, bahkan mungkin 20% pun tidak ada. Lampung pun tidak ada 20%, apalagi Jawa.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Jawa 18%.

KETUA RAPAT:

Jawa 18%, Lampung berapa?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Lampung tidak sampai 22 katanya. Tidak sampai 22%. Tapi saya pernah hitung waktu di Pemda 22%. Jadi yang tidak akan berkembang itu termasuk berarti seluruh Jawa, akan sulit kalau mau berdasarkan hutan, kemudian Bali, NTB, Kalsel, Lampung. Jadi kalau kita bikin per Kabupaten mungkin bisa lebih rumit, bisa lebih berat karena ada Kota-Kota atau Kabupaten yang kayak Lampung Timur mungkin hampir 80% dia hutan karena ada Way Kambas.

KETUA RAPAT:

Tidak ada Bu. Mungkin yang 70 sampai 80 persen itu wilayah I Lampung Barat, 2. Pesisir Barat itu mencapai 70, tapi kalau Lampung Timur tidaklah. Itu kan hanya ke potong Way Kambas saja. Lebihnya kan tidak. Pesisir Barat dan Lampung Barat menjadi 70.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Ijin Ketua.

KETUA RAPAT:

Habisin Ibu sebentar.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Terkait tadi Hutan Kota Ketua.

Jadi ijin Bu, mungkin karena Kabupaten/Kota masih punya tanah-tanah negara kita dorong Bu. Saya tahu masih banyak yang kurang tapi kita dorong pengalaman Adipura yang kita dulu kalau kita dorong dan berikan penghargaan saya yakin Pemerintah Daerah mau bersemangat.

Terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

Kemudian soal bawa perijinan edar satwa itu menjadi lama, saya akan cek ya ke Kepala BKSDA Bali. Nanti kita akan tanyakan, apakah betul sebetulnya. Karena sudah diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah Nomor 24) bahwa semua lewat BKPM untuk kepentingan integrasi administrative dan kemudahan. Harusnya sudah lebih singkat Bapak. Nanti kami akan cek.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Karena kembali ke Jakarta dulu Bu. Kalau kemarin dikeluarkan langsung dari Bali ke masyarakat lebih cepat. Nah sekarang beroperasinya ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Pak Adhi, harusnya melalui meja Pimpinan, tidak boleh motong begitu.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Siap salah Pak Ketua.

Terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

Saya akan cek nanti Kepala Balainya kita panggil saja, kita tanya apa masalahnya yang sesungguhnya. Tapi kalau soal bolak balik Jakarta sih kalau sekarang tidak sulit karena sudah online dan relatif cepat.

Kemudian Jambi, ini sebetulnya sudah. Ini juga kami akan cek, yang Jambi yang hasil pertemuan di lapangan yang terhormat Pak Dedi kayaknya yang mimpin nanti. Karena yang kalau dari swastanya yang melapor sudah diberikan fasilitasi sarana dan lain-lain tapi masyarakatnya bilang belum, dan saya akan minta Pak Dirjen cek. Itu juga akan ada IPAL tetapi akan ada

rencana untuk IPAL tetapi karena Covid kelihatannya jadi terhambat. Nanti kami akan cek lagi Bapak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Bu Menteri, ya kita jujur saja bahwa PT Sinar Mas itu kan kelihatan suka banyak masalah dari sisi penguasaan lahan, aspek lingkungan hidup, konflik dengan masyarakat. Sehingga kan dalam pandangan umum kok kuat amat nih, hebat amat nih, semua orang dibuat tidak berdaya, semua orang bikin takut. Karena kita datang langsung disitu, memang kan masyarakat disitu asalnya tangkap udang saja ..., tapi begitu limbahnya masuk mereka tidak bisa tangkap udang lagi terus kemudian mereka juga tidak bisa lagi berani bertanam karena dianggap lahan konsesi bahkan ada seseorang yang sudah beli tanah dari warga disana tidak bisa lagi ditanami. Nah pola-pola seperti ini menurut saya harus segera dirubah karena bagaimana pun bahwa mereka tinggal disitu ditanah leluhurnya tergusur, Ini yang kita maksud. Ini yang kita maksud. Saya selalu mengambil diri kita, bagaimana kalau diri kita digitukan sama orang pasti kita tidak terima. Termasuk kan kemarin walaupun sudah sekarang bebas karena dapat asimilasi yang kasus yang di Riau itu kan. Kan mirip juga.

Itu saja.

Terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Pada dasarnya sih posisi Pemerintah bahwa apabila itu untuk masyarakat maka sebetulnya oleh swasta harusnya dikeluarkan. Jadi kami akan cek Pak Dirjen PHPL nanti akan *update* lagi panggil. Nanti kita lihat Bapak, terima kasih catatannya.

Kemudian untuk masalah Mojokerto, Desa Bangun. Kita sudah bekerja bersama Pemerintah Daerah juga memberikan dukungan bantuan peralatan serta langkah-langkah untuk pengembangan sistemnya. Jadi memang itu kan masalah yang sudah sangat lama, rakyat mendapatkan pencahariannya dari situ tetapi sangat rawan. Jadi KLHK juga sudah bekerjasama dengan Asosiasi Bank Sampah di Jawa Timur, lalu bersama-sama sosialisasi, edukasi, dan akan dilakukan terus sampai dengan bulan Agustus nanti. Kemudian pendampingan kepada masyarakat dalam pembentukan Bank Sampah. Jadi pakai sistem lain. Jadi sistemnya kita perbaiki. Juga peralatannya didukung, dan untuk jangka panjangnya akan dibantu dukungan bersama-sama Menteri PUPR untuk pengelolaan sampah terpadu. Jadi akan makin baik, dan juga pusat daur ulang serta kita akan meminta CSR dari industri-industri disekitarnya itu atau yang memanfaatkannya itu untuk membantu masyarakat di Mojokerto Desa Bangun.

Kemudian KLHK didalam aturan dan regulasinya tidak menangani radioaktif. Jadi terus terang, waktu penanganan heboh-heboh kita tidak turun Pak Ketua karena didalam otoritas kegiatan kita itu tidak termasuk radioaktif.

Dan untuk Polhut, saya juga sama Bapak. Sama prihatinnya, harusnya kita bisa berikan yang terbaik tetapi soal formasi, soal gaji, keuangan dan lain-lain ini ada kaitan dengan Kementerian lain. Kami hanya akan mengusahakan saja.

Kemudian soal *fly ash*, *bottom ash*. Ini memang sedang banyak dibicarakan dan sedang kita coba selesaikan. Penggunaan batubara untuk PLTU itu menghasilkan limbah sisa pembakaran kira-kira 5% terdiri dari *fly ash* dan *bottom ash*. Komposisinya kira-kira *fly ash* 70%, *bottom ash* 30%. Kalau makin baik teknologi PLTU-nya maka limbah makin sedikit. Pada saat ini Tahun 2020, mungkin 2-3 minggu yang lalu sudah keluar Perment LHK untuk mempermudah pengelolaan limbah *fly ash*, kemudahan ini diharapkan merupakan jalan keluar bagi pengelolaan *fly ash*. Jadi *fly ash* dilakukan melalui pengecualian. Pengecualian, dia menjadi sumber bahan baku. Prosedurnya lebih efisien melalui pembahasan tim ahli yang independent, kemudian setelah pengendalian ditetapkan limbahnya tetap dikelola sebagai limbah non B3 tanpa ijin. Jadi boleh dipakai sebagai bahan. Jadi pengawasannya nanti akan ada. Pada hari Senin, ini masih akan dibahas lagi bersama PLN. Demikian Ibu.

Kemudian saya juga mendapatkan. Ini suratnya akan kita pelajari. Pak Bupati sudah minta kepada KLHK juga dan kita sedang lakukan evaluasi. Kalau perlu dicek, ijin-ijin itu dicek kembali dan di amendem, dikurangi dan sebagainya. Jadi kami akan melangkah untuk ini.

Dan terkait dengan gambut yang terhormat Ibu Kiki. Memang Sumatera itu gambutnya itu 9,65 juta hektar. Dan Kalimantan itu 8,79 juta hektar. Disisi lain karbon gambutnya sudah potensial. Jadi saya sependapat dan kita kerja keras untuk menjaga gambut ini. Terima kasih atas dukungan Komisi IV.

Dan soal Balai Benih itu, memang hanya ada 2. Tugasnya terutama untuk mendukung Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS. Apa yang didukung yaitu sertifikasi benihnya dan juga penelitian untuk benih-benih baru dari alam. Jadi itu tugasnya.

Kemudian untuk kebon bibit kemiri, dan peralatan dan lain-lain nanti saya akan cek. Kemudian untuk dukungan prasarana juga.

Tadi soal deforestasi dari yang terhormat Pak Hermanto. Tadi saya sudah jawab Pak, dan untuk sawitnya saya juga ingin menegaskan bahwa lagi-lagi ini adalah masalah akumulatif dari proses yang begitu panjang, kemudian sudah ada Inpres. Jadi kalau sekarang sudah tidak ada ijin baru lagi Bapak untuk sawit selama 3 tahun sejak 2018. Dan ijin-ijin pelepasan itu sebenarnya paling banyak di 2004-2014 Bapak. Di era kami sudah kita kendorkan banget. Itu sampai 9 juta hektar yang ijin-ijin yang dilepaskan dan

untuk ijin hutan tanaman. Itu diantara 9 juta itu kira-kira 6 jutaan ada yang digambut. Jadi sebetulnya cerita-cerita lalu itu relatif berat dan sekarang sudah mulai kita atasi Bapak. Jadi disisi lain memang Gakkum juga kita kuatkan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Interupsi Pak Ketua.
Sedikit saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN S.E./F-PDIP):

Iya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Silakan Bapak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Jadi saya ingin supaya seperti yang disampaikan oleh Pak Suhardi Duka tadi ada prinsip keadilan dalam hal mengelola kehutanan ini. Jadi dari 40 sekian juta hektar itu, itu kan Rakyat disekitar hutan itu hanya diberi kesempatan 1,7 juta hektar. Artinya sekitar 4%-lah dari total 40-an juta itu. Saya pikir ini kita merasa terganggu rasa keadilan kita, perhatian kita kepada masyarakat kecil.

Begitu saja Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kalau lihat datanya sih sekarang sudah 4,2 Pak Ketua ditambah yang TORA yang 2,6 Bapak. Jadi sebetulnya presentasinya sudah jauh lebih baik. Kalau tadi disampaikan yang terhormat Pak Hermanto bahwa kurang dari 5%, sekarang sudah hampir 12% Bapak kita sudah hitung. Dan kita berharap bahwa nanti di akhir kalau TORA dan hutan sosial ini jadi maka kira-kira bisa hampir 30% ke rakyatnya. Jadi prinsip keadilannya memang kita pegang Bapak. DI HTI-HTI misalnya kita perkuat banget bahwa 10% itu adalah kawasan kehidupan bersama masyarakat lindung dan kawasan kehidupan. Jadi tidak kita perketat Bapak terutama dengan regulasi dan dengan pengawasan perijinan.

Kemudian tentang satwa sebetulnya nanti akan tertulis saya kira ya, nanti Dirjen akan melengkapi ini juga proses akumulasi yang begitu panjang terjadi fragmentasi habitat gara-gara perijinan. Ini yang sedang kita tata. Sekarang KLHK sedang menyusun daerah-daerah perijinan yang masih baik hutannya, istilahnya yang *high conservation value* itu untuk kita pertahankan supaya ada koridor satwanya. Satwa-satwa yang keluar dan ditangkap, itu sebetulnya ditangkap dan dirapihkan. Tetap memang habis ditangkap dia harus dikondisikan dulu Bapak, dan prosesnya sangat terbuka, dan saya kira

tidak ada penyimpangan untuk ini. Kalau dari ketahuan ya berarti kena hukumlah, begitulah kira-kira Bapak. Jadi data yang ada yang kami berikan yaitu yang dilakukan dan nanti langkah-langkah dilapangannya atau bukti-bukti lapangannya bisa dilihat saja bersama-sama Bapak. Saya kira tidak ada masalah, kita akan lakukan bersama-sama.

Kemudian soal Inhutani, nanti saya akan minta tertulis saja bagaimana posisi Inhutani.

KETUA RAPAT:

Bu Menteri, saya minta Inhutani kan Dirutnya datang nanti langsung dijawab saja tidak apa-apa. Itu tidak masalah.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ya oke langsung dijawab saja.

Terima kasih.

Yang saran untuk Hutan Kota kami perhatikan. Karena memang ada PP sebetulnya untuk Hutan Kota itu Cuma saya lupa PP Nomor berapa, sudah lama waktu ada kejadian di DKI Monas itu. Itu ternyata ada PP yang mengatakan bahwa 10% itu harus ada Hutan Kota begitu. Kalau DKI masih 1% tidak sampai. Jadi kami akan perhatikan. PP 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Itu ada kewajiban sebetulnya. Jadi saya berterima kasih untuk itu dan saran-saran yang lain-lain akan kami perhatikan dan kami tindaklanjuti.

Terima kasih atas berbagai pandangan dan pemikiran yang konstruktif dari Ibu dan Bapak Anggota, dan yang terhormat Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Dirjen KSDAE, tadi pertanyaan Pak Gus Adi nanti langsung disampaikan ke Beliau supaya dapat informasi yang jelas.

Mbak Luluk masih mau bertanya? Jangan berkaca terus Mbak.

F-PDIP (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Iya dan bukan bertanya.

Jadi mohon ijin Ketua karena menerima WA dari petani Simalingkar dan mohon untuk dibacakan di forum ini. Jadi mohon dengan hormat Ibu Menteri untuk sekedar saya membacakan dan ini tidak panjang. Jadi ini WA-nya Pak Ketua, "jadi disaat petani sudah berjalan kaki mulai tanggal 25 Juni Bu Menteri hingga dengan sekarang ini sudah ratusan kilometer jalan yang ditempuh bahkan sudah dapat perhatian dari Wakil

Menteri Agraria, lalu Komisi II, ada Anggota Komisi IV, lalu Komisi VI, dan kepada Staf Kepresidenan juga. Akan tetapi ternyata pihak PTPN II di mana kami memiliki konflik dan anak perusahaannya tetap saja melakukan terror dengan cara membakar rumah warga kami di Simalingkar pasca kami 3 hari jalan kaki, dan sekarang dengan terror pemanggilan warga dengan dalih bahwa kami menempati area orang lain tanpa seijin pemegang hak atau yang dikuasakan, dan tepatnya hari ini tanggal 8 Juli mereka meneror dengan surat perintah pembongkaran rumah-rumah warga dan mengosongkan area. Ini merupakan bentuk terror yang terus menerus dirasakan oleh petani dari Tahun 1970 hingga saat ini. Dan inilah sebenarnya yang memaksa kami petani Simalingkar dan rela berjalan kaki dari Medan ke Jakarta, dan hendak menemui Presiden. Dan ini sekaligus bukti bahwa PTPN kebal hukum dan tidak mematuhi negara dan Pemerintahan yang ada saat ini. Mohon bantuan dari semua pihak untuk solidaritas bagi petani Simalingkar.

Terima kasih Pimpinan dan Ibu Menteri.

Salam.

KETUA RAPAT:

Ya saya rasa kalau memang itu kejadiannya benar, nanti kita panggil PTPN dan dari Kementerian BUMN-nya. Karena itu kan PTPN dibawah Kementerian BUMN.

Silakan dari Perhutani ya.

Inhutani, silakan jawab.

DIRUT PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Mohon ijin Ibu Menteri mau menjawab.

Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi IV, dan Pimpinan Rapat, dan Ibu/Bapak Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Mungkin sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu Bapak. Saya sendiri sebagai Dirut Perum Perhutani sejak 26 Februari 2020, kira-kira 4 bulan 1 minggu ini. Nah kemudian tadi kami mencatat apa-apa yang menjadi *concern* dari Ibu/Bapak Komisi IV DPR RI terkait dengan Perhutani dan Grup karena memang sejak akhir 2014 itu Inhutani sudah dijadikan anak perusahaannya Perhutani Pak. Jadi ini hadir disini juga Pak Dirutnya Inhutani I, nih Pak Agus sebelah kanan saya. Ini Pak Agus Inhutani I ada di Kalimantan wilayahnya, tadi ditanyakan oleh Pak Suhardi. Kemudian ada Inhutani II Pak Sangudi, mohon ijin lagi sholat. Kemudian ada Inhutani III Pak Baskoro, ini sama semua wilayahnya di Kalimantan. Kemudian Inhutani IV, ada Pak Andi, Beliau ada Riau ke atas sampai ke Aceh Pak. Jadi Sumatera

dibagi 2, Inhutani IV Riau ke atas, dan Inhutani V juga sholat Pak mohon ijin. Pak Bahrizal Dirutnya (ini Riau ke bawah sampai ke Lampung Pak).

Terima kasih, ada beberapa kami catat Pak *concern* tentang Perhutani. Terima kasih, bukan bersifat pertanyaan tapi banyak saran-saran ke kami. Kami akan melaksanakan. Termasuk tadi Pak Ariyadi tentang Perhutani yang ada di Madura. Jadi kami akan sambut baik Pak tadi saran Bapak untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam rangka untuk menghijaukan kembali lahan-lahan yang tandus. Jadi nanti mungkin melalui program PS yang sudah oleh Ibu Menteri Kehutanan.

Kemudian tentang keterbatasan untuk pemanfaatan senjata di Polhutani Pak. Jadi memang di kami juga mesti mengacu kepada regulasi dari Kepolisian terhadap Polhut yang memang berhak untuk memang senjata. Jadi ini kami sangat selektif. Ada test psikologisnya, ada tes administrasinya, sepanjang itu memenuhi ketentuan kita akan Kepolisian diijinkan untuk memegang senjata tersebut.

Kemudian tentang Inhutani Pak Suhardi, sebenarnya kami mau menawarkan nih Pak Ketua karena kami ini baru semua. Nanti kalau Bapak bisa panggil kami, kami akan bercerita secara lengkap tentang kinerja Perhutani maupun anak-anak perusahaannya. Hanya saja secara sepintas kami akan sampaikan Pak bahwa Inhutani I sampai V, sampai dengan saat ini kontribusi ke Perhutani Grup itu masih positif. Jadi kira-kira anak-anak perusahaan ini masih berkontribusi laba ke kami kira-kira Rp30-an Miliar 1 tahun. Dan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan oleh anak-anak perusahaan ini cukup besar meliputi PBB, kemudian DR, maupun PSDH, mungkin Inhutani I saja kira-kira hampir Rp100 Miliar setiap tahun. Jadi nanti kami akan siapkan materi secara detail untuk memfollow-up tadi yang menjadi *concern* Ibu/Bapak sekalian.

Barangkali itu yang dapat kami sampaikan Ibu Menteri untuk melengkapi pertanyaan.

Terima kasih.

Kami kembalikan ke Bapak.

*Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Dirut.

Jadi minta tolong Sekretariat nanti dicatat dijadwalkan, karena kita mau tahu juga permasalahan-permasalahan baik itu PTPN, Perhutani, yang berkaitan dengan kinerja dan keuangannya juga.

Jadi Bu Menteri, sebelum kita membacakan kesimpulan rapat. Coba tampilkan tadi halaman 204. Nah biopiracy tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Kalau kita lihat perkembangannya kan, tadi dikatakan oleh Ibu Menteri banyak peneliti-peneliti asing seolah-olah sebagai wisatawan masuk ke wilayah hutan-hutan yang banyak tumbuhannya yang mana mereka mengambil membawa pulang seolah-olah untuk penelitian. Contohnya tadi nih *she seido*. Ini kan hampir semua tumbuhan yang ada di Indonesia, dipatenkan di Luar Negeri. Karena apa? Memang masalahnya ini masalah yang agak pelik. Pertama, untuk pengawasan di hutan-hutan yang ada tumbuhan satwa liar dan lain-lain, itu kan 1 petugas kalau tidak salah mengurus 25.000 hektar. Apakah mungkin? Kan ini masalahnya. Yang kedua, dalam kesimpulan rapat nanti saya masukan agar setiap orang asing yang datang ke wilayah-wilayah yang kita anggap memiliki potensi itu wajib melapor. Kalau perlu didampingi, didampingi. Kalau perlu masuk diperiksa pulang pun diperiksa. Kalau dia tidak mau, ya kamu jangan datang. Kenapa? Ya misal 1 tumbuhan dimasuki. Kan umumnya peneliti itu pakai ransel, dia masukin saja, selesai urusan. Siapa mau periksa. Kalau saya bilang, periksa saja. Dan yang paling penting adalah tolong bantu data mengenai tumbuh-tumbuhan satwa yang langka. Dari situlah kita baru tahu berapa sih potensi yang kita miliki, berapa sih potensi yang sudah pernah atau yang tinggal sedikit tetapi mungkin masih bisa diselamatkan. Itu nanti dalam kesimpulan rapat saya masukan. Karena bagaimana pun sama juga dengan tadi itu. Yang masalah satwa yang di offset itu, mungkin 30 tahun lagi anak-cucu kita tanya, beruang itu seperti apa sih? Apakah yang ber-uang itu seperti Pak Dedi banyak duitnya atau bagaimana? Ya Bu Menteri ya.

Jadi sekali lagi, tolong kalau bisa minggu depan data dan wilayahnya, dan dimana saja agar nanti saya bisa bicara dengan KSDAE, dengan Gakkum untuk lebih focus, misalnya di Gunung Leuser itu ada 1 tumbuhan apa yang sangat langka ya kita fokuskan saja disitu. Turis asing mau masuk ya boleh tetapi dengan catatan. Catatannya tadi harus ada ijin, harus ada pemeriksaan.

Jadi demikian Bu Menteri tadi pertanyaannya sudah dilalui oleh Anggota.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua, interupsi Pak Ketua.

Sedikit saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Apa Pak Hermanto?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ini saya mendukung statement Pak Ketua. Sekitar kurang lebih 4 tahun lalu Bu Menteri, saya tuh berjalan di Hutan di dekat Gunung Krinci Bu Menteri,

antara perjalanan saya dari Tapan ke Sungai Penuh. Saya menemukan orang asing disitu Bu Menteri, saya terkaget. Kenapa kok orang asing bisa berada disini. Jadi benar nih Pak Ketua ini Bu Menteri. Jadi mengapa itu orang asing itu bisa sampai sejauh itu ditengah hutan. Bu Menteri tahulah bagaimana perjalanan dari Ketapan ke Sungai Penuh itu ya. Itu perjalanan yang penuh resiko itu, dan saya melewati itu Bu Menteri. Jadi saya minta supaya kehadiran orang asing disini memang perlu diperketat.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

1 menit. Betul?

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI. DESS., M.Sc.):

Betul.

Terima kasih.

Bu Menteri yang saya hormati dan saya banggakan.

Baru saja saya webinar atas undangan dari Badan Litbang Kehutanan. Nah ternyata banyak sekali pertanyaan yang bagus Bu Menteri. Jadi para peserta tadi ingin ada pelatihan-pelatihan khususnya untuk maggot. Karena yang menjelaskan tadi adik kelas saya Pak Agus Pakpahan bagus sekali dan bisa diujicobakan dan mohon bisa dimasukkan ke programnya Bu Vivien.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kurang paham. Apa sih maggot? Setahu saya maggot itu kan larva yang dijadikan ulat itu kan biasanya dikerjakan oleh Wakaketumnya Ibu Endang. Larva untuk, ya ujung-ujungnya untuk pakan ikan. Itu sudah usang Bu Endang. 10 tahun saya masuk Anggota Komisi IV itu sudah diujicobakan. Tetapi karena apa? Kita tidak konsekuen. Sudah uji coba, selesai, selesai sudah. Tidak ada kelanjutannya lagi itu. Itu 10 tahun lalu 2010 saya sudah datang. Pertama kali saya jadi Anggota Dewan Reses itu ke Palembang, ke Sumatera Selatan sudah negok itu maggot. Ya sampai itu ya *wassalam* sudah. Karena apa? Kita tidak konsekuen, tidak tekun untuk hal itu.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Dari dialog dan diskusi, saran dan masukan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelum acara ini kita akhiri, akan kami bacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini:

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan

percepatan realisasi APBN Tahun 2020 guna pelaksanaan tugas percepatan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 disamping tugas pokok menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, serta mengelola melestarikan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar pelaksanaan kegiatan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan dimasing-masing Provinsi dapat didukung melalui pelimpahan dana dekonsentrasi. Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat akan membantu mendorong alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Anggota?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong agar RUU *Omnibus law* Cipta Kerja dapat mengatur pendelegasian kewenangan pengelolaan bidang kehutanan kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk selanjutnya dapat didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai pemangku kewenangan ditingkat tapak dalam rangka mengelola dan melestarikan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap menurut kapasitas kelembagaan di Daerah.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ijin Ketua yang terhormat,

Ada problem ketika menyebut Pemerintah Kabupaten dan Kota karena tidak sesuai dengan Undang-Undang 23'2014. Jadi kalau boleh disebutkan saja kepada Daerah nanti kita bisa lihat, pelimpahan wewenang kepada Daerah. Tidak usah disebut Pemerintah Daerah, karena nanti sebelah mana

sebelah mana nanti kita akan lihat, apakah kemasyarakatnya, apakah kemana, nanti kita lihat.

KETUA RAPAT (SUDIN S.E./F-PDIP):

Setuju.

3. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong agar RUU *Omnibus law* Cipta Kerja dapat mengatur pendelegasian kewenangan pengelolaan bidang kehutanan kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk selanjutnya dapat didelegasikan kepada Daerah sebagai pemangku kewenangan ditingkat tapak dalam rangka mengelola dan melestarikan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara bertahap menurut kapasitas kelembagaan di daerah.

Begini setuju Bu?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai kewenangan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelibatan petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelenggaraan karantina tumbuhan dan hewan langka dilindungi pada setiap pintu pemasukan dan pintu pengelolaan satwa liar di seluruh Indonesia.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan *illegal logging*.

Anggota?
Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menertibkan pemberian ijin kalau masuk kedalam kawasan hutan yang memiliki sumber daya hayati, serta kearifan lokal bagi peneliti Luar Negeri dan tidak memberikan ijin membawa keluar media penelitian dalam bentuk apa pun dari dalam kawasan yang didatangi.

Anggota?
Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ijin, ini memang dikhususkan diarahkan ke peneliti untuk tidak membawa media penelitian.

KETUA RAPAT:

Ya kalau tidak kan seperti kantung semar itu. Turis asing datang berlagak-lagak jalan-jalan, meneliti, dia bawa akhirnya kan dijadikan hak paten. Ini kan pertama kali yang maling ini orang Taiwan kalau tidak salah.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ijin Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya Kanjeng.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Bu Menteri,

Jadi di Undang-Undang 590 diijinkan orang asing Bu. Tolong itu jangan sampai berlawanan dengan Undang-Undang. Mungkin pengawasannya lebih diperketat itu.

KETUA RAPAT:

Ini yang ditekankan adalah membawa, membawa sampel keluar.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Mungkin media/sampel ya Pak Wamen ya?

KETUA RAPAT:

Coba redaksinya?

Itu kan menertibkan pemberian ijin. Bukan melarang.

Coba Anggota dilihat dulu.

F-GERINDRA (Ir. H. T.A. KHALID, M.M.):

Saya pikir itu sudah betul Pak Ketua, menertibkan. Kita bukan melarang itu. Ada kebijakan masih di Kementerian LHK. ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Jadi kalau misalnya orang tersebut kita curigai ya kita tertibkan agar supaya jangan masuk.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Jadi begini Pak Ketua, kata "menertibkan" ini kan berarti masih boleh.

KETUA RAPAT:

Boleh.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Orang melakukan riset ini, tapi kaitannya dengan riset. Jangan kaitannya nanti dengan alasan turis dia masuk kemana-mana gitu loh. Tapi dia melakukan riset secara diam-diam. Jadi betul ini "menertibkan".

MENTERI LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ketua, karena otoritasnya sangat ketat dengan LIPI maka mungkin kalau boleh ditambahkan “meminta KLHK bekerjasama dengan LIPI”. Jadi nanti ada yang mana yang bagian LIPI, kami nanti habis ini akan mengundang LIPI berarti Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya kalau perlu nanti LIPI-nya kita undang kesini.

MENTERI LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Tetapi bunyinya, ini sudah betul menertibkan pemberian ijin keluar masuk dalam hutannya tetapi untuk yang membawa sampel itu harusnya memang tidak boleh, bukan penertiban dan melarang memawa sampe. Yang dibawahnya “dan tidak dibenarkan membawa keluar sampel”. Jadi bukan menertibkan ijin. Tidak dibenarkan membawa keluar sampel. Sudah bunyi dilarang harus ada sanksi. Kita yang tahu persis ini LIPI, bukannya KLHK. Jadi nanti kita akan bicara dengan LIPI.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Pak Ketua,

Jadi tidak hanya LIPI Bu Perguruan Tinggi, karena itu kan masuk IPB Bu. Ternyata banyak teman-teman saya yang penelitian di CIFOR itu dari Perancis begitu Bu, suka bawa yang aneh-aneh.

Terima kasih.

MENTERI LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kemenristek Brin.

KETUA RAPAT:

Jadi di Undang-Undang Karantina juga ada pencegahan pembawaan keluar itu ada, dan ada sanksinya.

MENTERI LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ketua, sebagai contoh Gakkum pernah nangkap justru di Bandara. Pas di periksa di ranselnya itu barang (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Iya. Karena kan mereka umumnya menyembunyikan.

Saya baca ulang,

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menertibkan pemberian izin keluar masuk ke dalam Kawasan Hutan yang memiliki sumber daya hayati serta kearifan lokal bagi peneliti luar negeri dan tidak dibenarkan membawa keluar sampel penelitian dalam bentuk apapun tanpa izin.

Anggota?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua, itu saja yang diganti tanpa izin itu “J-nya” diganti “z”. Kalau “J” itu berbahasa sunda.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Pemerintah untuk memberikan ijin pengelolaan wisata kampung Adat Baduy di Provinsi Banten mengingat adanya kekhawatiran akan terganggunya kearifan lokal masyarakat hutan adat Baduy. Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menambah luasan kawasan hutan adat Baduy sebagai upaya menjaga dan melestarikan salah satu warisan budaya nusantara.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ijin Ketua, ada masalah. Karena wilayahnya bukan wilayah kehutanan kita tidak bisa masuk, tetapi bisa kalau bisa meminta kepada KLHK untuk melakukan evaluasi dan nanti kita akan meminta kepada Pemerintah Daerah, sebab ijinnya dari Pemerintah Daerah.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Begini Bu, bahwa kita lihatnya kalau lihat luasan cakupan lingkungan hidup lihatnya adalah melihat, menjaga kelestarian lingkungannya. Karena suku adat itu lingkungannya sudah lestari, tidak ada sabun mandi, tidak ada pasta gigi, bersih airnya, tidak ada pestisida, kan bisa seperti itu. Tidak ada sampah plastik dari situ. Kalau ijin wisatanya kan memang ada destinasi, penghapusannya kalau itu. Saya sih melihat dari situ.

KETUA RAPAT:

Mungkin yang dimaksud Ibu Menteri ini kan bukan wewenang LHK, Cuma kalau meminta (benar yang tadi itu meminta) kepada LHK untuk. Kita minta sama LHK, LHK meminta kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Boleh, Pak Ketua mungkin bunyinya menjadi “Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian LHK untuk melakukan pengkajian atas ijin pengelolaan Kampung Adat Baduy serta mengambil langkah-langkah selanjutnya dilapangan dan dilaporkan kepada Komisi IV atas pertimbangan. Mengingat adanya kekhawatiran akan terganggunya kearifan lokal di masyarakat Baduy; serta mengambil langkah-langkah. (Nanti termasuk yang perluasan dan lain-lain setelah kita kaji), serta mengambil langkah-langkah dan melaporkan kepada Komisi IV DPR RI.

Jadi secepatnya melapor ke Komisi IV DPR RI. Itu saja Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya ulangi,

7. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian atas izin pengelolaan wisata kampung Adat Baduy di Provinsi Banten mengingat adanya kekhawatiran akan terganggunya kearifan lokal masyarakat hutan Adat Baduy serta mengambil langkah-langkah dan melaporkan kepada Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai upaya menjaga dan melestarikan salah satu warisan budaya nusantara.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

kalimatnya, serta mengambil langkah-langkah dalam upaya menjaga dan melestarikan salah satu warisan budaya nusantara dan melaporkan. Jadi yang harus dilaporkan itu kan langkah-langkah dalam menjaga ini.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Sudah dibaca?

Anggota?

Pemerintah sudah lihat?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN S.E./F-PDIP):

Terakhir.

8. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menetapkan dan memindahkan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dari Kota Medan ke Kota Banda Aceh.

(ditempat Pak Muslim).

Setuju?

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Sedikit Pak Ketua.

Ijin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

Mau dipindahin ke Kampung Bapak?

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Bukan.

Ini kan prosesnya sudah lama. Saya berterima kasih kepada teman-teman dan Pimpinan di Komisi IV untuk mendorong. Tapi pada kesempatan ini ijin Bu Menteri, kita sepakat pindah Bu Menteri? Sepakat? Kalau sepakat saran saya, Komisi IV dan LHK sepakat untuk memindah. Karena kalau dorong dari 2015 sudah.

KETUA RAPAT:

Ya Pak begini Pak, masalahnya kalau memindahkan itu tempatnya kan belum ada, anggarannya belum ada. Makanya kita harapkan di Tahun 2021, disitu kan ada agar segera menetapkan. Bapak tidak usah pusing Pak, nanti Bapak pindahin.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Siap Pak.

Mudah-mudahan ini permintaan kami yang terakhir tentang Leuser disini.

Terima kasih.

Ini permintaan terakhir Ibu Menteri, karena sejak Tahun 2015 sudah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak mintanya baru sekarang 2020, kok dari 2015.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Enggak Pak Ketua, tadi saya sudah menyerahkan surat Gubernur sejak permintaan Tahun 2015. 3 surat Gubernur sudah ke. Malah sudah masuk ke.

KETUA RAPAT:

Oh begitu. Ya kan sekarang ada Pak Khalid di kawal, pasti langsung pindah.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Siap Komandan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pemerintah setuju?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sebelum kami menutup Rapat Kerja ini, kami persilakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja kita hari ini.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kehadiran yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota sangat banyak, Alhamdulillah dengan berbagai catatan, masukan dan arah untuk orientasi peningkatan kinerja KLHK. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan ini akan kami tindaklanjuti Bapak. Saya akan segera menetapkan keputusan tentang Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser di Banda Aceh yang pelaksanaannya nanti diselaraskan dengan keputusan tentang organisasi KLHK, karena dia dalam 1 paket tentang organisasi. Saya juga akan menindaklanjuti hasil Rapat Kerja ini pemantapan konseptualisasi penanganan kebakaran hutan secara permanen, pencegahan permanen dan juga terkait dengan penanganan komprehensif *illegal logging*, dan pengawasan serta penegakan hukum, dan juga dengan kajian lingkungan hidup strategis secara cepat untuk masalah wilayah adat Baduy. Demikian.

Terima kasih banyak sekali lagi atas dukungan, arahan dan berbagai catatan. Kurang lebih saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang pantas.

Terima kasih.

*Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Jadi Bu Menteri, sebelum saya menutup ada rencana Menteri KKP ke Lampung. Itu rencananya tanggal 18 atau tanggal 19, atau tanggal 20 akan mengadakan tanam mangrove. Kalau bisa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun mem-*back-up*. Jadi kerjasama antara Kelautan dengan Lingkungan Hidup untuk menanam mangrove, mungkin rencana 2 titik. Infonya pertama adalah Lampung Timur yang mana kerusakannya cukup dahsyat. Disana juga terjadi penyedotan pasir, tambang pasir. Waktu itu saya sama Pak Roy menyetok. Alhamdulillah akhirnya kapalnya dibakar Bu, karena sudah dibilang jangan menyedot, jangan nyedot tetapi karena mereka berasumsi masih punya ijin. Itu juga dari PSDKP Kelautan maupun Dirjen di KKP akhirnya di stop.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan dan kekhilafan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001